

**KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
DALAM MENGELOLA PENDIDIKAN INKLUSI  
DI SD AL IRSYAD 01 DAN 02 CILACAP**



**TESIS**

**Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)**



**IAIN PURWOKERTO**

**ABDUL AZIZ  
NIM: 142340206**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553  
Website : [www.iaipurwokerto.ac.id](http://www.iaipurwokerto.ac.id), E-mail : [pps.iaipurwokerto@gmail.com](mailto:pps.iaipurwokerto@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor. 124 /In.17/D.Ps/PP.009/VIII/2017

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa,

Nama : Abdul Aziz

NIM : 1423402068

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul : \*Kebijakan Lembaga Pendidikan dalam Mengelola Pendidikan Inklusi di SD Al-Irsyad 01 dan 02 Cilacap\*.

yang telah disidangkan pada tanggal 08 Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 31 Agustus 2017

Dr. H. Abdul Basit, M. Ag. ✎  
NIP. 19691219 199803 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang tulis berjudul: "**Kebijakan Lembaga Pendidikan dalam Mengelola Pendidikan Inklusi Di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap**". seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.


Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.


Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 26 Juli 2017

Hormat Saya,



  
Abdul Aziz  
NIM: 1423402068



**KEMENTERIAN AGAMA R.I  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553  
Website: www.iainpurwokerto.ac.id, Email: pps.iainpurwokerto@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : Abdul Aziz  
NIM : 1423402068  
Program Study : MPI  
Judul Tesis : Kebijakan Lembaga Pendidikan dalam Mengelola Pendidikan Inklusi Di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	<b>Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.</b> NIP.19691219 199803 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji		31/8/2017
2	<b>Dr. H. Sunhaji, M.Ag.</b> NIP.19681008 199403 1 001 Sekretaris Sidang Merangkap Penguji		31/8-2017
3	<b>Dr. Maria Ulpah, M.Si.</b> NIP. 19720501 200501 1 001 Pembimbing Tesis Merangkap Penguji		31/8 17
4	<b>Dr. Subur, M.Ag</b> NIP. 19670307 199303 1 005 Penguji Utama		20/8 2017
5	<b>Dr. H.M. Hizbul Muflihah, M.Pd</b> NIP. 19630302 199103 1 005 Penguji Utama		31/8 2017

Purwokerto, 21 Agustus 2017

Ketua Program Studi MPI

**Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**  
NIP. 19681008 199403 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa

Nama : Abdul Aziz  
NIM : 1423402068  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)  
Judul Tesis : Kebijakan Lembaga Pendidikan dalam Mengelola Pendidikan Inklusi Di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 26 Juli 2017

Pembimbing,



**Dr. Maria Ulpah, M.Si.**  
NIP: 19801115 200501 2 004

**Kebijakan Lembaga Pendidikan Dalam Mengelola Pendidikan Inklusi  
Di SD Al Irsyad 01 Dan 02 Cilacap  
Oleh : Abdul Aziz**

**ABSTRAK**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia, dengan pendidikan diharapkan akan dapat merubah pola pikir kearah yang lebih baik. Lembaga pendidikan diharapkan mampu melayani semua peserta didik dengan segala kemampuan maupun keterbatasan yang dimiliki. Bagi peserta didik yang mempunyai keterbatasan tertentu dapat belajar dengan peserta didik normal dengan model pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal yang seusia dalam kelas reguler. Agar pengelolaan pendidikan berlangsung dengan baik maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang diambil. Berdasarkan pada latar belakang masalah ini, maka penulis merumuskan rumusan masalahnya tentang bagaimana tahapan dalam menentukan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yaitu SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil objek penelitian SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai ialah: observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data berupa seleksi, klasifikasi dan interpretasi data yang ada. Kemudian mendeskripsikan yakni menyajikan data dengan kalimat atau bahasa untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci kemudian dinarasikan dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh lembaga pendidikan pengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap dengan menyediakan layanan pendidikan inklusi dengan program *Butterfly Learning Centre*. Adapun untuk menentukan sebuah kebijakan maka langkah yang diambil adalah dengan (1) membuat formulasi kebijakan yang berisi perumusan masalah, agenda kebijakan, adopsi kebijakan. (2) mengimplementasikan kebijakan. Implementasi itu sendiri merupakan cara yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam implementasi program *Butterfly Learning Centre* berupa layanan 5 kali intervensi yang dilakukan dalam sepekan. (3) Evaluasi kebijakan melalui program *Butterfly Learning Centre* dilakukan untuk mengetahui adanya kekurangan dalam menjalankan program dan dilakukan setiap 3 bulan sekali.

**Kata Kunci: Kebijakan, Lembaga Pendidikan, pengelolaan, Pendidikan Inklusi.**



**Policy of Educational Institution in Managing Inclusive Education  
At Al Irsyad Elementary School 01 And 02 Cilacap  
By : Abdul Aziz**

**ABSTRACT**

Education is the basic right of every human being, with education expected to be able to change the mindset towards the better. Educational institutions are expected to serve all learners with all the capabilities and limitations possessed. For learners who have certain limitations can learn with normal learners with inclusive education model. Inclusion education is an education that includes students with special needs with normal learners of equal age in the regular class. In order for the management of education to take place properly it is necessary that the policies taken. Based on the background of this problem, the authors formulate the problem formulation of how the stages in determining the policies made by educational institutions that Elementary School Al Irsyad 01 and 02 Cilacap.

This research is a qualitative research, by taking the object of Elementary School Al Irsyad 01 and 02 Cilacap research. While the data collection techniques used are: observation, interview and documentation. The analysis of data in the form of selection, classification and interpretation of existing data. Then describe that presents the data with sentence or language to obtain a clear and detailed information then narrated and drawn conclusions.

The results of this study conclude that the policy adopted by educational institutions management of inclusion in Elementary School Al Irsyad 01 and 02 Cilacap by providing inclusive education services with the Butterfly Learning Center program. As for determining a policy then the steps taken are (1) create a policy formulation that contains the formulation of the problem, the policy agenda, the adoption of the policy. (2) implementing the policy. Implementation itself is a way done so that a policy can achieve the goals to be achieved. In the implementation of the program Butterfly Learning Center service 5 times intervention conducted in a week. (3) Evaluation of the policy through the Butterfly Learning Center program is done to determine the lack of running the program and is treated every 3 months.

**Keywords: Policy, Educational Institution, management, Inclusive Education.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri  
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	śa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	za	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ş	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	T (dengan titik di bawah)



ظ	za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	-

**Lanjutan tabel:**

ف	fa	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	lam	K	-
ل	mim	L	-
م	nun	M	-
ن	wawu	N	-
و	h	W	-
هـ	hamzah	H	-
ء	ya	'	apostrof
ي		Y	-

**B. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh : ditulis أَحْمَدِيَّة IAIN PURWOKERTO *Ahmadiyyah*.

**C. Ta' Marbuthoh di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis jamā'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh :

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ Ditulis karāmatul-auliyā'

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

#### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' Mati ditulis *ai*

جَمْعَةٌ ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wawu Mati ditulis *au*

قَوْلٌ ditulis *qaul*

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *muannats*

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qomariyyah*, contoh :

السَّمَاءُ ditulis *As-Samā*

الشَّمْسِ ditulis *Asy-Syams*

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) – nya.

### **I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *zawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh :

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islām*



**IAIN PURWOKERTO**

## MOTTO

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ  
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱۱)

خَبِيرٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : berlapang-lapanglah dalam majlis maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan padamu. Dan apabila dikatakan : berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Mujadilah: 11).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al Qur'an Terjemah Al Hakim, (Semarang, As Syifa .1998), hlm.433

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Istriku Murniati, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, terima kasih atas dukungan moralnya, semoga menjadi goresan sejarah dalam hidup dan kehidupan kita.
2. Anak-anak-ku yang tercinta Faisa Fadhila Syafiq dan Hilma Raissa Tsany, yang selalu memberi warna kehidupanku.
3. Kedua orang tuaku H. Djafar dan Hj. Sutiati, yang dengan tulus telah memberi semangat dan mengiringiku disetiap langkah dengan do'a yang tulus
4. Semua teman-teman yang senantiasa dekat di hati, menyiram air keaktifan, memberi benih kreatifitas, menangkal kejenuhan, dan mendoakan dari keputusasaan. Terima kasih atas dukungannya.
5. Almamaterku tercinta IAIN Purwokerto



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan berupa limpahan rahmat, curahan nikmat dan belaian kasih sayang kepada segenap umat manusia. Untaian rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan bimbingan dan segala kemudahan hingga penyusunan tesis yang berjudul “Kebijakan Lembaga Pendidikan dalam Mengelola Pendidikan Inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap” ini dapat tersusun dan terselesaikan. Jerih payah yang telah tercurah, ketekunan pembimbing dalam memberikan jalan dan arah, tak akan berdaya tanpa ridlo, hidayah dan *taufiq* Allah SWT, *Rabbul Izzah*.

Penulisan tesis ini tentu tidak terlepas dari uluran tangan kebaikan berbagai pihak, berupa kontribusi pemikiran, tenaga dan materi serta referensi. Kiranya tak pantas penulis berbangga diri dengan karya tesis ini sebelum bertegur sapa dan bertutur kata kepada segenap pihak yang telah berjasa. Karena itulah dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberi kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag, Direktur Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah mengayomi pelayanan study pasca sarjana dengan ketekunan dan kesabaran.
3. Dr. H. Sunhaji, M.Ag, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak memberikan support dan motivasi dengan penuh semangat.
4. Dr. Maria Ulpah, M.Si, selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dengan kelembutan dan pelayanan kepada penulis.



5. Dr. H.M Najib, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan layanan konsultasi akademik sehingga penulis bisa menempuh studi dengan baik.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana dan Staf Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang telah mendidik melayani penulis dalam segala kebutuhan administrasi dalam penulisan tesis ini.
7. Sumarso, S.Pd., Kepala SD Al Irsyad 01 Cilacap, yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Khasani, S.Pd, Kepala SD Al Irsyad 02 Cilacap, yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Yudhi Pramudityo, S.Psi, Manajer BLC Al Irsyad Cilacap, yang telah memberi banyak informasi tentang pelaksanaan pendidikan inklusi.
10. Teman sejawat Program Pascasarjana di kelas MPI E yang dengan aktif mengirim doa, support dan perhatian melalui media sosial WhatsApp group Pasca MPI E.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Teriring doa: *“Izaakumullohu Khairan Katsiiraan wa Ahsanal Jazaa”*.

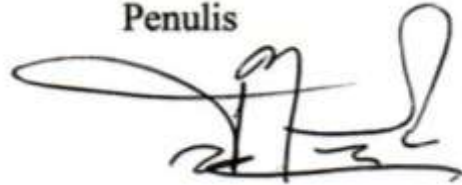
Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan dan dengan senang hati peneliti mengharap kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan pada penelitian-penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah di masa mendatang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya membangun mutu dan mengembangkan pendidikan terutama pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai keterbatasan sehingga mereka dapat

menikmati pendidikan secara wajar serta bermanfaat bagi praktisi pendidikan yang membutuhkan.

Purwokerto, 26 Juli 2017

**Penulis**



**Abdul Aziz**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN DIREKTUR .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRAC .....	vii
TRANSLITERASI .....	viii
MOTTO .....	xii
PERSEMBAHAN .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR BAGAN .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Teoritik .....	13
2. Manfaat Praktis .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	14

**IAIN PURWOKERTO**

BAB II	KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENTANG	16
	PENDIDIKAN INKLUSI	
	A. Kebijakan .....	16
	1. Pengertian Kebijakan .....	16
	2. Tingkat dan Jenis Kebijakan .....	19
	3. Tahapan –Tahapan Kebijakan.....	23
	4. Pendekatan Kebijakan .....	44
	5. Fungsi Kebijakan .....	46
	B. Lembaga Pendidikan .....	47
	1. Pengertian lembaga Pendidikan.....	47
	2. Jenis-Jenis Lembaga Pendidikan.....	48
	3. Peran Lembaga Pendidikan.....	52
	C. Pendidikan Inklusi.....	54
	1. Pengertian pendidikan Inklusi.....	54
	2. Landasan Pendidikan Inklusi.....	59
	3. Tujuan Pendidikan Inklusi.....	62
	4. Fungsi Pendidikan Inklusi.....	63
	5. Manfaat Pendidikan Inklusi.....	63
	D. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	64
	E. Kerangka Berpikir.....	70
BAB III	METODE PENELITIAN	73
	A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	73
	B. Jenis dan Pendekatan .....	73
	C. Subjek Penelitian .....	75
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	76
	E. Tehnik Analisis Data .....	79
	F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	81

**IAIN PURWOKERTO**

BAB IV	KEBIJAKAN	LEMBAGA	PENDIDIKAN	DALAM	83
	MENGELOLA PENDIDIKAN INKLUSI				
A.	Gambaran Umum SD Al Irsyad 01 Cilacap.....				83
1.	Profil dan Sejarah.....				83
2.	Visi dan Misi .....				86
3.	Struktur Organisasi .....				87
B.	Gambaran Umum SD AL Irsyad 02 Cilacap.....				89
1.	Profil dan Sejarah.....				89
2.	Visi dan Misi.....				90
3.	Struktur Organisasi .....				91
C.	Pengelolaan Pendidikan Inklusi .....				93
1.	Pendidikan Inklusi di SD Al Irsyad 01 .....				93
a.	Peserta Didik.....				93
b.	Kurikulum.....				97
c.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....				98
d.	Sistem Penilaian .....				100
e.	Sarana dan Prasarana.....				101
2.	Pendidikan Inklusi di SD Al Irsyad 02 .....				102
a.	Peserta Didik.....				102
b.	Kurikulum.....				107
c.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....				109
d.	Sistem Penilaian .....				110
e.	Sarana dan Prasarana.....				111
D.	Kebijakan Pendidikan Inklusi Melalui Program Butterfly .....				112
	Learning Centre.....				
1.	Kebijakan model GROW dalam pendidikan inklusi.....				114
2.	Tahapan Formulasi Kebijakan.....				117

3. Tahapan Implementasi Kebijakan.....	123
4. Tahapan Evaluasi Kebijakan.....	126
5. Pendekatan Kebijakan.....	128
6. Fungsi Kebijakan.....	128
<b>BAB V ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	
<b>INKLUSI DI SD AL IRSYAD 01 DAN 02 CILACAP</b>	131
A. Tahapan Formulasi Kebijakan .....	131
B. Tahapan Implementasi Kebijakan .....	136
C. Tahap Evaluasi Kebijakan .....	138
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	141
A. Kesimpulan .....	141
B. Rekomendasi .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA.</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.</b>	



**IAIN PURWOKERTO**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Proses kebijakan menurut William N. Dunn.....	26
Tabel 2.2 Proses Kebijakan menurut James E. Anderson.....	29
Tabel 4.1 Daftar peserta didik inklusi di SD Al Irsyad 01.....	94
Tabel 4.2. Daftar peserta didik inklusi di SD Al Irsyad 02.....	102



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Sistem .....	32
Gambar 2.2 Model Carl V. Paston dan Davids S Sawicki.....	33
Gambar 2.3 Model Thomas R. Dye.....	34
Gambar 2.4 Model Kebijakan Dwijowijoyo.....	35
Gambar 2.5 Model Kebijakan Van Metter dan Van Horm.....	37
Gambar 2.6 Kerangka Berpikir.....	71
Gambar 3.1 Komponen Analisis data.....	81



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran SK SK Penetapan Dosen Pembimbing Tesis
- Lampiran SK Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran SK Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 Surat keterangan Wawancara
- Lampiran 6. Dokumen Pendukung
1. Struktur Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap
  2. Struktur Komite SD Al Irsyad 01 dan SD Al Irsyad 02
  3. Struktur Organisasi Sekolah SD Al Irsyad 01 dan SD Al Irsyad 02
  4. Dokumen Foto-foto.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia, karena manusia membutuhkan pendidikan untuk dapat mencapai keinginan, harapan, dan cita-cita yang dimiliki. Sebagai hak dasar bagi setiap manusia, pendidikan tidak hanya diperuntukan bagi anak-anak yang normal saja tetapi pendidikan juga merupakan hak dasar yang dimiliki oleh anak yang luar biasa atau anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 diamanatkan bahwa setiap warga Negara republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa Negara memberi jaminan sepenuhnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.<sup>1</sup> Dengan demikian juga berarti bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan anak-anak yang memiliki kesulitan belajar juga memiliki kesempatan belajar yang sama dengan anak-anak normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan sebagai hak asasi manusia juga diperkuat dengan adanya deklarasi Internasional. Pada tahun 1948 deklarasi Hak Asasi Manusia mengeluarkan pernyataan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penutasan wajib belajar Sembilan tahun disemangati oleh seruan *Internasional Education For All* ( *EFA* ) yang dikumandangkan oleh UNESCO sebagai kesepakatan global hasil

---

<sup>1</sup> Dedy Kustawan, *Manajemen Pendidikan Inklusif* ( Jakarta: PT Luxima Metro Media, 2016 )  
hlm 12

*World Educational Forum* di Dakar, Sinegal tahun 2000, penuntasan EFA ini diharapkan tercapai tahun 2015.<sup>2</sup>

Anak berkebutuhan khusus yang disebut ABK merupakan anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dapat dikatakan berkebutuhan khusus apabila ada sesuatu hal pada diri anak yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Kekurangan dan kelebihan dapat berupa fisik, mental maupun emosinya.<sup>3</sup> Anak berkebutuhan khusus mungkin disebabkan kelainan atau memang bawaan dari lahir atau masalah tekanan ekonomi, politik, sosial dan perilaku yang menyimpang. Anak tersebut disebut dengan kebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan keberbedaan dengan anak umumnya.<sup>4</sup>

Pemerataan kesempatan belajar anak berkebutuhan khusus dilandasi pernyataan Salamanca tahun 1994. Pernyataan Salamanca ini merupakan perluasan tujuan dari *Education For All* dengan mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakkan sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia melalui keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan no 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi yang melayani Penuntasan Wajib Belajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan terpadu yang ada pada saat ini diarahkan untuk menuju pendidikan inklusi sebagai wadah yang ideal yang diharapkan dapat mengakomodasikan pendidikan bagi semua, terutama bagi anak-anak yang

---

<sup>2</sup> Suyanto, *Pedoman Khusus Penyelenggaraan pendidikan Inklusi* (Direktorat pembinaan sekolah luar biasa Didektorta Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2009) hlm 1

<sup>3</sup> Dedi kustawan dan Yani Meimulyani, *Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya* ( Jakarta: PT Luxima, 2016 ) hlm 23

<sup>4</sup> M. Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: konsep dan Aplikasinya* ( Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013) hlm 138

memiliki kebutuhan pendidikan khusus yang selama ini masih belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan layaknya seperti anak-anak lainnya.

Akses pendidikan dengan memperhatikan kriteria yang terkandung dalam makna inklusi masih sangat sulit dipenuhi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam melaksanakan usaha pemerataan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus baru merupakan rintisan awal menuju pendidikan inklusi. Sistem pendidikan inklusi diharapkan dapat menjangkau semua anak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebaiknya anak berkebutuhan pendidikan khusus dapat ditampung dan belajar pada SLB, akan tetapi tidak semua anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebut dapat belajar pada SLB dikarenakan banyak hal dan faktor yang mempengaruhi akan hal tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya SLB. Salah satu penyebab SLB masing sedikit adalah karena biaya operasional yang lebih tinggi dibanding sekolah regular. Selain itu juga keberadaan SLB biasanya berada di ibu kota propinsi, kabupaten/kota, padahal anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebar di seluruh wilayah tanah air dan banyak anak-anak tersebut berada di daerah yang sangat sulit dijangkau.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda oleh karenanya orang tua, dan pendidik juga harus paham dan mengerti akan hal itu. Kemampuan yang berbeda itu dapat terjadi dalam hal kesulitan belajar (*Learning Disability*)<sup>5</sup> yang terdiri dari kesulitan belajar secara umum seperti lambat dalam belajar, dan kesulitan belajar secara khusus seperti kesulitan belajar dalam mata pelajaran tertentu seperti kesulitan membaca, menulis, berhitung. Anak-anak yang seperti inilah yang memerlukan pendidikan secara khusus. Layanan pendidikan yang diberikan secara khusus inilah yang akan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh mereka.

---

<sup>5</sup> T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2006 )  
hlm 193



Bagi anak-anak yang memiliki kekhasan inilah yang kadang -kadang masih belum tertangani secara baik karena mereka selama ini belajar di sekolah yang reguler yang tidak menyediakan layanan pendidikan khusus. Akhirnya anak-anak yang seperti ini akan mengalami kesulitan belajar dan kemungkinan besar tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik sehingga anak-anak yang memiliki keterbatasan ini kemungkinan besar akan mengulang di kelas yang sama yang pada akhirnya justru akan membuat anak merasa minder dan kemungkinan putus sekolah.

Istilah anak berkebutuhan khusus atau dalam istilah lain *exceptional child* mencakup anak yang mengalami kelainan, sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus. Definisi anak berkebutuhan khusus ini dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Kirk dan Gallager yang menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berbeda dengan anak rata-rata atau normal dalam hal karakteristik mental, kemampuan sensori, kemampuan komunikasi, perilaku sosial atau karakteristik fisik. Berbagai macam perbedaan tersebut tentunya anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus agar mereka dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki.<sup>6</sup>

Pendidikan yang berlangsung selama ini terutama bagi anak-anak yang mempunyai keterbatasan disediakan dalam tiga lembaga pendidikan, yaitu sekolah berkelainan (SLB), sekolah luar biasa (SLB), dan sekolah terpadu (Inklusi). SLB menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada SLB Tunanetra, SLB tunarungu, SLB tunagrahita, SLB tunadaksa, SLB tunalaras, SLB tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak-anak yang beragam mulai dari yang tunanetra, tunarungu, tuna grahita, tunadaksa, dan tunalaras.

---

<sup>6</sup> Safrudin Aziz, *Pendidikan seks anak berkebutuhan khusus* ( Yogyakarta: Gava Media, 2015 ) hlm 51

Pada dasarnya pendidikan merupakan upaya dalam mengembangkan sumberdaya manusia kearah yang lebih baik, meskipun itu bukan satu-satunya cara. Dengan pendidikan akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan pendidikan akan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, cerdas, kreatif, trampil, disiplin, tanggungjawab, serta sehat jasmani dan rohani, mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi, berjiwa sosial, dan berorientasi masa depan.

Sebagai landasan utama penyelenggaran pendidikan inklusi secara filosofi adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang penuh dengan kebhinekaan. Filsafat ini sebagai wujud dari kebhinekaan manusia.

Bertolak dari landasan filosofi bhineka tunggal ika inilah, maka kelainan dan kebakatan merupakan anugrah dari Allah SWT yang harus kita terima dengan lapang dan ikhlas. Seperti dalam semboyan bhineka tunggal ika yang memuat tentang adanya perbedaan dalam sendi kehidupan baik itu berupa suku, ras, budaya, agama, kepercayaan, bahasa, dan sebagainya.

Landasar yuridis Internasional tentang layanan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamca ( UNESCO,1994 ) oleh para menteri pendidikan sedunia. Deklarasi Salamca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak sejatinya belajar secara bersama-sama tanpa memandang kesulitan maupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sebagai bagian dari umat manusia secara global, Indonesia tentu tidak akan mengabaikan begitu saja deklarasi tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia dijamin oleh (1) Undang\_undang dasar 1945 pasal 31, (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 32 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa

penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusi atau sekolah khusus, (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 002/U/1986 pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan terpadu adalah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak cacat yang diselenggarakan secara bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut ( 5) Surat Edaran Dirjen nomor 380/C.C6/MN/2003 perihal pendidikan inklusi. SD Al Irsyad 01 dan 02 kabupaten Cilacap dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap nomor 420/2877/03/33 tentang ijin operasional penyelenggaraan pendidikan inklusi ( anak berkebutuhan khusus ) pada sekolah dasar maka sekolah tersebut melaksanakan dan menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi.<sup>7</sup>

Landasan pedagogis bagi sekolah yang mengadakan dan menyelenggarakan layanan pendidikan iklusif adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan memainkan peran yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai penyelenggara pendidikan tentunya sekolah memiliki berbagai kebijakan dan aturan aturan yang mengikat seluruh komponen yang ada di dalamnya. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tentunya memiliki kriteria-kriteria tertentu yang mendukung terhadap keberhasilan suatu proses pendidikan. Pendidikan yang bermutu tentu tidak serta merta dapat diraih dengan mudah tetapi memerlukan perjuangan dan kerja keras dari seluruh komponen yang ada.

---

<sup>7</sup> Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Cilacap tanggal 02 Juli 2008

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu adanya dukungan dari semua unsur yang ada. Kemampuan kepala sekolah dalam hal manajerial tentu sangat dibutuhkan agar dapat mewujudkan tujuan sekolah. Kepala sekolah hendaknya dapat mendayagunakan kemampuan kamampuan yang ada di sekolah baik itu personal maupun material.

Kemampuan kepala sekolah dalam hal manajerial akan berlangsung secara efektif dan efisien jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan tanggung jawab tenaga pendidikan yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar, dan yang cukup sesuai dengan mata anggaran dan kebutuhan yang ada, serta peran serta aktif dari masyarakat. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi secara baik maka akan tercipta pengelolaan sekolah yang baik, tetapi jika ada salah satu saja unsur yang tidak ada atau berjalan kurang optimal maka efektifitas dan efisiensi pengelolaan sekolah menjadi terganggu dan kurang optimal.

Dengan adanya reformasi dalam segala bidang dan masuknya era globalisasi dalam semua lini kehidupan membawa kepada kehidupan yang penuh dengan persaingan, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan dasar sebagai pondasi untuk menyiapkan anak-anak dalam menghadapi tantangan zaman sesuai dengan perkembangan yang ada. Penyiapan generasi yang tangguh ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Anak-anak yang mempunyai keterbatasan juga perlu kiranya dipersiapkan untuk menjemput impian dengan tetap memperoleh pendidikan yang baik. Sehingga memunculkan sekolah dengan program sekolah inklusi.

Kebijakan pemerintah melalui upaya yang dilakukan dengan menggulirkan program wajib belajar Sembilan tahun perlu disambut dengan peningkatan layanan kepada siswa baik yang normal maupun kepada siswa yang membutuhkan pendampingan karena memiliki keterbatasan. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan layanan yang

prima yang harus diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan prevalensi jumlah anak-anak berkebutuhan khusus sekitar 3 % dari populasi anak usia sekolah, angka tersebut belum termasuk mereka yang tergolong autis, hiperaktif, berbakat dan kesulitan belajar. Hasil sensus pada tahun 2001 menggambarkan baru sekitar 3,7 % ( 33.850 anak) yang terlayani di lembaga persekolahan, baik di sekolah umum maupun di sekolah luar biasa.<sup>8</sup>

Dengan melihat kenyataan yang ada bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus ( 96,3%) di Indonesia yang belum memperoleh dan mendapatkan layanan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh (1) kondisi ekonomi keluarga orang tua yang kurang mampu/kurang menunjang (2) jarak antara rumah dengan sekolah luar biasa (SLB) yang relatif jauh (3) sekolah umum baik itu SD maupun SMP yang tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak normal, oleh karena itu perlu adanya model layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut belajar bersama-sama dengan anak-anak normal di sekolah umum. Dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai bentuk perwujudan rasa tanggungjawab kita terhadap pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan secara umum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan proses pembelajaran.

Dalam pendidikan inklusi ini mereka tidak semata-mata mengejar kemampuan akademik, tetapi lebih dari itu, mereka belajar tentang kehidupan itu sendiri. Kekurangan yang ada tidaklah menjadi penghalang setiap orang untuk maju, sukses dan meraih cita-cita. Pendidikan inklusi yang ada selama ini baik

---

<sup>8</sup> *Pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi ,pengadaan dan pembinaan tenaga pendidik* (Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah: Departemen Pendidikan Nasional , 2009) hlm 1



yang ada di tingkat dasar maupun lanjutan sangat diharapkan kontribusinya sebagai cara untuk menghantarkan anak berkebutuhan khusus untuk dapat meraih asa dan tidak tertinggal jauh dari anak-anak normal lainnya.

Keberhasilan atau efektif tidaknya suatu proses pendidikan dapat diketahui melalui penilaian, dalam hal ini penilaian yang dilakukan mengarah kepada program yang valid. Penilaian dalam dunia pendidikan menganut prinsip secara terus menerus (berkelanjutan) dan menyeluruh (komprehensif) guna mendukung upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Dalam implementasi pendidikan inklusi belum adanya kesamaan persepsi tentang konsep pendidikan inklusi. Apabila kita lihat dari beberapa standar pendidikan yang dibuat pemerintah melalui BSNP pendidikan inklusi hanya diperuntukkan bagi anak-anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras, yang kemampuan intelektualnya tidak berada di bawah rata-rata. Padahal, kenyataan di lapangan prevalensi anak-anak berkebutuhan khusus yang berkemampuan intelektual di bawah rata-rata paling banyak diantara jenis-jenis kelainan yang lain.

Kebijakan yang diambil berhubungan dengan pendidikan inklusi tidak serta merta dilakukan dengan begitu saja tetapi melalui pertimbangan dan analisis yang mendalam baik itu analisis intern maupun analisis ekstern. Analisis yang dilakukan berupa : Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki oleh SD Al Irsyad 01 dan 02 berupa layanan program *Butterfly Learning Centre* yang dikelola dengan maksimal. Kelemahan (*Weakness*) yang ada berupa jarak yang memisahkan kedua sekolah, sedangkan pusat layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus berada di SD Al Irsyad 02, sehingga waktu untuk kegiatan intervensi menjadi sedikit bermasalah bagi peserta didik inklusi. Peluang (*Opportunity*) yang ada dimanfaatkan dengan baik dengan cara mengikut pelatihan seminar dan diklat tentang inklusi. Tantangan (*Treats*) tidak semua program berjalan dengan baik, ada saja tantangan yang dihadapi seperti keinginan wali peserta didik agar putranya disamakan saja dengan peserta didik lainnya.



Kebijakan yang diambil oleh lembaga pendidikan berupa penerimaan peserta didik baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Untuk tahap awal sesuai dengan kesiapan sekolah dan agar pengelolaan kelas lebih optimal, seyogyanya di setiap kelas inklusi dibatasi tidak lebih dari 2 (dua) jenis kekhususan, dan jumlah keduanya tidak lebih dari 5 (lima) peserta didik.<sup>9</sup> Pengelolaan peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan kriteria-kriteia yang telah ditentukan. Kriteria *pertama* adalah kriteria acuan patokan, yaitu suatu penerimaan peserta didik baru didasarkan atas patokan yang telah ditentukan sebelumnya. *Kedua* kriteria norma, yaitu penerimaan peserta didik baru didasarkan pada prestasi peserta didik baru. Yang *ketiga* adalah kriteria daya tampung sekolah, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung untuk peserta didik baru.<sup>10</sup>

Perlu adanya kebijakan yang dilakukan yaitu dengan dikembangkannya pengelolaan pendidikan terpadu ( inklusi ) yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta kebutuhan pendidikan bagi anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Selama ini pendidikan terpadu dilaksanakan bagi anak berkebutuhan khusus, namun belum dilaksanakan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Agar pendidikan secara terpadu ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan

---

<sup>9</sup> *Pedoman Manajemen sekolah Inklusif Pendidikan Dasar* ( Direktorat Pembinaan sekolah Luar Biasa, Dirjen Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional 2008) hlm 7

<sup>10</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta didik Berbasis Sekolah* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm 45

oleh lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan yang baik supaya tujuan dari pendidikan inklusi dapat diraih.

Dalam menyusun kebijakan tentang pendidikan inklusi tentunya membutuhkan suatu perencanaan yang matang mulai dari penyusunan tahapan-tahapan kebijakan yang berisikan formulasi kebijakan yang memuat tentang penyusunan agenda dan adopsi kebijakan yang sesuai dan dapat diterapkan, kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut serta mengevaluasi kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan. Kemudian pendekatan apa yang dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik serta fungsi dari kebijakan tersebut dapat terealisasikan.

Ketertarikan penulis dengan SD Al Irsyad 01 dan 02 kabupaten Cilacap sebagai bagian dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusi karena sekolah tersebut sudah mampu memberikan layanan pendidikan secara baik. Tidak semua sekolah mampu menyelenggarakan dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Banyak sekolah yang sebenarnya terdapat peserta didik berkebutuhan khusus tetapi tidak tertangani dengan baik. Demikian pun di sekolah-sekolah yang sudah memperoleh surat rekomendasi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi, tetapi dalam kenyataannya hanya memberikan pendidikan yang al akadarnya saja kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Hal itu terjadi karena sumber daya yang dimiliki oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang kurang memadai.

Di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap juga terdapat beberapa karakteristik siswa yang berbeda-beda. Perbedaan itu karena faktor kecerdasan dan juga karena faktor kelainan fisik yang kurang sempurna. Sekolah mengambil kebijakan dengan menyelenggarakan program *Butterfly learning Centre (BLC)* sebagai upaya untuk mengoptimalkan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus

agar dapat berkembang dan mengikuti pelajaran sebagaimana siswa yang normal.<sup>11</sup>

Kebijakan yang diambil dengan program *Butterfly learning Centre* tidak dijalankan dengan asal-asalan tetapi dikelola dengan sungguh-sungguh dan profesional. Hal itu dapat dilakukan karena yang menangani program *Butterfly Learning Centre* berlatar belakang pendidikan psikologi. Sehingga mampu menangani peserta didik dengan pengetahuan yang benar.

Dalam menentukan kebijakan program *BLC* tentunya dimulai dengan membuat formulasi kebijakan yang tepat, kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata. Setelah dilaksanakan akan dilakukan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi sehingga ada perbaikan kearah yang lebih baik.

Dari latar belakang di atas secara khusus peneliti tertarik dengan kedua SD yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi. Sehingga peneliti ingin tahu bagaimana merumuskan kebijakan, bagaimana cara mengimplementasikan serta bagaimana kebijakan tersebut dievaluasi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan mengusung judul Kebijakan Lembaga Pendidikan Dalam Mengelola Pendidikan Inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kebijakan pendidikan inklusi. Dalam ruang lingkup kebijakan paling tidak ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain : tahapan-tahapan kebijakan yang berisikan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan pendidikan inklusi. Pendekatan yang dilakukan serta fungsi dari kebijakan tersebut.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Yudhi Pramidityo, S.Psi, menejer BLC Al Irsyad Cilacap pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 11.00 WIB

### C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, maka dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan formulasi kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang mengelola pendidikan inklusi ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan dalam mengelola pendidikan inklusi?
3. Bagaimana evaluasi kebijakan dalam pengelolaan pendidikan inklusi

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan dalam merumuskan kebijakan yang berisi tentang bagaimana proses menyusun formulasi kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, kemudian kebijakan itu dapat diimplementasikan dalam program yang tepat, kemudian kebijakan yang diimplementasikan oleh sekolah dievaluasi agar dapat diketahui apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

Disamping itu juga perlu adanya pemahaman mengenai pendekatan yang dilakukan serta fungsi dari kebijakan tersebut dilaksanakan oleh SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap

**IAIN PURWOKERTO**

### E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara lembaga pendidikan mengambil kebijakan dalam mengelola pendidikan inklusi pada sekolah dasar.
- b. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan gambaran dan pemikiran tentang bagaimana proses perumusan kebijakan, implementasi dan

evaluasi yang diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk mengelola pendidikan inklusi pada sekolah dasar.

- c. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi upaya peningkatan mutu dunia pendidikan khususnya pada pendidikan yang membutuhkan layanan khusus pada sekolah pengelola pendidikan inklusi.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi penyusun, untuk memperoleh inspirasi, persepsi dan kreatifitas dalam menggali dan mengekspresikan pengetahuan melalui penulisan ilmiah, memberi dorongan dan motivasi untuk belajar lebih banyak serta mendapatkan pengalaman yang intensif berkaitan dengan sumber daya manusia. Disamping itu untuk memberikan masukan kepada :

- a. Sekolah yang bersangkutan, sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan melalui kebijakan-kebijakan tentang pendidikan inklusi secara efektif.
- b. Guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam rangka memberikan pelayanan kepada peserta didik inklusi yang baik.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh serta memudahkan pembahasan persoalan dalam penelitian ini maka susunan dan sistematika pembahasan diuraikan pada masing-masing bab. Tesis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman tim penguji tesis, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama berisi uraian peneliti dari bagian pendahuluan sampai penutup yang tertuang dalam bab-bab sebagai satu kesatuan. Penelitian ini terdiri



dari enam bab yang masing-masing diperinci menjadi sub-sub bab yang sistematis yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

Pada bab pertama adalah pendahuluan. Dimana dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Dalam bab dua membahas dan menguraikan kajian teori tentang kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi. Dalam bab dua ini juga dipaparkan tentang penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

Selanjutnya dalam bab tiga membahas tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan, data dan sumber data/subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Sementara bab empat berisi tentang Paparan hasil penelitian, dalam pembahasan ini berisi profil setting penelitian dan temuan penelitian. pembahasan dari hasil penelitian yaitu tentang kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Adapun bab lima berisi tentang analisis kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap

Yang terakhir dalam bab enam berisi Penutup yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Terakhir adalah bagian akhir yang merupakan akhir dari tesis ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan tesis.

**IAIN PURWOKERTO**



## BAB II

### KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENTANG PENDIDIKAN INKLUSI

#### A. Kebijakan

##### 1. Pengertian kebijakan.

Pertama-tama kita perlu memahami konsep kebijakan yang sering digunakan secara luas. Menurut kamus Oxford dalam Nanang Fatah kebijakan berarti rencana kegiatan atau pernyataan tujuan-tujuan ideal.<sup>1</sup>

Kebijakan secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Pollis*” yang artinya kota (*city*). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu pada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.<sup>2</sup>

Menurut Gamage dan Pang dalam Syafaruddin kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama-sama dan memberikan kerangka kerja lagi bagi pelaksanaan program.<sup>3</sup>

Menurut Noeng Muhadjir (1993) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dipilih kebijakan setidaknya harus memenuhi empat butir yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam

---

<sup>1</sup> Nanang Fatah, *Analisis kebijakan Pendidikan* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) hlm 131

<sup>2</sup> H.A.Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hlm 31

<sup>3</sup> Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan* ( Jakarta: Rinaka Cipta, 2008 ) hlm 75

membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Carter V. Good (1959) menegaskan bahwa kebijakan merupakan suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan.<sup>5</sup>

Hough ( 1984 ) menegaskan bahwa kebijakan dapat menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan.<sup>6</sup>

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak.<sup>7</sup> Pedoman ini dapat amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam makna yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktifitas-aktifitas tertentu atau suatu rencana.

Kebijakan menurut Jenkins, *“policy is asset of interrelated decision...concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation”*.<sup>8</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>4</sup>.<http://www.kajianteor.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html> diakses 5 maret 2017

<sup>5</sup> Masngud dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia* ( Yogyakarta: Idea Press, 2010 ) hlm 15

<sup>6</sup> Mudjia Rahardjo, *Pemikiran kebijakan Pendidikan* ( Malang, UIN Maliki Pres, 2010 ) hlm 3

<sup>7</sup>Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm 247

<sup>8</sup> Arif rohman dan Teguh Wiyono, *Education Policy* ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010) hlm 2

Jenkins mengatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dengan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.

Menurut Solihin Abdul Wahab ( 1990 ) Kebijakan bermakna sebagai tindakan politik, atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau aktor terhadap suatu masalah.<sup>9</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy ( 1973 ) kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi.<sup>10</sup>

James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.<sup>11</sup>

Kebijakan menurut Tilaar dan Nugroho adalah fakta strategis dari pada fakta politis ataupun fakta teknis.<sup>12</sup> Sebagai fakta strategis kebijakan terangkum dalam preferensi-preferensi politis para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya dalam proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan tidak hanya bersifat positif tapi juga bersifat negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu atau menolak yang lain.

**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>9</sup> Yoyon Baktiar irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan* ( Jakarta: Rajawali Press, 2012 ) hlm 34

<sup>10</sup> Syafaruddin, *Efektifitas kebijaksanaan.....* hlm 76

<sup>11</sup> James E. Anderson, *Public policy Making* ( New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984 ) Cet.3, hlm 3

<sup>12</sup> H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm 185

Pendapat lain dikemukakan oleh Ladson-Billings & Tate ed yang menegaskan bahwa kebijakan selalu bersifat publik.<sup>13</sup>.Artinya selalu menyangkut kepentingan banyak orang atau masyarakat luas.

Haner ( 1976 ) menjelaskan bahwa kebijakan adalah ungkapan verbal atau tertulis dan tegas dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pimpinan manajerial sebagai garis besar dan batas-batas pemikiran tindakan dari suatu organisasi.<sup>14</sup>

Sementara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mendefinisikan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan keinginan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada beberapa pendapat di atas mengenai kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau perbuatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

## 2. Tingkat dan jenis kebijakan

### a. Tingkat kebijakan.

Tingkat-tingkat kebijakan dalam hal ini menunjuk pada level kebijakan ini dirumuskan dan dilaksanakan. Tingkat-tingkat di sini juga menunjukan pada cakupan, tingkat pelaksanaan dan yang terlibat di dalamnya. Ada empat tingkat kebijakan yaitu :

- 1) Tingkat kebijakan nasional (*national policy level*).

---

<sup>13</sup> Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan* (Bandung: PT Rosda Karya, 2012) hlm 10

<sup>14</sup> Syafaruddin, *Efektifitas kebijaksanaan.....*hlm 77

<sup>15</sup> Agustinus Hermanio, *Kepemimpinan pendidikan .....* hlm 249

Yang memiliki level dalam kebijakan nasional adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tingkat kebijakan yang dimiliki oleh level ini adalah kebijakan administratif.

2) Tingkat kebijakan umum (*general policy level*).

Tingkatan kebijakan umum disebut kebijakan eksekutif. Yang termasuk dalam kebijakan eksekutif adalah undang-undang yang dibuat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengoperasikan undang-undang serta Keputusan Presiden (kepres) dan Instruksi Presiden (inpres).

3) Tingkat kebijakan khusus (*special policy level*).

Tingkat kebijakan ini dibuat oleh menteri dengan berdasarkan pada kebijakan yang berada di level atasnya. Kebijakan pada level ini dapat berupa : Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan Instruksi Menteri.

4) Tingkat kebijakan teknis (*technical policy level*).

Tingkat kebijakan teknis sering juga disebut dengan kebijakan operatif karena kebijakan yang dilaksanakan merupakan pedoman pelaksanaan. Produk dari level ini dapat berupa peraturan, keputusan, dan instruksi pimpinan lembaga. Yang menjadi pelaksana pada level ini adalah Gubernur, Kakanwil, Bupati, Kandep di masing-masing bidang, melaksanakan kebijakan sesuai dengan konsisional dan situasional daerahnya.<sup>16</sup>

Terkait dengan penelitian yang dilakukan di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap mengenai kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi maka yang menjadi objek tentang kebijakan hanya

---

<sup>16</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm 24



berada pada level atau tingkat kebijakan dalam lingkup institusi saja yaitu SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

b. Jenis-jenis Kebijakan

Terdapat banyak jenis kebijakan, Anderson (1979) mengemukakan beberapa jenis kebijakan sebagai berikut :<sup>17</sup>

1) *Substantive policies.*

Yang dimaksud dengan substantive polices adalah materi, isi, atau subject matter kebijakan, seperti kebijakan dalam hal pendidikan, perdagangan, hukum dan perburuhan.

2) *Procedural policies.*

Yang dimaksud dengan procedural polices di sini adalah menyangkut siapa, kelompok mana, dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

3) *Distributive policies.*

Kebijakan ini memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah atau sekelompok masyarakat di berbagai bidang, misalnya di dunia pendidikan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mengambil program studi langka dan bagi siswa yang berprestasi tinggi.

4) *Redistributive policies*

Pada jenis kebijakan ini merupakan kebijakan yang arahnya adalah memindahkan hak, kepemilikan, kepunyaan yang ada pada masyarakat. Contohnya adalah penggolongan biaya pendidikan bagi siswa mampu dan siswa miskin.

5) *Regulatory policies.*

Kebijakan jenis ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan atas tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang.

---

<sup>17</sup> Ali Imron, *kebijaksanaan pendidikan*.....hlm 75



Contoh pembatasan terhadap penjualan obat-obatan tertentu, pembatasan kecepatan berkendara dll.

6) *Self regulatory policies.*

Jenis kebijakan ini hampir sama dengan regulatory policies, hanya saja kebijakan ini didukung oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu seperti surat izin kerja, surat izin belajar bagi warga Negara yang akan belajar keluar negeri dsb.

7) *Material policies.*

Yang dimaksud dengan material policies adalah kebijakan mengenai penyediaan sumber-sumber material kepada penerimanya, dengan mengenakan beban atau kerugian kepada yang mengalokasikannya. Sebagai contoh pemberlakuan upah minimum kepada perusahaan bagi para pekerja.

8) *Symbolic policies.*

Pada jenis kebijakan ini umumnya tidak memaksa kepada khalayak umum, karena dilaksanakan atau tidaknya kebijakan tersebut tidak selalu berdampak besar bagi masyarakat. Contohnya adalah larangan menginjak rumput di taman kota.

9) *Collective good policies.*

Kebijakan ini merupakan kebijakan tentang penyediaan barang dan layanan untuk memenuhi kepentingan orang banyak. Contoh pada kebijakan ini adalah program wajib belajar tingkat sekolah dasar.

10) *Private good policies.*

Merupakan kebijakan penyediaan kebutuhan tertentu bagi masyarakat yang membutuhkan tetapi masyarakat tersebut harus menyediakan biaya untuk mendapatkan layanan tersebut. Contoh jika orang tua menginginkan pendidikan sesuai dengan jenis dan

murtunya maka ia harus menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan tersebut.

11) *Liberal policies.*

Kebijakan ini menuntut kepada pemerintah supaya mengadakan perubahan-perubahan. Perubahan tersebut mengarah pada pengurangan ketidak merataan hidup masyarakat. Wujud dari kebijakan liberal ini adalah mengadakan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan pada aturan yang ada serta upaya peningkatannya.

12) *Concervative policies.*

Kebijakan konservatif merupakan kebalikan dari kebijakan liberal. Di mana kebijakan liberal menuntut adanya perubahan-perubahan, maka sebaliknya kebijakan konservatif justru mempertahankan apa yang sudah ada.

3. Tahapan-Tahapan Kebijakan

Ada tiga proses tahapan kebijakan sebagaimana disampaikan oleh Putt dan Springer.<sup>18</sup> Yaitu : formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga proses kebijakan tersebut diuraikan agar secara holistik makna kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai suatu proses manajemen.

a. Formulasi Kebijakan

Pembuatan kebijakan dalam pemerintah termasuk aktivitas politik. Dalam konteks ini aktifitas politis dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Aktifitas politis itu berisikan serangkaian tahap yang saling tergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

---

<sup>18</sup> Syararuddin, *Efektifitas kebijakan*.....hlm 81

Proses kebijakan berangkat dari identifikasi dan perumusan masalah. Willian N Dunn menegaskan, perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang memersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.

Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk dapat melakukan tindakan tertentu. Sebagaimana disampaikan oleh Barbara Nelson dalam Budi Winarno bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.<sup>19</sup>

Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.<sup>20</sup>

Rumusan kebijakan yang baik harus memenuhi kriteria berikut. *Pertama*, rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. *Kedua*, rumusan kebijakan pendidikan dapat dipergunakan ketika menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang.<sup>21</sup>

Tahapan dalam perumusan kebijakan :

- 1) Perumusan masalah ( *Defining Problem* ).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Budi winarno, *Kebijakan Publik, teori, proses, dan studi kasus*, ( Yogyakarta: CAPS, 2012) hlm 83

<sup>20</sup> Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian*..... hlm 85

<sup>21</sup> Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*.....hlm 108

<sup>22</sup> Budi Winarno, *Kebijakan publik*.....hlm 123

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.

2) Agenda kebijakan.

Tidak semua masalah masuk ke agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang akhirnya masuk ke agenda kebijakan. Salah satu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

3) Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.

Setelah masalah-masalah didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan pilihan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

4) Penetapan kebijakan.

Salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan. Maka tahap akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai ketetapan hukum yang mengikat.

Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan sebagaimana disampaikan oleh William N. Dunn digambarkan sebagai berikut : <sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Syafaruddin, *Efektifitas kebijakan Pendidikan.....*hlm 81

Tabel 2.1  
Proses Kebijakan Menurut William N Dunn

Fase	Karakteristik	Ilustrasi
Penyusunan agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama	Legislator Negara dan konsepsornya menyiapkan rancangan undang undang dan mengirimkan ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih
Formulasi kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan pengadilan, dan tindakan legislatif	Peradilan Negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung biasa terhadap perempuan dan minoritas.
Adopsi kebijakan	Alternatif kebijakan yang di adopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan	Dalam keputusan Mahkamah agung pada kasus Roe V Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi
Implementasi kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru

	yang memobilisasikan sumber daya finansial manusia	tentang kenaikan pajak kepada rumah sakit yang tidak memiliki status pengecualian pajak
Penilaian kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintah akan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan	Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi

Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen adalah berada dalam kerangka organizing-leading controlling. Dengan demikian maka apabila suatu kebijakan telah dibuat maka tugas penting selanjutnya adalah mengorganisasikan dan melaksanakan untuk kebijakan tersebut.

## IAIN PURWOKERTO

Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan. Adapun isi kebijakan mencakup :

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang dihasilkan.
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan.
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan.
- 5) Siapa pelaksana program.



6) Sumber daya yang dikerahkan.

Dalam konteks implementasinya, maka kebijakan berisikan :

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.
- 4) Formulasi kebijakan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk bidang keputusan dan alternatif keperluan.

Unsur-unsur yang mempengaruhi formulasi kebijakan antara lain :<sup>24</sup>

- 1) Lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan pendidikan adalah segala hal yang berada di luar kebijakan pendidikan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Pengaruh tersebut dapat besar, kecil, langsung, dan tidak langsung.
- 2) Kondisi sumber daya alam. Kondisi sumber daya alam dapat berpengaruh terhadap kebijakan lingkungan pendidikan karena kebijakan pendidikan tidak lepas dari ada tidaknya, cukup-tidaknya, melimpah atau kurangnya sumber daya alam yang menopangnya.
- 3) Iklim. Sebuah Negara yang semua iklimnya dapat dipergunakan untuk bekerja, tentu akan merumuskan kebijakan pendidikan tanpa banyak pertimbangan iklim.
- 4) Demografi atau kependudukan adalah faktor yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pendidikan.
- 5) Struktur sosial masyarakat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan.

---

<sup>24</sup> Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*.....hlm 108

Dalam formulasi kebijakan ini ada beberapa model yang relevan dengan proses kebijakan antara lain :

1. Model James E. Anderson dkk.<sup>25</sup>

Tahapan kebijakan menurut James E. Anderson terdiri dari lima tahapan yaitu:

- a. Tahap pertama agenda kebijakan terkait dengan masalah-masalah yang serius tentang suatu kebijakan
- b. Tahap kedua adalah perumusan kebijakan, perkembangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tindakan yang dapat diterima untuk berhadapan dengan masalah
- c. Tahap ketiga adalah adopsi masalah kebijakan, yaitu perkembangan dukungan sehingga kebijakan dapat dilegitimasi
- d. Tahap keempat adalah implementasi kebijakan, merupakan aplikasi kebijakan yang dilakukan oleh mekanisme administrasi pemerintah dalam menghadapi masalah
- e. Tahap kelima adalah evaluasi kebijakan, dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan dapat berlansung secara efektif atau belum.

Tabel 2.2

Kebijakan menurut James E. Anderson

<i>Those</i>	<i>The</i>	<i>Develop</i>	<i>Application</i>	<i>Effort by</i>
<i>problem,</i>	<i>develop</i>	<i>ment of</i>	<i>of the policy</i>	<i>the govern</i>
<i>among many,</i>	<i>ment of</i>	<i>support for</i>	<i>by the govern</i>	<i>ment to</i>
<i>wichreceive</i>	<i>pertinent</i>	<i>a specific</i>	<i>ment's</i>	<i>determine</i>
<i>the serious</i>	<i>and</i>	<i>proposal so</i>	<i>administra</i>	<i>wheter the</i>
<i>attention of</i>	<i>acceptable</i>	<i>that policy</i>	<i>tive</i>	<i>policy was</i>
<i>public officer</i>	<i>proposal</i>	<i>can be</i>	<i>machinery to</i>	<i>effective</i>
	<i>courses of</i>	<i>legitimizd</i>	<i>problem</i>	<i>and why,</i>

<sup>25</sup> H.A. Tilaar, *Kebijakan Pendidikan*..... hlm 186

	<i>action for dealing with problem</i>	<i>or authorized</i>		<i>and why not</i>
<i>Stage 1 : policy agenda</i>	<i>Stage 2 : policy formula tion</i>	<i>Stage 3 : policy adaption</i>	<i>Stage 4 : policy implement ation</i>	<i>Satage 5 : policy evaluation</i>

## 2. Model GROW.

Model GROW (atau proses) adalah metode sederhana untuk penetapan tujuan dan pemecahan masalah . Ini dikembangkan di Inggris dan digunakan secara ekstensif dalam pembinaan perusahaan di akhir tahun 1980an dan 1990an.<sup>26</sup>

Ada banyak klaim untuk penulis model GROW sebagai cara untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah. Meskipun tidak ada orang yang dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai penggagasnya, Graham Alexander, Alan Fine , dan Sir John Whitmore semuanya memberikan kontribusi yang signifikan.

## IAIN PURWOKERTO

Tahapan Proses Dari GROW.

GROW adalah kependekan dari **Goals Reality Options Way**. Ada beberapa versi yang berbeda dari model GROW. Versi disini menyajikan ‘ O ‘ dalam dua arti yaitu Obstacles dan Options. **Goals (Tujuan)** Ini adalah sasaran, dimana tujuan yg ingin dicapai. Tujuan harus didefinisikan sedemikian rupa sehingga sangat jelas seperti apa yang ingin dicapai. **Reality**

<sup>26</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/GROW\\_model](https://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model) diakses pada 28 Agustus 2017

**(Realitas)** suatu penilaian kondisi saat ini dimana sekarang sedang berada. Kemajuan apa saja yang sudah dicapai dalam mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Apa saja isu-isunya, tantangan yang ada, seberapa jauh lagi dari tujuan yang diinginkan sebelumnya. **Obstacles (Rintang)** adalah mencari hambatan apa saja yang telah menghentikan tujuan yang diinginkan sebelumnya. Dimana jika tidak ada Obstacles (hambatan) tersebut seharusnya tujuan yang diinginkan sebelumnya sudah bisa tercapai. **Options (Pilihan)** Jika Obstacles (hambatan) telah diidentifikasi, perlu dibuat cara-cara (Options) untuk menemukan jalan yang bisa membuat kemajuan. **Way Forward (Cara maju)** Dengan mempunyai Options atau pilihan-pilihan cara tersebut maka sesuai dengan Reality yang ada, Options perlu dikonversi untuk menjadi langkah-langkah nyata yang akan digunakan untuk mencapai Goals.

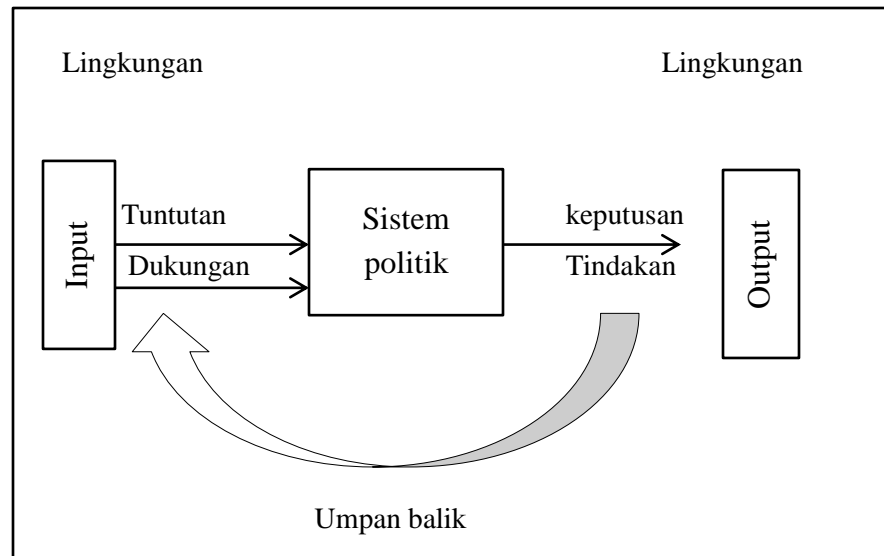
### 3. Model Sistem

Model sistem dikembangkan oleh Davis Easton yang menganalogikan dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan dengan teori sistem mengadaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem politik. Sebagaimana dalam ilmu politik yang terdiri dari *input*, *throughput*, dan *output*, seperti yang digambarkan sebagai berikut :<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> H.A Tilaar, *Kebijakan Pendidikan* .....hlm 208

Gambar 2.1.  
Model Sistem



Dari gambar diatas apat dipahami bahwa proses formulasi kebijakan berada dalam sistem politik dengan mengandalkan kepada masukan (input) yang terdiri dari tuntutan dan dukungan. Input merupakan permintaan dan dukungan seperti yang dijalankan dalam suatu sistem politik. Proses dimaksudkan sebagai keseluruhan aktifitas dalam sebuah sistem. Output merupakan keputusan dan tindakan proses politik dari sistem politik yang ada dalam lingkungan seluruh konteksnya.

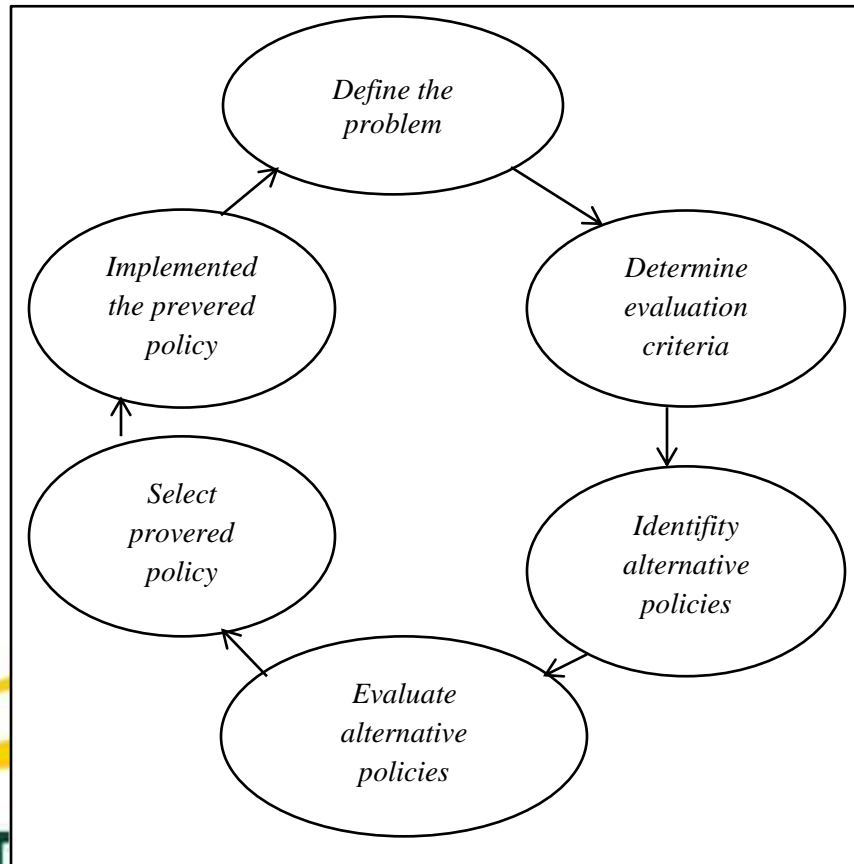
#### 4. Model Carl V. Paston dan Davis S. Sawicki

Carl V. Paston menggambarkan bahwa poses kebijakan sebagai urutannya adalah dimulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif kebijakan, mengevaluasi kebijakan kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berikut gambar model kebijakan yang dimaksudkan oleh Carl V.Paton.<sup>28</sup>

Gambar 2.2.

Model Carl V.Paston dan Davids S. Sawicki



##### 5. Model Thomas R. Dye

Proses kebijakan menurut Thomas R.Dye meliputi enam langkah yaitu :<sup>29</sup>

- a) Melakukan identifikasi masalah kebijakan.
- b) Menetapkan agenda kebijakan.
- c) Melakukan proses perumusan masalah.

<sup>28</sup> H.A Tilaar, *Kebijakan Pendidikan*.....hlm 188

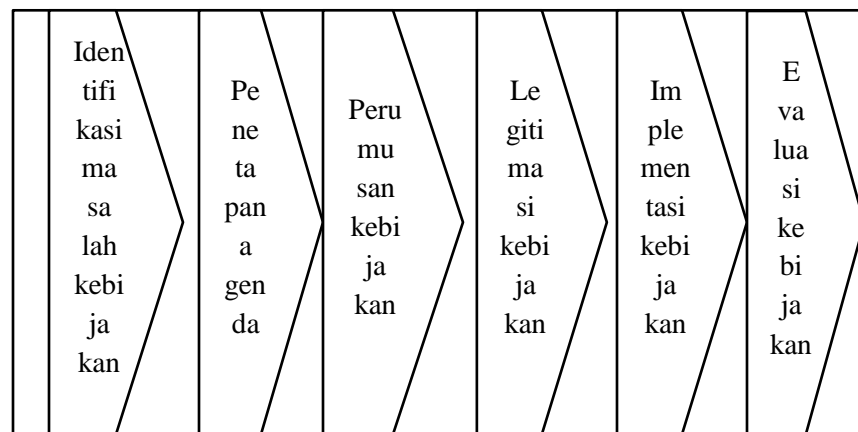
<sup>29</sup> H.A Tilaar, *Kebijakan Pendidikan* .....hlm 189



- d) Menetapkan dasar hukum pelaksanaan kebijakan.
- e) Mengimplementasikan kebijakan.
- f) Mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

Gambar 2.3

Kebijakan Model Thomas R.Dye



#### b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu kebijakan harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi lembaga sampai pada tingkat paling bawah sehingga diharapkan kebijakan yang sudah terbentuk tidak sia-sia dan berjalan dengan baik. Dalam tahap implementasi kebijakan berbagai kepentingan akan bersaing yang pada akhirnya akan bermunculan para pelaksana dan yang mendukung kebijakan tersebut dan para pelaksana yang menolak kebijakan tersebut.

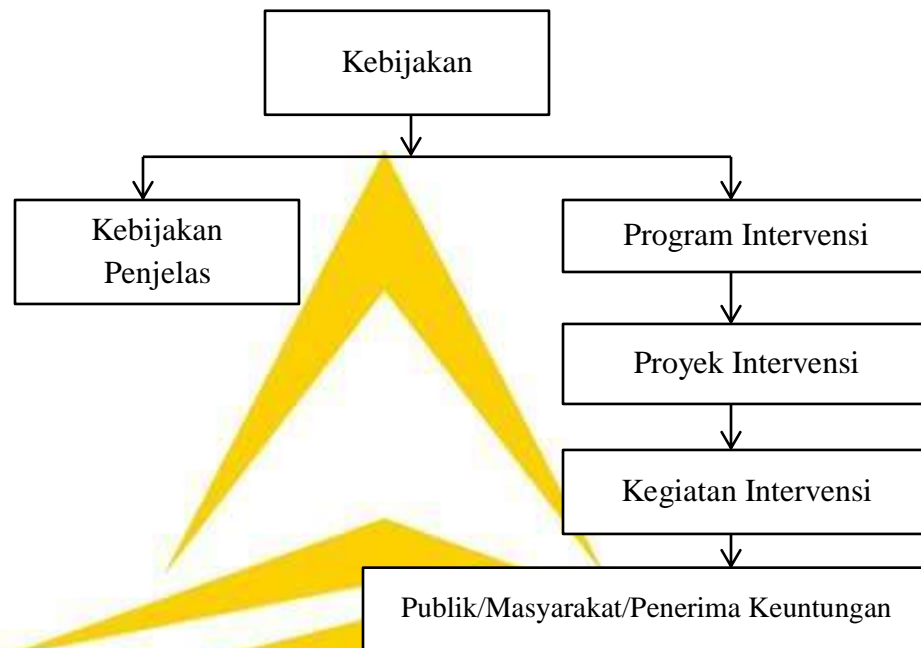
Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu : langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau dapat melalui kebijakan derivat/

turunan secara umum digambarkan oleh Dwijowijoyo sebagai berikut

.<sup>30</sup>

Gambar 2.4.

Implementasi Kebijakan oleh Dwijowijoyo



Contoh dari proses implemenasti kebijakan dapat berupa kebijakan dalam bentuk undang-undang, maka memerlukan adanya kebijakan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan daerah (Perda). Perda merupakan peraturan penjelas atau sering disebut dengan peraturan pelaksanaan. Implementasi kebijakan memerlukan banyak keputusan dan tindakan seperti: menjamin dan menguatkan berbagai arahan, dan peraturan, mengeluarkan dan membuat penemuan, rekrutmen, dan pembinaan personal, menghargai dan membuat kontrak, menciptakan unit organisai baru supervisi staf,

<sup>30</sup> Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan*..... hlm 86

membuat anggaran yang diperlukan dan menciptakan bentuk analisis laporan.

Dalam implementasi kebijakan ini ada beberapa model kebijakan yang sesuai seperti :

1) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn.<sup>31</sup>

Model yang diperkenalkan oleh Donald V. Metter dan Carl Van Horn merupakan model implementasi klasik. Teori ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan antara lain:

- a. Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b. Kartakteristik dari agen pelaksanal/implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- d. Kecenderungan dari pelaksana

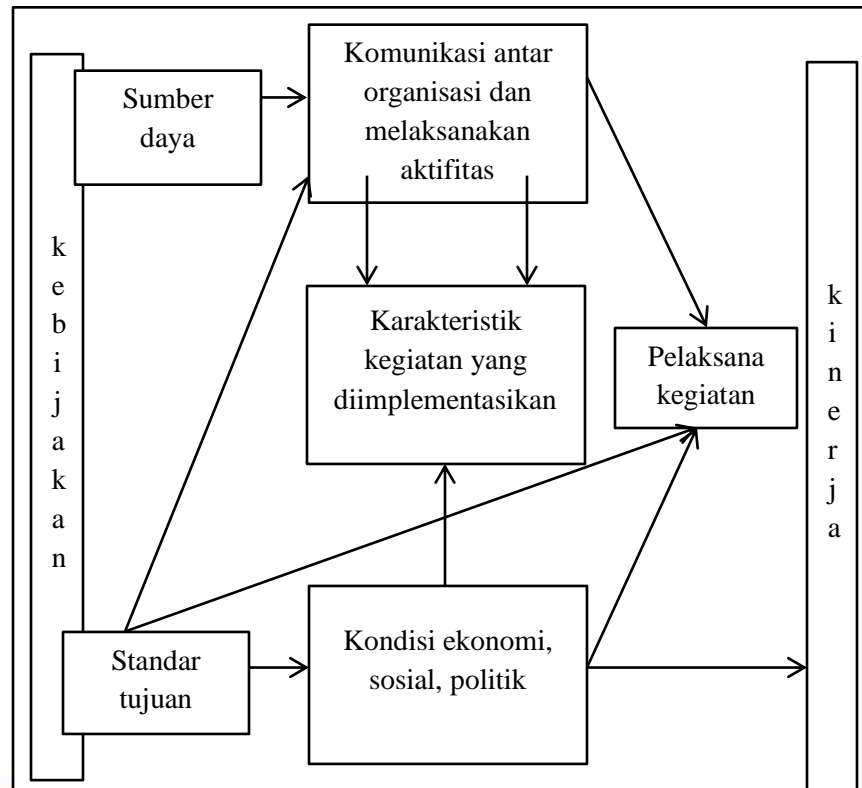


**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>31</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Di negara-negara berkembang* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2015 ) hlm 219

Gambar 2.5.  
Model Van Metter dan Van Horm.



## 2. Model Mazmanian dan Sabatier.

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa implementasi merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Teori yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier sering disebut dengan teori kerangka analisis implementasi. Mazmanian dan Sabatier mengklafikasikan proses implementasi kebijakan menjadi tiga fariabel yaitu :<sup>32</sup>

- a) Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan dengan masalah teori dan teknis

<sup>32</sup> H.A. Tilaar, *kebijakan pendidikan* .....hlm 215

pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti yang dikehendaki.

- b) Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar.
- c) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu, pemahaman dari lembaga dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan hasil nyata, dan revisi atas kebijakan yang dibuat.

### 3. Model Grindle

Model kebijakan ini dilakukan oleh Merilee S. Grindle. Dalam teorinya Grindle menjelaskan bahwa isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup :<sup>33</sup>

- a) Kepentingan yang terpengaruhi kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuat kebijakan.
- e) Siapa yang menjadi pelaksana program.

---

<sup>33</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik*.....hlm 271

- f) Sumber daya yang dikerahkan.
- g) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- h) Karakteristik lembaga dan penguasa
- i) Kepatuhan dan daya tanggap.

#### 4. Model Hoodwood dan Gun

Menurut pakar ini, untuk melakukan implementai kebijakan diperlukan beberapa syarat, Yaitu :<sup>34</sup>

- a) Syarat yang pertama berkaitan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga tidak menimbulkan masalah.
- b) Apakah untuk melaksanakan kebijakan tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
- c) Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e) Seberapa banyak hubungan kausalita yang terjadi.
- f) Seberapa lemah hubungan di antara variabel.
- g) Kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan kebijakan.
- h) Apakah pekerjaan telah diperinci dan ditetapkan dalam susunan yang benar.
- i) Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j) Badan pengimplementasi dapat meminta kepatuhan total.

Implementasi kebijakan bermakna pengembangan kriteria khusus dalam praktek bagi pembuat keputusan yang mencapai maksud kebijakan. Dalam implementasi kebijakan makna yang perlu

---

<sup>34</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik*.....hlm 220



diperhatikan adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan implemetasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, antara lain :<sup>35</sup>

- a) Kompleksitas kebijakan. Semakin kompleks kebijakan maka semakin kompleks pula kegiatan yang dibuat dan semakin lama implementasinya.
- b) Jika rumusan masalah kebijakan dan alternatif pemecahan masalah yang diajukan tidak jelas maka akan menyebabkan pelaksana ragu-ragu dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
- c) Faktor sumber potensial baik segi manusia maupun nonmanusia yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan.
- d) Keahlian pelaksana kebijakan. Semakin ahli pelaksana kebijakan, maka semakin baik implementasinya.
- e) Dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplemtasikan
- f) Faktor efektifitas dan efisiensi birokrasi.

Menurut Jauch dan Glueck (1999), ada beberapa proposisi dalam implementasi kebijakan sebagai berikut: <sup>36</sup>

- 1) Lembaga yang mempersiapkan pelaksanaan kebijakan dan rencana bagi pilihan strategis akan lebih efektif dari pada yang telah melakukan.
- 2) Lembaga yang memiliki kemampuan strategis, pengalaman dan kepribadian yang cocok dengan strategi akan lebih efektif.
- 3) Lembaga yang memiliki rencana pengembangan karir akan lebih efektif dari pada yang tidak memiliki.

---

<sup>35</sup> Ali Imron, *kebijaksanaan pendidikan*.....hlm 75

<sup>36</sup> Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan*..... hlm 93

- 4) Pemimpin yang melaksanakan konsep pengembangan organisasi akan lebih efektif melaksanakan strategi perubahan.

c. Evaluasi Kebijakan

Suatu kebijakan tidak boleh dibiarkan begitu saja setelah dilaksanakan. Begitu pelaksanaan kebijakan berlangsung, selanjutnya perlu diperiksa. Sebagai proses manajemen, pengawasan adalah keharusan sebagai proses pemantauan atau evaluasi kebijakan.

Evaluasi tidak dimaksudkan mencari kesalahan para pelaksana kebijakan, akan tetapi pesan utamanya adalah supaya kekurangan dan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan dapat diperbaiki sehingga pencapaian tujuan lebih maksimal. Lebih tepatnya evaluasi kebijakan semat-mata bersifat positif dan konstruktif.

Bingham dan Felbinger membagi evaluasi kebijakan menjadi empat, yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses dari implementasi dari suatu kebijakan.
- 2) Evaluasi dampak, yang menerima fokus pada hasil akhir dari suatu kebijakan.
- 3) Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan.
- 4) Meta-evaluasi, merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi kebijakan.

Putt dan Springer (1989) menjelaskan evaluasi adalah langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan dapat memberikan informasi kepada

---

<sup>37</sup> H.A.R Tilaar, *Kebijakan Pendidikan*.....hlm 229

stakeholders untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dari kebijakan tersebut.<sup>38</sup> Evaluasi juga memberikan pemaparan aktivitas implementasi kebijakan. Pada tingkat kompleksitas lebih besar, evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan yang dicapai sesuai dengan sasaran. Kemudian evaluasi kebijakan dapat memberikan pemahaman terhadap alasan keberhasilan atau kegagalan kebijakan serta dapat juga memberi saran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kebijakan menggunakan beberapa kriteria, yaitu :<sup>39</sup>

- 1) Efektifitas, berhubungan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan.
- 2) Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektifitas tertentu.
- 3) Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.
- 4) Pemerataan, erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan merujuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- 5) Responsivitas, erat kaitannya dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- 6) Ketepatan memiliki hubungan dengan rasionalitas substantif karena kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Tujuan evaluasi antara lain :<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan*..... hlm 88

<sup>39</sup> Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan* ..... hlm 234

- 1) Untuk menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi kebijakan. Dengan evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan.
- 5) Untuk mengetahui apakah ada penyimpangan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- 6) Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan yang akan datang sehingga lebih baik.

Tujuan evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu. Tanpa pengujian pelaksanaan hasil usaha, ada sedikit kemungkinan peningkatan program. Ada beberapa sasaran evaluasi kebijakan:

## IAIN PURWOKERTO

- 1) Menentukan seluruh kebijakan dan nilai kebijakan dalam mencapai maksud sasaran.
- 2) Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan komponen kebijakan.
- 3) Penerima program strategis yang merupakan kontribusi terbaik terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

---

<sup>40</sup> A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016) hlm 120

- 4) Penilaian efek samping yang tidak diharapkan atau akibat yang tidak diinginkan dari usaha kebijakan.

Fungsi evaluasi dalam analisis kebijakan memiliki beberapa fungsi, yaitu :<sup>41</sup>

- 1) Memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik
- 2) Memberikan sumbangan penting pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- 3) Memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

#### 4. Pendekatan Kebijakan

Secara teoritik, menurut Solihin Abdul Wahab dalam Arif Rohman mengemukakan bahwa kebijakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu memiliki empat pendekatan yaitu:<sup>42</sup>

- a) *Struktural Approach* merupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down*. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara terstruktur. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan pengawasan menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi.
- b) *Prosedural and managerial approach* merupakan pendekatan yang muncul dalam rangka memberikan koreksi terhadap pendekatan sebelumnya yang dianggap memiliki beberapa kelemahan. Dalam pendekatan prosedural dan manajerial ini dikembangkan dalam rangka

<sup>41</sup> Nanang Fatah, *Analisis kebijakan*.....hlm 247

<sup>42</sup> Arif Rohman dan Teguh Wiyono, *Education Policy*..... hlm 7

mensukseskan implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan prosedural dan manajerial ini tidak mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi pelaksana yang cocok dengan implementasi program, melainkan dengan upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan.

- c) *Behavioural approach* merupakan pendekatan yang ada dalam rangka memberikan koreksi terhadap pendekatan prosedural dan manajerial yang banyak memiliki kelemahan, antara lain adalah terlalu menekankan pada aturan-aturan dan teknis-teknis manajemen yang bersifat interpersonal. Disamping itu juga pendekatan prosedural dan manajerial harus menumbuhkan peranti teknologi yang canggih sehingga terkesan menjadi mahal. Dalam pendekatan perilaku ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai pelaksana, bukan pada organisasinya atau teknik menejemennya.
- d) *Political approach* adalah pendekatan yang lebih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan politik dalam proses implementasi kebijakan, memungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan. Proses implementasi kebijakan tidak bisa hanya dilakukan dengan komunikasi interpersonal sebagaimana dilakukan dalam pendekatan perilaku.

Sementara Linbloon dalam Syafaruddin mengemukakan tiga pendekatan yang sering digunakan oleh para manajer dalam praktik pengelolaan organisasi, yaitu :<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Syafaruddin, *Efektifitas kebijakan*.....hlm 79



- a. Pendekatan analisis, yaitu suatu proses pembuatan kebijakan yang didasarkan kepada pengambilan keputusan tentang masalah dan beberapa pilihan kebijakan alternatif atas dasar hasil analisis.
- b. Pendekatan politik, yaitu pembuatan kebijakan atas dasar pengambilan keputusan tentang pilihan kebijakan dengan pengaruh kekuasaan, tekanan dan kendali pihak lain.
- c. Pendekatan analisis dan politik, yaitu pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada pendekatan analisis dan politik.

#### 5. Fungsi kebijakan

Faktor yang menentukan perubahan dan pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi atau lembaga sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut dapat benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat sebenarnya dari kebijakan adalah berupa keputusan yang substansialnya adalah tujuan, prinsip, dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomani oleh pimpinan, staf, personal organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan adalah terlihat sebagai jumlah proses dari semua bagian dan berhubungan pada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input, proses, output, dan umpan balik dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Fungsi kebijakan dalam pendidikan sebagai berikut:

- a. Pedoman untuk bertindak. Hal ini mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan suatu acuan dalam implementasi program pendidikan serta sebagai tuntunan ke mana arah sistem pendidikan akan tertuju dan berjalan.

- b. Pembatas perilaku. Apabila dikaitkan dengan pendidikan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari norma serta aturan dalam setiap tindakan yang diaktualisasikan berkaitan dengan aktivitas pendidikan. Ini diperlukan untuk membatasi sikap yang tidak sesuai atau sejalan bahkan bertentangan dengan tujuan pendidikan.
- c. Bantuan bagi pengambil keputusan. Kebijakan pendidikan di sini adalah sebagai ujung tombak dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar setelah melalui serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan dan sesuai dengan tuntutan stakeholders yang berkepentingan di dunia pendidikan

Begitu pentingnya keberadaan kebijakan dalam suatu organisasi karena dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aktifitas strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain kebijakan merupakan garis-garis umum untuk bertindak bagi pengambil keputusan pada semua jenjang organisasi.<sup>44</sup>

## B. Lembaga Pendidikan

### 1. Pengertian lembaga pendidikan

Secara etimologi lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha.<sup>45</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa lembaga mengandung dua arti, yaitu: 1) pengertian secara fisik, materil, kongkrit, dan 2) pengertian secara non-fisik, non-materil, dan abstrak

Menurut KBBI,<sup>46</sup> kata lembaga ialah asal mula bentuk asli suatu badan lembaga keilmuan. Lembaga dalam bahasa Inggris disebut institute, yakni

<sup>44</sup> Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan*..... hlm 78

<sup>45</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), Cet ke.9, hlm. 277.

<sup>46</sup> <http://kbbi.web.id/lembaga> di akses 20-3- 2017

sarana atau organisasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Menurut Pius Partanto, M. Dahlan Al Barry lembaga adalah badan atau yayasan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya.<sup>47</sup>

Menurut Muhaimin lembaga pendidikan adalah suatu bentuk organisasi yang mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum sendiri.<sup>48</sup>

Secara terminologi, Amir Daiem mendefinisikan lembaga pendidikan dengan orang atau badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Rumusan definisi yang dikemukakan Amir Daiem ini memberikan penekanan pada sikap tanggung jawab seseorang terhadap peserta didik, sehingga dalam realisasinya merupakan suatu keharusan yang wajar bukan merupakan keterpaksaan. Definisi lain tentang lembaga pendidikan adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.<sup>49</sup>

## 2. Jenis-jenis lembaga pendidikan

### a. Lembaga pendidikan formal,<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *kamus ilmiah populer* (Surabaya: Arkola, 1994) hlm. 406

<sup>48</sup> Muhaimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1993) hlm. 231

<sup>49</sup> Ramayulis, *ilmu pendidikan*.....hlm 278

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. (Bandung: Citra Umbara)

Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur normal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK) dan lembaga pendidikan tinggi.

Sedangkan dalam sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa setiap warga Negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai tamat SMP. Lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah ;

- 1) Pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal.
- 2) Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga.
- 3) Memiliki administrasi dan manajemen yang jelas.
- 4) Adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 5) Memiliki kurikulum formal.
- 6) Adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran.
- 7) Adanya batasan lama studi.
- 8) Kepada peserta yang lulus diberikan ijazah.
- 9) Dapat meneruskan pada jenjang yang lebih tinggi.

Sedangkan lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan formal antara lain;

- 1) Taman Kanak-kanak (TK)
- 2) Raudatul Athfal (RA)
- 3) Sekolah Dasar (SD)
- 4) Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- 5) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- 6) Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- 7) Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 8) Madrasah Aliyah (MA)
- 9) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- 10) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
- 11) Perguruan Tinggi, meliputi; Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.

Dalam sistem pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai tamat SMP. Lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.

b. Lembaga pendidikan nonformal

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Lembaga pendidikan nonformal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga Negara yang tidak sempat mengikuti ataupun menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Pendidikan nonformal semakin berkembang, dengan bukti semakin dibutuhkannya keterampilan pada seseorang unrtuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Faktor pendorong perkembangan pendidikan nonformal, diantaranya:

- 1) Semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah.
- 2) Lapangan kerja, khususnya sektor swasta mengalami perkembangan cukup pesat dan lebih dibandingkan perkembangan sektor pemerintah.

Adapun program-program pendidikan nonformal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Pendidikan nonformal yang terjadi pada organisasi masyarakat



seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olah raga, dan pramuka. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Dengan kata lain, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudaan, pendidikan pembedayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya.

Adapun ciri-ciri pendidikan nonformal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat.
- 2) Guru adalah fasilitator yang diperlukan.
- 3) Tidak adanya pembatasan usia.
- 4) Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis.
- 5) Waktu pendidikan singkat dan padat materi.
- 6) Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah.
- 7) Pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja.

Sedangkan lembaga penyelenggaraan pendidikan nonformal antara lain;

- 1) Kelompok bermain (KB)
- 2) Taman penitipan anak (TPA)
- 3) Lembaga khusus
- 4) Sanggar
- 5) Lembaga pelatihan
- 6) Kelompok belajar
- 7) Pusat kegiatan belajar masyarakat
- 8) Majelis taklim
- 9) Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan



c. Lembaga pendidikan informal

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkungannya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama, karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak pondasi pengembangan-pengembangan berikutnya. Adanya istilah pendidikan utama juga dikarenakan adanya pengembangan tersebut.

Namun pendidikan informal, khususnya pendidikan keluarga memang belum ditangani seperti pada pendidikan formal, sehingga masuk akal jika sebagian besar keluarga tidak paham tentang cara mendidik anak-anak dengan benar.

Ciri-ciri pendidikan informal adalah ;

- 1) Pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu.
- 2) Guru adalah orang tua.
- 3) Tidak adanya manajemen yang jelas.

3. Peran lembaga pendidikan

Tugas pendidikan nasional tidaklah ringan dan memerlukan upaya seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 47 mengatakan tentang kemitraan masyarakat dalam ikut serta menyelenggarakan pendidikan nasional. Bahkan ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. ketentuan undang-undang ini mempunyai implikasi yang luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun SISDIKNAS. Di dalam keikutsertaan itu ada beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian yaitu: <sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> H.A.R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) hlm 82

- a. Status *kemitraan* dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berkedudukan sama dengan SISDIKNAS.
- b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempunyai ciri khas. Inilah yang disebut *jatidiri* dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan wahana yang benar-benar memenuhi elemen-elemen institusi secara sempurna, yang tidak terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Frank P. Besag dan Jack L. Nelson menyatakan elemen institusi sekolah terdiri atas tujuh macam, yaitu:<sup>52</sup>

- a. *Utility* (kegunaan dan fungsi). Suatu lembaga sekolah diharapkan memberi kontribusi terhadap tuntutan masyarakat yang ada, tuntutan kelembagaan sendiri dan aktor.
- b. *Actor* (pelaku). Actor berperan dalam pelaksanaan tujuan dan fungsi kelembagaan, sehingga aktor tersebut mempunyai status dalam institusi tempat ia berada.
- c. *Organisasi*. Organisasi dalam institusi tergambar dengan beberapa bentuk dan hubungan-hubungannya antar-aktor.
- d. *Share in society* (tersebar dalam masyarakat). Institusi memberikan seperangkat nilai, ide, dan sikap dominan dalam masyarakat, serta mempunyai hubungan-hubungan dengan institusi lain, baik terhadap sistem politik, ekonomi masyarakat, kebudayaan, pengetahuan, dan kepercayaan.
- e. *Sanction* (sanksi). Institusi memberikan penghargaan dan hukuman bagi aktor. Wewenang sanksi diperlakukan bila berhubungan dengan nilai-

---

<sup>52</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta:Kencana, 2008) hlm 242

nilai yang berlaku di masyarakat tempat institusi berada, dan sanksi dijatuhkan sesuai dengan ukurannya.

- f. *Ceremony* (upacara, ritus, dan simbol). Upacara dalam pendidikan dilakukan sebagai pengikat tentang status, pengetahuan, dan nilai seperti acara wisuda.
- g. *Resistance to change* (menentang perubahan). Institusi berorientasi terhadap status quo akan menimbulkan problem baru. Institusi didirikan untuk tujuan sosial tertentu, sehingga ia hidup dengan cara tertentu pula. Oleh karena itu, aktor sering khawatir melakukan kesalahan, walaupun hal-hal yang dilakukan mengandung inovasi positif. Perubahan yang terjadi akan menjadi sorotan masyarakat.

### C. Pendidikan Inklusi

#### 1. Pengertian Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi adalah suatu bentuk sistem pendidikan dimana peserta didik berkebutuhan khusus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan oleh karena itu strategi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik.<sup>53</sup>

Pendidikan inklusi merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang menggabungkan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal dalam proses kegiatan pembelajaran. UNESCO mengemukakan bahwa:

*inclusive education is a developmental approach seeking to address the learning needs of all children, youth and adults with a specific focus on those who are vulnerable to marginalization and exclusion.*<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan pembelajaran ( Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, direktorat jenderal manajemen pendidika dasar dan menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2009 ) hlm 1

<sup>54</sup> Lay Kekeh Martan, *Manajemen Pendidikan Inklusif* ( Jakarta: Dirjen Dikti, 2007 ) hlm 143

Dengan demikian, pengertian pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan yang berhubungan dengan pengembangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar seluruh anak tanpa ada perbedaan dan pemisahan. Pendidikan memberikan hak yang sama kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan potensinya.

Menurut O'Neil (1995) dalam M.Takdir Ilahi mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar anak-anak- berkecenderungan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.<sup>55</sup>

Sementara itu, dalam The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994), dinyatakan bahwa:

*Inclusive education means that : "... schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalised areas or groups."*<sup>56</sup>

Pendidikan inklusi berarti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak cacat/berkecenderungan dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari linguistik, etnik dan budaya minoritas dan anak-anak dari bidang kelemahan atau kelompok marginal lain.

Pendidikan inklusi menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 1, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang

<sup>55</sup> M. Takdir Ilahi, *pendidikan Inklusi*..... hlm 26

<sup>56</sup> [Http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA\\_E.PDF](http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF) The Salamanca Statement and Framework For Action On Special needs Educations (Printed In UNESCO, 1994 )hlm 12 ED-94/WS/18 ,

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Sementara menurut Staub dan Peck pendidikan inklusi adalah penempatan ALB (Anak Luar Biasa)/ anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh dikelas biasa/ reguler.<sup>57</sup>

Hal tersebut menjelaskan bahwa penempatan anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam kelas biasa/reguler adalah hal yang tepat agar ABK dapat berkembang beserta peserta didik pada umumnya.

Berbagai pendapat ahli di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan inklusi merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dengan peserta didik normal yang seusianya dalam kelas reguler. Dengan adanya pendidikan inklusi dapat memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik termasuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, tidak ada diskriminasi antara anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus dalam mengenyam pendidikan pada umumnya.

Sekolah inklusi merupakan sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, etnik, budaya atau kondisi lain mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Stainback bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif berbasis budaya Lokal* (Jakarta: Depdiknas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2005) hlm 18

<sup>58</sup> Tarmasyah, *Inklusif, Pendidikan Untuk Semua* ( Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan, 2007 ) hlm 82



Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa sekolah inklusi merupakan sekolah yang mengikutsertakan semua peserta didik di kelas yang sama tanpa memandang perbedaan termasuk anak berkebutuhan khusus, sehingga semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak, dalam hal ini anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses pembelajaran di kelas regular bersama dengan anak normal yang seusianya.

*Inclusive education means that you don't have to be the same to have similar opportunities: not identical opportunities, but the same kinds of opportunities measured in terms of comparable access to material resources (...), political participation, and senses of belonging to a broader as well as a localized community. Inclusion involves a subtle but profound shift from a more superficial multiculturalism of recognition. It means that the mainstream (...) is itself transformed. Instead of representing a single (...) destination, the mainstream is a site of openness, negotiation, experimentation, and the interrelation of alternative frameworks and mindsets.<sup>59</sup>*

Pendidikan inklusi berarti bahwa Anda tidak harus sama memiliki peluang yang sama: peluang tidak identik, tetapi jenis yang sama diukur dengan peluang yang sama dalam hal akses yang sebanding dengan sumber daya material, partisipasi politik, dan indera yang lebih luas serta masyarakat lokal. Inklusi melibatkan pergeseran secara halus namun mendalam dari multikulturalisme yang lebih dangkal. Ini berarti bahwa arus utama itu sendiri berubah. Dengan dalam mewakili tujuan yang tunggal, mainstream adalah bagian dari keterbukaan, negosiasi, eksperimentasi, dan interelasi dari kerangka kerja alternatif dan pola pikir yang digunakan. "

Pendidikan inklusi harus dipahami sebagai pendidikan bukan hanya untuk anak yang berkelainan, melainkan bagi semua anak tanpa membedakan status, gender, termasuk anak-anak yang "terkucilkan", ketidak

---

<sup>59</sup> G.Mac Ruairc E.Ottesen and Precey, *Leadership for Inclusive Education* ( Rotterdam, Sense Publisher, 2013) hlm 35



beruntungan dalam segala faktor, baik secara internal maupun eksternal. Perlu ada kesepahaman tentang pendidikan inklusi ini bagi semua kalangan.

Pendidikan inklusi harus didasarkan pada tiga dimensi, yaitu : *pertama*, integrasi fisik. Integrasi fisik mempunyai makna penempatan peserta didik yang sama dengan peserta didik yang bukan peserta didik berkebutuhan khusus. *Kedua*, integrasi sosial. Integrasi sosial yaitu relasi antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya yang lain serta dengan peserta didik yang lebih dewasa. *Ketiga*, integrasi pengajaran. Integrasi pengajaran mempunyai maksud bahwa peserta didik berkebutuhan khusus harus diajarkan materi yang sama sesuai dengan kurikulum sebagaimana diajarkan pada peserta didik yang tidak termasuk kategori berkebutuhan khusus.<sup>60</sup>

Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusi adalah kurikulum regular, kurikulum modifikasi dan kurikulum yang diindividualisasikan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara memodifikasi alokasi waktu atau isi/materi. Komponen pengembangan kurikulum di sekolah inklusi yang perlu di perhatikan meliputi : <sup>61</sup> (a) menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, (b) menyusun silabus, (c) menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam pelajaran. Bagi sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maka penyusunan silabus yang diantaranya memuat langkah-langkah pembelajaran dan indikator pencapaian harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sehingga setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan karakteristik dan potensi peserta didik.

---

<sup>60</sup> Marilyn Friend dan William D. Brusick, *Menuju Pendidikan Inklusi Panduan Praktis Untuk Mengajar* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) hlm 12

<sup>61</sup> *Pedoman manajemen pembelajaran sekolah inklusi tunarungu* ( Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, Direktorat jenderal manajemen dasar dan menengah kementerian Pendidikan Nasional, 2010 ) hlm 7

## 2. Landasan Pendidikan Inklusi

### a. Landasan Filosofi

Landasan filosofi pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah bangsa Indonesia. Falsafah ini memberi pengakuan terhadap adanya kebhinekaan yang ada. Sebagai landasan utama penyelenggaraan pendidikan inklusi secara filosofi adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang penuh dengan kebhinekaan. Filsafat ini sebagai wujud dari kebhinekaan manusia. Kebhinekaan vertikal dapat berupa perbedaan kecerdasan, kemampuan fisik, kemampuan pengendalian diri, kemampuan finansial, dan sebagainya. Sedangkan dimensi horizontal kebhinekaan dapat berupa perbedaan suku, bangsa, ras, bahasa, adat istiadat, agama, tempat tinggal, politik, budaya, dan sebagainya.

Bertolak dari landasan filosofi Bhineka Tunggal Ika inilah, maka kelainan dan kebakatan merupakan anugrah dari Allah SWT yang harus kita terima dengan lapang dan ikhlas. Seperti dalam semboyan bhineka tunggal ika yang memuat tentang adanya perbedaan dalam sendi kehidupan baik itu berupa suku, ras, budaya, agama, kepercayaan, bahasa, dan sebagainya. Anak-anak juga memiliki hal yang sama dalam hal perbedaan sehingga akan melahirkan adanya silih asuh, silih asih, dan silih asuh, serta toleransi dalam kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Perbedaan fisik tidak menghalangi seseorang untuk dapat bersosialisasi dan bergaul serta memperoleh pendidikan.

### b. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia dijamin oleh (1) Undang-undang dasar 1945 pasal 31, (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 32

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusi atau sekolah khusus, (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1986 pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan terpadu adalah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak cacat yang diselenggarakan secara bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut ( 5) Surat Edaran Dirjen nomor 380/C.C6/MN/2003 perihal pendidikan inklusi. SD Al Irsyad 01 dan SD Al Irsyad 02 kabupaten Cilacap dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap nomor 420/2877/03/33 tentang ijin operasional penyelenggaraan pendidikan inklusi ( anak berkebutuhan khusus ) pada sekolah dasar maka sekolah tersebut melaksanakan dan menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi.

c. Landasan Pedagogis.

Landasan pedagogis dari pendidikan inklusi terletak pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Landasan pedagogis bagi sekolah yang mengadakan dan menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional

#### d. Landasan Religius

Sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak dapat lepas dari konteks agama, karena pendidikan merupakan tangga utama dalam mengenal Tuhan. Dalam Islam Allah menjadikan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadaNya. Akan tetapi Allah tidak serta merta menjadikan manusia langsung beriman tetapi melalui proses seperti melalui pendidikan. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang landasan religius dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Faktor religuitas digunakan untuk penjelasan dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( ١٣ )

*Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.*<sup>63</sup>

Ayat di atas memberikan perintah kepada kita saling mengenal tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, ras, golongan, bangsa maupun agama.

Dalam surat Abasa Allah SWT juga memerintahkan untuk tidak membeda-bedakan dalam memberikan pengajaran.

<sup>63</sup> Al-Quran dan terjemahnya , Departemen Agama RI (Semarang, Asy-Syifa) hlm 412

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (۱) أَنْ جَاءَهُ آلُ ۖ أَعْمَى (۲) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ۖ  
 (۳) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ ۚ لَئِنْ رَأَى ۖ (۴) أُمَّا مِّنْ أَسْفَلَ بَئِي ۖ (۵) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى  
 (۶) وَمَا عَلَيكَ ۚ الْآلَا يَزَّكَّى (۷) وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى (۸) وَهُوَ يَخْشَى  
 (۹) فَأَنْتَ عَنِ ۚ هُوَ تَلَهَّى (۱۰)

Artinya : 1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. 2. Karena telah datang seorang buta kepadanya. 3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya(dari dosa). 4.atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. 5 Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. 6. maka kamu melayaninya. 7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). 8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran). 9. sedang ia takut kepada (Allah). 10. maka kamu mengabaikannya. <sup>64</sup>

### 3. Tujuan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi yang diselenggarakan oleh pemerintah mengacu pada pasal 2 permendiknas No 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi, menyatakan bahwa tujuan pendidikan inklusi adalah <sup>65</sup>

- a) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

<sup>64</sup> Al-Quran dan terjemahnya..... hlm 467

<sup>65</sup> Dedi kustiwan, *Pendidikan Inklusif & Upaya implementasinya* (Jakarta: Luxima, 2012)



- b) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

#### 4. Fungsi Pendidikan Inklusi

Dengan dilaksanakannya pendidikan inklusi diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi anak-anak yang memiliki kekhasan tertentu. Fungsi dari pendidikan inklusi adalah :<sup>66</sup>

- a) Untuk menjamin semua peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermutu di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b) Menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

#### 5. Manfaat Pendidikan Inklusi.

Pelaksanaan pendidikan mempunyai manfaat, yaitu :<sup>67</sup>

- a) Manfaat pendidikan inklusi bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus mereka memiliki rasa percaya diri dan memiliki kesempatan menyesuaikan diri serta memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan yang nyata pada lingkungan pada umumnya, sementara bagi temanya yang tidak berkebutuhan khusus dapat belajar mengenai keterbatasan dan kelebihan tertentu sehingga tumbuh rasa kepedulian terhadap mereka.
- b) Manfaat pendidikan inklusi bagi guru, adalah guru akan lebih tertantang untuk mengajar lebih baik dan dapat mengakomodasi semua peserta didik sehingga berupaya untuk meningkatkan wawasannya mengenai keberagaman karakteristik semua peserta didik.

---

<sup>66</sup> Dedi Kustiwan, *Manajemen Pendidikan Inklusi* (Jakarta, Luxima, 2016) hlm 16

<sup>67</sup> Dedi Kustiwan, *Pendidikan Inklusi*.....hlm 12



- c) Manfaat pendidikan inklusi bagi orang tua adalah orang tua merasa dihargai atau dapat meningkatkan penghargaan terhadap anak.
- d) Manfaat pendidikan inklusi bagi pemerintah adalah kebijakan terlaksana berlandaskan azas demokrasi, keadilan, dan tanpa diskriminasi karena dapat melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta kebijakan-kebijakan sebagai manifestasi dari keinginan dan harapan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e) Manfaat pendidikan inklusi bagi masyarakat adalah dapat memaksimalkan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- f) Manfaat pendidikan inklusi bagi sekolah yaitu pencitraan sekolah meningkat, sekolah lebih terbuka, ramah, tidak mendiskriminasi.

#### **D. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Hasil penelitian yang relevan merupakan kajian pustaka yang sangat penting untuk proses pembahasan tesis. Salain itu juga dapat digunakan untuk mengetahui kejujuran dalam penelitian. Dengan kata lain untuk menunjukan topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya dalam konteks yang sama serta menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Selama penelusuran yang dilakukan oleh penulis, kajian tentang kebijakan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi belum ada. Akan tetapi ada beberapa penelitian dan literatur yang masih terkait dengan kajian penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Pertama, *tesis* yang ditulis oleh Arian Sahidi (2016) yang berjudul "Implementasi Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi". Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arian Sahidi menunjukan bahwa hasil. (1). Bahwa kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: penjangkaran, pengalihangan, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantuan kemajuan pembelajaran. (2). Ada tiga model pengembangan

kurikulum yang digunakan pada sekolah penyelenggaraan inklusi yaitu : model kurikulum umum, model kurikulum umum dengan modifikasi dan model kurikulum yang diindividualkan. (3). Tenaga pendidik di sekolah umum penyelenggara pendidikan inklusi terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus. (4). Sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan sarana dan prasarananya yang ada di sekolah tersebut. Bila sekolah membutuhkan, sekolah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau dinas Pendidikan Propinsi untuk kebutuhan yang harus dipenuhi. (5). Kegiatan belajar mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dilakukan dengan cara : *integrated in the regular classroom, one to one teaching, smaal group, proram khusus dan terapi*.<sup>68</sup>

*Kedua*, tesis karya Nursehan Sugiharto yang berjudul “ Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya di Kabupaten Purwakarta” Hasil penelitian mendeskripsikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah berjalan cukup baik, di mana pemerintah daerah sudah sangat perhatian terhadap pendidikan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala, salah satunya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah pedesaan.<sup>69</sup>

*Ketiga*, tesis karya Yushmaniar Nur Aini yang berjudul “ Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Islam Trepadu An Nida Purwokerto dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati Klampok Banjarnegara” Hasil

---

<sup>68</sup> Arian Sahidi, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, *Tesis*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/6234/1/14770040.pdf>. Program studi Manajemen Pendidikan Islam, pascasarjana Institut Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ,2016. Diakses 10 April 2017

<sup>69</sup> Nursehan Sugiharto, kebijakan Pendidikan dan Implementasinya Di Kabupaten Purwakarta <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20314001-T%2031759-Kebijakan%20pendidikan...pdf>, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial,Universitan Indonesia, 2012 .Diakses 12 April 2017

penelitian bahwa manajemen pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Islam Terpadu An Nida Sokaraja Banyumas dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati Klampok Banjarnegara (1) perencanaan pendidikan inklusi dilakukan dengan menyusun tujuan pendidikan inklusi, mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus dan menyusun kegiatan untuk mencapai tujuan; (2) pengorganisasian dengan menunjuk salah seorang pendidik sebagai koordinator pendidikan inklusi dan menunjuk pendamping pendidikan inklusi; (3) pengarahan dilakukan dengan komunikasi dan kepemimpinan yang dilakukan setiap bulan; (4) pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pihak sekolah melaporkan hasil perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus pada wali peserta didik berkebutuhan khusus setiap tiga bulan sekali.<sup>70</sup>

*Keempat*, Penelitian, yang ditulis oleh Terry Irenawati dan Amran, dalam penelitiannya yang berjudul “ Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta” menyimpulkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada standar/kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tergantung dari kesediaan sekolah itu sendiri. Pendidikan inklusif bisa diselenggarakan kalau sekolah merasa siap dan mampu menyelenggarakannya. Dinas pendidikan atau pemerintah tidak pernah memaksakan suatu sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Peranan Dinas Pendidikan Propinsi DIY sendiri adalah sebagai mitra pembina pelaksanaan pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan mengusahakan guru khusus (guru pendidikan luar biasa) dan mendidik guru PLB agar siap diterjunkan ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, selain itu Dinas Pendidikan juga mendidik guru-guru umum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mereka lebih siap dalam mendidik siswa di kelas inklusif yang notabene mempunyai siswa heterogen. Kendala-kendala dalam

---

<sup>70</sup> Yusmaniar Nur Aini, *Manajemen pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Islam Terpadu An Nida Purwokerto dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati Klampok Banjarnegara*, tesis IAIN Purwokerto 2016

penyelenggaraan pendidikan inklusif ada empat. Pertama, kendala-kendala yang sifatnya praktis sebagai contoh kondisi geografis, sarana prasarana, dan kondisi keuangan. Kedua, yaitu psikologi baik dari masyarakat maupun guru. Ketiga, value yaitu penilaian/persepsinegatif masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keempat, power yaitu hambatan-hambatan dari penguasa, misalnya penguasa membuat kebijakan dimana sekolah hanya menerima siswa-siswa normal bukan siswa yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa. Upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu dengan melakukan sosialisasi ke berbagai daerah mengenai pendidikan inklusif agar semua orang mengetahui dan paham mengenai pendidikan inklusif, sehingga tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak yang memiliki kelainan (cacat).<sup>71</sup>

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Hery Kurnia Sulistiadi “ Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan layanan Pendidikan Inklusi di kabupaten Sidoarjo” Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jalannya implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Keberadaan sekolah-sekolah reguler yang melayani pendidikan inklusif mampu memberikan alternatif layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang difabilitas yang lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga telah memiliki sistem pendidikan inklusif yang mapan sebagai hasil dari pengalaman menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan pendidikan inklusif sejak tahun 2009. Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sangat berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini di

---

<sup>71</sup> Terry Irenawaty dan Amran, Implementasi kebijakan pendidikan Inklusi di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, <http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Dr.%20Aman,%20M..../B-7.PENELITIAN.pdf> Diakses 12 April 2017

Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dibuktikan melalui adanya deklarasi Sidoarjo sebagai Kabupaten yang pro-inklusif, serta diterimanya beberapa penghargaan terkait pencapaian Sidoarjo dalam bidang pendidikan khusus dan inklusif. Selain itu, komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo juga terlihat dari upaya mereka untuk secara maksimal memanfaatkan sumber daya yang ada di tengah segala keterbatasan, untuk dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan. Komitmen tersebut muncul sebagai wujud dari semangat untuk merealisasikan terselenggarakannya pendidikan inklusif sebagai salah satu upaya mewujudkan layanan pendidikan tanpa diskriminasi.<sup>72</sup>

*Keenam*, Jurnal yang ditulis oleh Yusraini “Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusi” dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autisme, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 32 dan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu dengan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan. Keberhasilan penyelenggaraan

---

<sup>72</sup> Hery Kurnia Sulistyadi” Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan layanan Pendidikan Inklusi di kabupaten Sidoarjo” [http:// journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp08e4cbae56full.pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp08e4cbae56full.pdf). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X, Volume 2, nomor Januari 2014. Diakses 12 april 2017



pendidikan inklusif akan bergantung pada pekerjaan guru dan orang tua secara bersama-sama.<sup>73</sup>

*Ketujuh*, Jurnal yang ditulis oleh Efika Nurrahmasari Lubis “Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi jenjang SD se Kota Yogyakarta ” dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta, yaitu dilihat dari struktur birokrasi 12 sekolah (70,59%) memiliki program kerja dengan baik. Dilihat dari komunikasi, 10 sekolah (58,82%) menyediakan ‘quota’ bagi ABK dengan cukup baik dan 9 sekolah (52,94%) memberikan layanan tes psikologi dengan cukup baik. Dilihat dari sumberdaya, sekolah melakukan modifikasi yang disesuaikan kebutuhan ABK dalam aspek kurikulum cukup baik (41,18%), pembelajaran dengan kriteria kurang (29,41%), dan penilaian dengan baik (64,71%). Lingkungan Kebijakan terdiri dari bantuan dari orang tua murid, masyarakat, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam bentuk perhatian, kerjasama, motivasi, finansial, dan sosialisasi. Karakteristik Masalah, terdiri dari aspek masalah yang terkait dengan sarana prasarana, bahan ajar/buku, kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi. Aspek kendala berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti Kepala Sekolah, Guru, GPK, dan Orang tua murid. (2) Faktor pendukung terdiri dari adanya dukungan warga sekolah dan pihak luar sekolah dalam menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Faktor penghambat diantaranya adalah Kepala Sekolah, Guru, dan Orang tua belum optimal dalam memahami konsep pendidikan inklusif, GPK kurang mencukupi, sarana prasarana dan bahan ajar/buku belum memadai, pemahaman modifikasi kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi belum optimal. (3)

---

<sup>73</sup> Yusraini “Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusi” <http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/viewFile/170/153>Media Akademika Volume 28, nomor 1, tahun 2013. Diakses 25 maret 2017



Pemanfaatan faktor pendukung dijadikan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Sedangkan solusi dari faktor penghambat yaitu dengan adanya rapat, sosialisasi, pelatihan, dan bantuan dari Dinas Pendidikan yang dapat memberikan perbaikan sekolah untuk selanjutnya.<sup>74</sup>

Melihat penelitian-penelitian dan literatur di atas, penelitian ini memiliki titik tekan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian *pertama* yang diungkap adalah tentang layanan pendidikan inklusi berkaitan dengan peserta didik inklusi, kurikulum yang dikembangkan. Pada penelitian *kedua* perhatian pemerintah pada pendidikan. Penelitian *ketiga* adanya perencanaan dalam penyusunan pendidikan inklusi, adanya coordinator pendidikan inklusi, pengarahan tiap bulan dan evaluasi tiap tiga bulan. *keempat* tidak ada kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Penelitian *kelima* komitmen pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Penelitian *keenam* keberhasilan pendidikan inklusi berhubungan dengan guru dan orang tua. Penelitian *ketujuh* adanya faktor penghambat dan faktor pendorong pendidikan inklusi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini lebih menekankan pada kebijakan yang diambil oleh lembaga pendidikan terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan kebijakan yang berisikan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan pendidikan inklusi. Pendekatan yang dilakukan serta fungsi dari kebijakan tersebut.

#### **E. Kerangka Berfikir.**

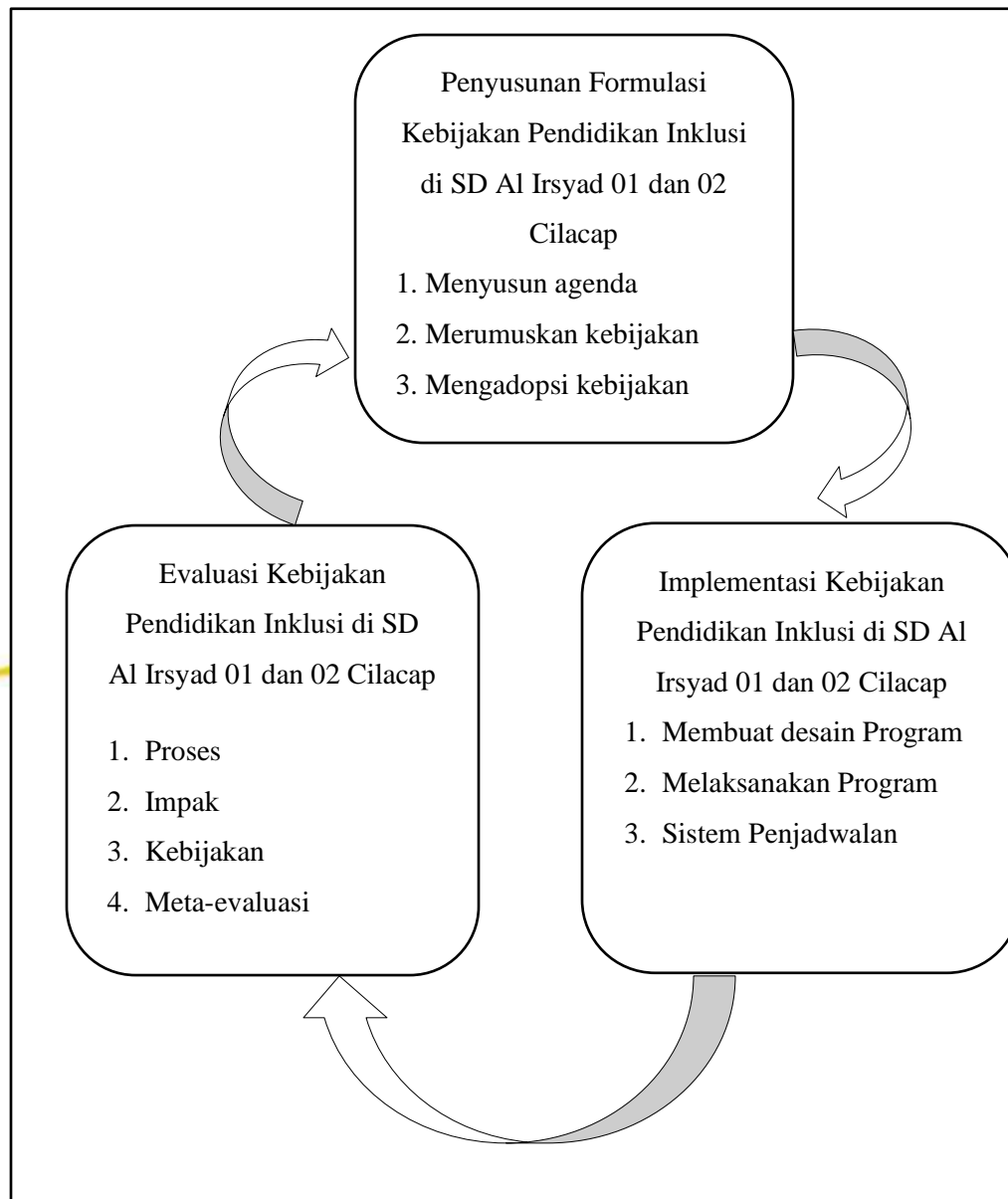
Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka masalah yang diangkat adalah tentang kebijakan yang meliputi tahapan-tahapan

---

<sup>74</sup> Efika Nurrahmasari Lubis "Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi jenjang SD se Kota Yogyakarta <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/sakp/article/download/5196/4871>Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 2 Volume V tahun 2016 . Diakses 14 maret 2017

dalam penyusunan kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi. Adapun skema dari tahapan-tahapan kebijakan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.6  
Kerangka Berpikir



Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses formulasi kebijakan yang berisi menyusun agenda, perumusan dan adopsi kebijakan, penetapan kebijakan tentang pengelolaan pendidikan inklusi, implementasi kebijakan oleh para pelaku kebijakan dengan membuat desain program, melaksanakan program, penjadwalan monitoring serta evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan cara evaluasi proses, dampak, evaluasi kebijakan dan meta evaluasi terutama pada SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap dalam mengelola pendidikan inklusi.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian.

Tempat penelitian yang dipilih adalah SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap. SD Al Irsyad 01 beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 56 Tegalreja, Cilacap Selatan, Cilacap Jawa Tengah. Sedangkan SD Al Irsyad 02 beralamatkan di Jalan Cerme N0. 24, kelurahan Sidanegara, Cilacap Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan peneliti melalui telaah dokumen dan wawancara dengan beberapa pihak khususnya penyelenggara pendidikan inklusi di sekolah tersebut yang berlangsung mulai tanggal 13-20 Maret 2017, maka ada beberapa pertimbangan yang mendasar yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih dan menetapkan kedua SD tersebut sebagai lokasi penelitian. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain :

1. Kedua sekolah tersebut, yaitu SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap memiliki ijin operasional dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.
2. Kedua sekolah tersebut sebagai penyelenggara pendidikan inklusi yang memiliki nuansa keislaman karena di bawah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam
3. Kedua sekolah memiliki manajer pendidikan inklusi, walaupun hanya satu manajer centralnya.

Hal inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian di kedua sekolah tersebut. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 26 April sampai 25 Juni 2017. Dalam hal kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi di kedua sekolah tersebut ditemukan adanya pengelolaan pendidikan yang hampir tidak ada bedanya karena dikelola bersama-sama dalam program *Butterfly Learning Centre*

#### B. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data yang akan diperoleh bukan berupa angka-angka, namun berupa catatan-catatan lapangan dan hasil wawancara. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan pada sekolah inklusi.

Penelitian Kualitatif ( *Qualitative research* ) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai metode alamiah.<sup>2</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alami, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snoball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>3</sup>

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktifitas sosial dan lain-lain. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, dalam arti ini diskriptif adalah akumulasi data dalam

---

<sup>1</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Rosda Karya, 2013) hlm 60

<sup>2</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012 ) hlm 6

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm 15

cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan materi atau membuat makna implikasi.<sup>4</sup>

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena peristiwa, aktifitas, sikap, sosial, persepsi, kepercayaan, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Studi ini dilakukan di lingkungan SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap dengan fokus penelitian tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan terkait dengan pengelolaan pendidikan inklusi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi, baik fenomena itu bersifat alami maupun rekayasa.<sup>5</sup> Dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai fakta yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memahami respon dan perilaku yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi terutama di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>6</sup>

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau yang lain.

---

<sup>4</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993 )  
hlm 76

<sup>5</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*..... hlm 72

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* ( Jakarta : Rineka Cipta, 2002 ) hlm 107



Berkaitan dengan hal itu , maka pada bagian ini jenis data dibagi menjadi data kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. <sup>7</sup>

Subyek penelitian merupakan sumber data dimana untuk memperoleh data yang diperlukan. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Sekolah, yang dimaksud adalah kepala Sekolah Dasar Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.
2. Manajer Program Pendidikan Inklusi, dalam hal ini yang menjadi Manajer adalah Manajer Program Butterfly Learning Centre pada SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.
3. Guru kelas pada kelas Inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.
4. Guru Pendamping layanan Khusus pada SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Alasan ditetapkannya informan tersebut karena mereka adalah orang yang terlibat secara langsung dalam hal kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

##### **a. Wawancara**

Wawancara atau (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Metode interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara. <sup>8</sup>

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono mengatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dengan cara Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

<sup>7</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*..... hlm 159

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.....hlm 202

topik tertentu. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.<sup>9</sup>

Pada penelitian tahap awal peneliti menggunakan teknik wawancara yang tak terstruktur, yaitu dengan melakukan wawancara yang bersifat bebas, santai dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada subyek untuk memberikan keterangan yang tak terduga dan keterangan-keterangan yang tidak dapat diketahui jika menggunakan wawancara terstruktur. Subyek mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pendapat/ pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti.

Setelah mendapat gambaran umum tentang kebijakan lembaga pendidikan Islam dalam mengelola pendidikan Inklusi terutama di SD Al Irsyad 01 dan 02 kabupaten Cilacap. Tahap selanjutnya peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang sifatnya mendalam sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Kegiatan wawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci dimulai dari pihak yang berkaitan dengan kebijakan lembaga pendidikan Islam dalam mengelola pendidikan inklusi. Yang dimaksud di sini yaitu Kepala sekolah, manajer BLC, guru kelas, guru inklusi, tenaga kependidikan

b. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>10</sup>

Observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data mempunyai ciri yang khusus dibandingkan dengan taknik yang lain, yaitu wawancara dan

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*.....hlm 317

<sup>10</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*.....hlm 220

kuisisioner. Wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek yang lain.<sup>11</sup>

Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi ini antara lain: pertama, melalui observasi atau pengamatan akan memperoleh data berdasarkan pengalaman secara langsung; kedua, observasi dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya; ketiga, observasi memungkinkan dapat mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan secara langsung sesuai dengan fokus yang diamati dan memperoleh data-data yang tidak bisa diperoleh dengan metode wawancara.

Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih baik dan lengkap. Metode ini digunakan untuk mengamati dan mencatat secara langsung di lokasi penelitian yang terkait dengan kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik secara tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>13</sup>

Data dari dokumentasi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan kebenaran atau keabsahan data dan dokumentasi juga sebagai sumber data yang kaya untuk memperjelas identitas subjek penelitian, sehingga dapat mempercepat proses penelitian.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*..... hlm 2013

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.....hlm 206

<sup>13</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian pendidikan*..... hlm 221

Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber noninsan. Dokumentasi didasarkan pada lima alasan, yaitu (1) murah; (2) dokumen dan rekaman merupakan sumber informasi yang stabil, akurat, dan dapat dianalisis kembali; (3) merupakan sumber informasi yang kaya; (4) pernyataan legal yang memenuhi akuntabilitas; dan (5) bersifat non-reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data tentang profil sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, struktur organisasi, agenda kegiatan, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Analisa data yang dimaksud adalah mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Peneliti dalam hal ini melakukan seleksi, klasifikasi dan interpretasi.

Seleksi merupakan proses untuk memilih dan memilah data yang relevan dengan penelitian ini sesuai dengan sistematika pembahasan. Klasifikasi merupakan proses dimana data data yang sudah terpilih dikelompokkan menjadi tema-tema yang sesuai dengan rincian dalam rumusan masalah. Interpretasi sebagaimana dalam sifat penelitian kualitatif yang mengandalkan pada interpretasi. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan mengacu kepada pendapat Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama dan sesudah penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*.....hlm 337

### 1. Reduksi data.

Reduksi data merupakan bentuk analisis digunakan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Reduksi data dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.<sup>15</sup>

Data dari hasil penelitian yang meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara direduksi dengan menganalisis data secara komprehensif sehingga dihasilkan kesimpulan tentang kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

### 2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, dan lain-lain. Penyajian data merupakan kegiatan ketika pengumpulan data atau informasi yang telah disusun dapat memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Data yang didapat dalam penelitian ini berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan tentang kebijakan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

### 3. Verifikasi data dan kesimpulan

Dalam penelitian ini, proses verifikasi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Mulai dari obyek penelitian selama proses pengumpulan data.

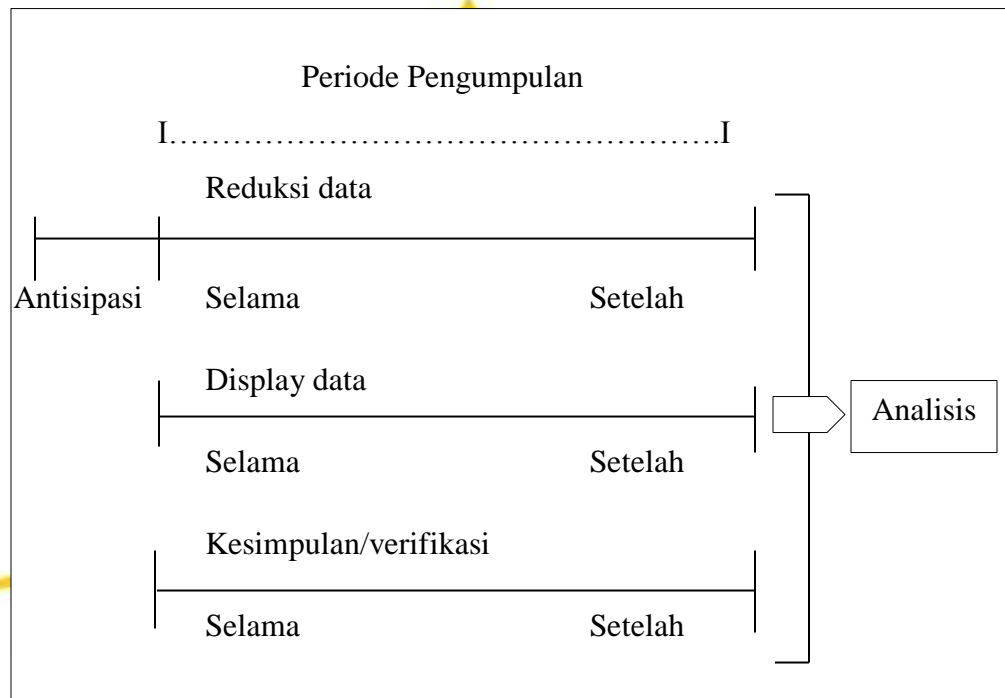
Kesimpulan adalah merupakan tahap akhir dalam sebuah proses analisis data. Dalam kesimpulan ini, peneliti mengimplementasikan

---

<sup>15</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian*.....hlm 247

prinsip induksi dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang ada dalam deskripsi yang termuat dalam catatan lapangan, catatan penelitian tentang kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap. Adapun gambaran analisis data adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Komponen Analisis data



#### F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Sesuai dengan jenis, pendekatan dan metode dalam penelitian ini, maka pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Proses pengecekan



keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu pemeriksaan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>16</sup>

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari sekolah serta informan lain. Sementara triangulasi teknik ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.



---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*.....hlm 330

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SD AL ISYRAD 01**  
**DAN 02 CILACAP**

**A. Gambaran Umum Sekolah Dasar Al Irsyad 01 Cilacap.**

1. Profil dan sejarah

Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah merupakan salah satu organisasi berakidah Islam yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang dakwah, pendidikan, pengajaran serta sosial. Organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah cabang Cilacap secara resmi berdiri sejak tahun 1359 H atau tepatnya 10 Juni 1941 M. pada masa ini bernama Madrasah Al-Irsyad dengan tokoh pendirinya yaitu Said bin Abdurochim bin Thaher Bawazier, Saleh Al-Kholaghi dan Abdul Ghozi Al-Hadidi. Madrasah ini hanya bertahan selama satu tahun, yaitu sampai tahun 1942 ketika Jepang datang ke Indonesia.

Organisasi Al-Irsyad Cilacap ini kemudian lahir kembali pada tahun 1960-an tepatnya pada tanggal 05 Oktober 1964, saat itu berdiri dengan nama Pemuda Al-Irsyad Cilacap yang merupakan organisasi otonom. Tokoh pendirinya adalah Saudara Hozy sebagai ketua, kemudian dilengkapi dengan pengurus pembantu antara lain Abdul Rochim Basalamah, Abdul Rochim Bawazier, Abdul Azis Baasir, Muwiyah Baasir, dan Said Muhammad basalamah.

Pemuda Al-Irsyad Cilacap ini hanya bergerak di bidang kesenian. Kesenian yang dibentuk oleh pemuda Al-Irsyad adalah kelompok Drum Band di bawah pimpinan Said Muhammad Basalamah. Kelompok ini menjalankan aktivitasnya sampai akhir tahun 1966. Dua penanpilan terakhirnya secara resmi terjadi pada tanggal 1966 dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke- 21 di Cilacap dan peringatan hari angkatan

bersenjata pada 5 Oktober 1966. Yang dihadiri oleh Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat Bapak Sarwo Edhi Wibowo.

Al-Irsyad Cilacap kemudian didirikan lagi pada 1 Januari 1973 dengan nama Yayasan sosial Al-Irsyad. Tokoh pendirinya adalah Hozy, Abdul Rochim basalamah, dr. Ali Baasir, Muawiyah Baasir, H. Soleman Bisyr, dan Fuad Bawazier.

Kegiatan yayasan ini berkisar pada bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Untuk memperlancar pada organisasi dibentuklah Badan Pengurus dengan susunan sebagai berikut :

- |    |                  |   |  |
|----|------------------|---|--|
| a. | Ketua            | : | Hozy   |
| b. | Sekretaris       | : | Abdul Rochim Basalamah                               |
| c. | Bendahara        | : | Dr. Ali Baasir                                       |
| d. | Pemantu-pembantu | : | Muawiyah Baasir, H. Soleman<br>Bisyr, Fuad Bawazier. |

Masa kepengurusan ini berhasil mendirikan pondamen yang kuat bagi Yayasan Sosial Al-Irsyad yaitu dengan adanya pembangunan SD Islam Al-Irsyad pada tahun 1975, sebelum difungsikan bangunan SD Al-Irsyad dipergunakan sebagai gudang untuk penyimpanan pupuk. Ketika ketua yayasan sosial Al-Irsyad saudara Hozy mengundurkan diri karena kesibukan pribadinya pada tahun 1977, kepengurusan yayasan mengalami kefakuman yang mengakibatkan roda organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. SD Islam Al-Irsyad Cilacap yang sudah berdiri juga belum dioperasikan.

Untuk mengerjakan roda organisasi yayasan sampai dengan terbentuknya kepemimpinan definitif yang disahkan dengan akta baru, maka Abdul Rochim Basalamah bertindak sebagai pimpinan tradisional. Pada masa ini Gozy Baasir menangani intitusi pendidikan, dan penyandang dananya adalah ibu Barkun Bawazier. Selain itu kepengurusan ini di Bantu juga oleh Abdul Rochim Bawazier, Abu Bakar Bawajier dan Safiq Bisyr.

Dengan terbentuknya kepengurusan tradisional ini mereka kemudian mulai mengoperasikan SD Islam Al-Irsyad Cilacap yang terletak di Jl. Soedirman Tanggal 7 Juli 1977 merupakan awal tahun ajaran baru bagi sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan belajar- mengajar pada saat itu, maka diangkatlah tiga orang pegawai yaitu Faridatusnufus Ghufron sebagai Kepala Sekolah serta di Bantu oleh dua orang guru yaitu Muzaki dan Sri Suhatmini . Pada masa awal tahun ajaran ini mampu mendapatkan murid sebanyak 40 orang

Pengelolaan SD Al-Islam oleh pengurus transisi oleh yayasan sosial Al-Irsyad berlangsung sampai dengan tahun 1983, setelah pada tahun tersebut dibentuklah yayasan baru sebagai kelanjutan dari Yayasan sosial Al-Irsyad yang kemudian mengambil alih operasionalisasi unit SD Islam Al-Irsyad pembentukan yayasan baru ini terjadi pada 30 Agustus 1983 yang sekaligus mengganti nama Yayasan dari yayasan sosial Al-Irsyad Cilacap menjadi Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap. Duduk sebagai ketua dalam yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah ini adalah Gozy Baasir

Tujuan pertama pendirian perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap adalah untuk ikut berperan aktif mewujudkan manusia seutuhnya yang bertauhid dan bertaqwa kepada Alloh SWT, bersih dari Syirik, tahayul dan khurafat, berakhlak mulia, bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Alloh melalui bidang pendidikan sosial, dan dakwah berdasar kitab Allah dan sunah Rosul.<sup>1</sup>

SD Al-Irsyad 01 Cilacap berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.56 Cilacap desa Tegaloreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap Propinsi Jawa Tengah Kode Pos 53213. SD Al-Irsyad 01 ini berdiri pada tahun 1977, dapat terbilang sudah cukup tua. Berada di pinggir jalan raya yang lumayan ramai. SD Al-Irsyad 01 Cilacap berada 500 meter di sebelah barat pusat kota (alun-

---

<sup>1</sup> Eka Mei Nugrahani, Ka TU SD Al Irsyad 01, Dokumen Sekolah Dasar Al Irsyad 01 Cilacap, 31 Mei 2017

alun Cilacap). Sebelah kiri warung makan dan kanan jalan raya, karena posisinya berada di pojok jalan pertigaan. Sebelah depan adalah kompleks pertokoan, sedangkan belakang SD Al-Irsyad 01 Cilacap merupakan rumah penduduk desa Tegalreja.

SD Al Irsyad 01 merupakan sekolah yang menjadi magnet bagi peserta didik dan wali peserta didik karena proses pendidikan yang maju dan sering memperoleh berbagai juara dalam berbagai event. SD Al Irsyad 01 Cilacap juga merupakan bagian dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sehingga dapat memberi kesempatan bagi peserta didik yang mempunyai kekhasan tertentu untuk dapat belajar bersama-sama siswa yang normal. Saat ini SD Al Irsyad 01 Cilacap dengan pengelolaan di bawah kepemimpinan bapak Sumarso,S.Pd, memiliki 18 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik sebanyak 542 anak.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi SD Al Irsyad 01 Cilacap

SD Al Irsyad 01 Cilacap sebagai lembaga pendidikan formal dalam bidang pendidikan dasar telah memiliki visi dan misi agar lembaga pendidikan tersebut mempunyai tujuan yang jelas.<sup>3</sup>

Adapun Visi SD Al Irsyad 01 Cilacap adalah “Sebagai sekolah unggul, modern, dan berakhlakul karimah”.

Sedangkan misi dari SD Al Irsyad 01 Cilacap adalah :

1. Menumbuhkan cara berpikir kreatif dan berwawasan luas
2. Menerapkan metode inovatif dalam pembelajaran
  - a. Membangun kompetensi siswa dalam pengembangan sains dan teknologi
  - b. Membentuk pribadi yang sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
3. Membiasakan Akhlakul Karimah dalam kehidupan sehari-hari

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bpk sumarso,S.Pd., kepala SD Al Irsayd 01 pada 24 Mei 2017

<sup>3</sup> Hasil observasi di SD Al Irsyad 01 Cilacap pada tanggal 24 Mei 2017



Sedangkan moto yang dimiliki oleh SD Al Irsyad 01 adalah “Maju Bersama Menuju Masa Depan Gemilang”.<sup>4</sup>

### 3. Struktur organisasi.

Dalam suatu lembaga atau organisasi terdapat struktur organisasi kepengurusan. Organisasi itu sendiri adalah susunan personalia yang merupakan suatu kelompok kerjasama dengan menempatkan orang-orang tertentu dalam kewajiban dan hak-hak serta mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas akan dapat memberikan keterangan serta mengatur jalannya organisasi tersebut.

Struktur organisasi yang dimaksud di sini adalah susunan organisasi kepemimpinan di SD Al Irsyad 01 Cilacap secara struktural beserta staf-stafnya. Adapun yayasan yang menaungi SD Al Iryad 01 adalah yayasan Sosial Al Irsyad Cilacap yang diketuai oleh Ustad Said M. Basalamah dengan dibantu oleh Sutarno,S.Pd.MA sebagai kepala sekretariat, Administrasi Keuangan dipercayakan kepada Turyanto,A.Md, Unit Kooperasi di percayakan pada Kartini, Kadiv SDM dijabat oleh Deni Setyawan,SE,MM, Kadiv Administrasi Umum dijabat oleh Drs. Didin Karsudin, Kadiv Kependidikan dijabat oleh Sukirman,S.Pd, dan Kadiv Bimroh dijabat oleh Ust. Zakariya A.<sup>5</sup>

Adapun struktur Komite sekolah diketuai oleh Arif Muhayat,S.Pi dibantu oleh Sutarno,S.Pd,MA, sebagai narasumber. Dalam menjalankan kepengurusan Komite Sekolah, ketua dibantu oleh Eka Mei N sebagai sekretaris I dan Yesi Wardani sebagai sekretaris II, untuk menjalankan keuangan dipercayakan pada Trese R sebagai bendahara I dan Ika Kristanti sebagai bendahara II. Untuk memperlancar tugas-tugas komite sekolah dibantu oleh beberapa bidang antara lain : bidang penggalan sumber daya

---

<sup>4</sup> Hasil observasi di SD Al Irsyad 01 pada tanggal 24 Mei 2017

<sup>5</sup> Dokumen SD Al Irsyad 01 Cilacap, diambil dari bagian Tata Usaha pada tanggal 18 Mei 2017



sekolah dipercayakan pada Agus Saukhani, bidang pengelolaan sumber daya sekolah oleh Siti Maemunah, bidang pengembangan kualitas pelayanan sekolah oleh Amin Sholih, bidang kerjasama sistem informasi oleh Mustaqim, bidang sarana dan prasarana sekolah oleh Supariyo, dan bidang usaha oleh Wuri Pangestuti.

Sedangkan struktur organisasi sekolah, susunannya adalah kepala sekolah dijabat oleh Sumaso,S.Pd., waka Sarpras dan Humas dijabat oleh Supriyanto., waka Kurikulum dan Kesiswaan dijabat oleh Mustaqim,S.Pd.I., sementara untuk memperlancar administrasi SD Al Irsyad 01, maka Ka Staf TU dikomandani oleh Eka Mei Nugrahani dibantu oleh Supriyono., bendara sekolah dipercayakan pada Ina Priati dan ika Kristanti., manajer kelas satu masing-masing adalah : IA Rustini S.Pd.SD dibantu oleh Sari Asih pangestu,SE, IB Asih Suminar,SE,dibantu oleh Ika Agustya,ST, IC Nurmaelani,S.Pd, dibantu oleh Ratna Asmarani,S.Pd., Manajer kelas dua masing-masing adalah: Kelas IIA Heny Wijayanti,S.Pd.SD, IIB Sri Sukmiarsih,S.Pd.SD, IIC Nurraningsih,S.Pd.I., Manajer kelas tiga masing-masing adalah : IIIA Rasun,S.Pd.I, IIIB Tri Hartati,S.Kom, IIIC Aris Hidayat,S.Pd.I., Manajer kelas empat adalah : IV A Ismi Novianti,S.Pd, IVB Etti listriyarini,S.Pd, IVC Supriyo., manajer kelas lima masing-masing adalah : VA Setya Puri,S.Pd.SD, VB Mulyanti S.Pd, VC Siti Hanifah,S Pd, adapun manajer kelas enam masing-masing adalah : VIA Hasanah S.Pd.I, VIB Sri Kusmiati,S.Si, VIC Purwanti Indriyani,S.Pd.SD. Guru PAI terdiri dari Khoerudin,S.Ag, Sulasih,S.Ag, guru Bahasa Arab Mutmainah,S.Ag dan Erwan Aprilian, guru Tahfidz Teguh Waluyo,S.Pd.SD dan Andi, guru bahasa Inggris Heni Widyaningsi,S.Pd dan Husna Sayang Hati,S.Pd, guru PJOK Abis Yunipuspita,S.Pd., Unit perpustakaan di kelola oleh Windri Astoto,A.Ma dan Ajeng Kilau Reswari,A.Md., sementara untuk menjaga agar sekolah tetap

tertib,rapih, dan aman dipercayakan pada petugas K3 yaitu : Jasmanto, Budiono, Susanto, dan Muhali.<sup>6</sup>

## B. Gambaran Umum SD Al Irsyad 02 Cilacap.

### 1. Profil dan Sejarah

SD Al Irsyad 02 Cilacap merupakan bagian dari lembaga pendidikan di kabupaten Cilacap yang berperan penting dalam membangun peradaban pendidikan. Sekolah yang berlokasi di Jalan Cerme No. 24 Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap ini merupakan sekolah pilihan bagi warga Cilacap dan sekitarnya karena mampu bersaing dalam hal prestasi baik akademik maupun non akademik. Sebagai lembaga pendidikan yang modern dengan layanan Telepon ( 0282) 532274 dan Faksimile (0282) 521527 ini memudahkan untuk berhubungan secara langsung dengan pihak sekolah. SD Al Irsyad 02 yang sekarang dipimpin oleh kepala sekolah yaitu bapak Khasani,S.Pd memiliki tekad untuk memajukan pendidikan di Cilacap.<sup>7</sup>

SD Al Irsyad 02 Cilacap merupakan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Sosial Al Irsyad Cilacap ini berdiri tahun 1992 dengan kode NIS 100310 dan NSS 104030102110. Tekad untuk menjadi sekolah yang bermutu juga terus diupayakan dengan peningkatan sarana dan prasaran yang baik hal itu menunjang keberhasilan sekolah sehingga status akreditasi A menjadi sangat wajar bagi sekolah ini.

Bapak khasani,S.Pd mengatakan bahwa : “SD Al Irsyad 02 Cilacap berdiri secara resmi pada tahun 1992 yang merupakan pemekaran dari SD Al Irsyad 01 Cilacap. SD ini mulai meluluskan pada tahun 1994 dengan jumlah siswa pertama 19 peserta didik”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Eka Mei Nugrahani, Ka TU SD Al Iryad 01 , Dokumen Kepegawaian SD Al Iryad 01, 3 Mei 2017

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Khasani,S.Pd, selaku Kepala SD Al Iryad 02 Cilacap pada tanggal 24 Mei 2017

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Khasani,S.Pd., kepala SD Al Irsyad 02 pada tanggal 8 Mei 2017

Dengan bergulirnya waktu dan keseriusan dari lembaga pengelola dan segenap ustadz dan ustadzah untuk menjadikan lembaga ini menjadi lembaga pendidikan yang dapat mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang bertakwa, cerdas dan trampil serta berakhlak mulia. Untuk mempersiapkan siswa-siswi agar mereka melengkapinya sarana dan prasarana pembelajaran serta membuat program-program terobosan untuk memaksimalkan pelayanan kepada siswa-siswa, orang tua murid dan masyarakat. Saat ini SD Al Irsyad 02 dengan kepala sekolah Bpk Khasani, S.Pd bersama dewan pendidik mengelola dan membina peserta didik sebanyak 616 anak.

## 2. Visi dan Misi SD Al Irsyad 02 Cilacap

Visi : <sup>9</sup>

“Sebagai sekolah unggul, modern, dan berakhlakul karimah.”

Misi :

- a. Menumbuhkan cara berfikir kreatif dan berwawasan luas.
- b. Menerapkan metode inovatif dalam pembelajaran agar mencapai pendidikan berkualitas.
- c. Membangun kompetensi siswa dalam pengembangan sains dan teknologi
- d. Membentuk pribadi yang sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar
- e. Membiasakan perilaku islami dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan Pendidikan SD Al Irsyad 02 Cilacap

- a. Tertib sholat
- b. Patuh kepada orang tua
- c. Sayang kepada keluarga
- d. Santun dan suka menolong
- e. Gemar mengkaji sains
- f. Gemar mencari pengetahuan baru
- g. Tidak gagap dalam menghadapi teknologi

---

<sup>9</sup> Hasil Observasi di SD Al Irsyad 02 pada tanggal 27 April 2017

- h. Mencintai keindahan dan keselarasan
  - i. Bergaya hidup sehat
  - j. Semuanya lulus dalam ujian sekolah, dan diterima di SMP .
  - k. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered learning), antara lain CTL, PAKEM, serta layanan bimbingan dan konseling;
  - l. Memiliki jiwa toleransi antar umat beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
  - m. Meraih kejuaraan dalam bidang lomba keagamaan .
  - n. Memperoleh kejuaraan lomba bidang akademik.
  - o. Memperoleh kejuaraan Lomba bidang non akaemik.
  - p. Melestarikan budaya daerah melalui MULOK bahasa Jawa.
  - q. Memiliki aqidah shohihah.
  - r. Mampu membaca dan menghafal Al-qur'an dengan tartil.
  - s. Mampu berbahasa asing ( Inggris dan Arab )
3. Struktur organisasi

Dalam suatu organisasi, lembaga, atau departemen adalah sesuatu yang mutlak ada adalah struktur organisasi. Adapun yang disebut dengan organisasi adalah susunan personalia yang merupakan suatu kelompok kerjasama dengan menempatkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan hak-hak serta tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan dapat memberikan keterangan serta mengatur mekanisme organisasi tersebut.

Struktur organisasi yang dimaksud di sini adalah susunan organisasi kepemimpinan di SD Al Irsyad 02 Cilacap secara struktural beserta staf-stafnya. Adapun yaysan yang menaungi SD Al Iryad 02 adalah yayasan Sosial Al Irsyad Cilacap yang diketuai oleh Ustadz. Said M. Basalamah dengan dibantu oleh Sutarno,S.Pd.MA sebagai kepala sekretariat, Administrasi Keuangan dipercayakan kepada Turyanto,A.Md, Unit Kooperasi di

percayakan pada Kartini, Kadiv SDM dijabat oleh Deni Setyawan,SE,MM, Kadiv Administrasi Umum dijabat oleh Drs. Didin Karsudin, Kadiv Kependidikan dijabat oleh Sukirman,S.Pd, dan Kadiv Bimroh dijabat oleh Ust. Zakariya A.

Adapun struktur Komite sekolah diketuai oleh Untung Susanto,S.sos dibantu oleh Rohwanto, sebagai wakil ketua. Dalam menjalankan kepengurusan Komite Sekolah, ketua dibantu oleh Ari Kuntari sebagai sekretaris I dan Endah S sebagai sekretaris II, untuk menjalankan keuangan dipercayakan pada Yulianti sebagai bendahara I dan Evi Kurnia sebagai bendahara II. Untuk memperlancar tugas-tugas komite sekolah dibantu oleh beberapa bidang antaralain : bidang Rohani dipercayakan pada Imam Jauhari, Jumino, Erni Sulistiyowati, bidang pendidikan oleh Siti Qumiah, Ariawan, Drs. Hari Winarno,M.Si, dan Purwati, dan Diasti Nugroho, bidang usah oleh Nana Fitriawan, Imam Aziz, Erni Setyaningsih, Irma, Dewi P, bidang sosial oleh, Marifah, Hery Purwaningsih dan Tri Setyorini.<sup>10</sup>

Sedangkan struktur organisasi sekolah, susunannya adalah kepala sekolah dijabat oleh Khasani,S.Pd., waka 1 dijabat oleh Imam Aziz Allatif,S.Pd., waka 2 dijabat oleh Ariawan Istiadi,S.Si., Koordinator bidang masing-masing adalah : keagamaan oleh Jumino dan Abdullah,S.Pd.I., Sarpras dikelola oleh Prayitno,S.Pd.I. Kurikulum dipercayakan pada Mustolih,S.Pd., Sosial diserahkan pada Kenar, wulan,A.Ma.Pust., Humas ditangani oleh Diasti Nugroho,S.Ag., dan Kesiswaan oleh Endah Suprihatin,SPd.Ing. Sementara untuk memperlancar administrasi SD Al Irsyad 01, maka Ka Staf TU dikomandani oleh Windi Prasetyo,S.Pd.SD dibantu oleh Astri Rosalina,S.Sos., bendara sekolah dipercayakan pada Dwi Herfina,A.Ma dan Efi Kurniawati., manajer kelas satu masing-masing adalah : IA Feri Dwiyanti S.Pd. dibantu oleh Endah Triana,S.Pd, IB Nur Hayati,S.Pd, dibantu oleh

---

<sup>10</sup> Dokumen SD Al Irsyad 02, diambil dari bagian Tata Usaha pada tanggal 27 Mei 2017



Erlina Hermawati,S.E, IC Eri Anita Mukminati,S.E, dibantu oleh Nyai Eliana,S.E., Manajer kelas dua masing-masing adalah: Kelas IIA Sainah,S.Pd., IIB Dian Indrawati,S.Pd., IIC Siti Kaliyah,S.Pd., Manajer kelas tiga masing-masing adalah : IIIA Kamidin,S.Pd., IIIB Rg. Ernawati,S.Pd.SD, IIIC Suyati,S.Pd.SD., Manajer kelas empat adalah : IV A Siti Fatimah,S.Pd, IVB Indriarti Candra Kartika,S.Pd.SD, IVC Burhan Tri SantosoS.Si., manajer kelas lima masing-masing adalah : VA Nur Izza Rufaidai,S.Si., VB Evie Daryanti,S.Pd, VC Nuning Sri Yuningsih,S.Pd.SD, adapun manajer kelas enam masing-masing adalah : VIA Tisna Prillia Martanti,S.Pd.Si, VIB Heni Purwaningsih,S.Pd, VIC Mustolih,S.Pd. Guru PAdBP terdiri dari Saepudin, Jumino,S.Pd.I, Diasti Nugroho,S.Ag.,guru Bahasa Arab Eni Seviati,S.Pd.I dan Arif Styoko,S.Pd.I., guru Tahfidz Prayitno,S.Pd.I dan Sariman, guru bahsa Inggris Santi Budiaji Danika,S.S dan Endah Supriatin,S.Pd.Ing, guru PJOK Rudi Setiyono.,TIK Ayu Tifani., PSB(laborat) Kenari Wulan., Unit perpustakaan di kelola oleh Kenari W,A.Ma.Pust dan Dwi Hartono,A.Ma.Pust, sementara untuk menjaga agar sekolah tetap tertib,rapih, dan aman dipercayakan pada petugas K3 yaitu : Sumadi, Suparman, Sugeng, dan Sunarko.<sup>11</sup>

### C. Pengelolaan Pendidikan Inklusi

#### 1. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SD Al Irsyad 01 Cilacap.

##### a. Peserta didik

Jumlah peserta didik SD Al Irsyad 01 pada tahun ajaran 2016/2017 adalah 542 anak, terdiri dari 292 laki-laki dan 250 perempuan. SD Al Irsyad 01 Cilacap mempunyai 18 rombongan belajar. Dari jumlah tersebut terdapat 5 anak yang memerlukan perhatian lebih karena anak tersebut mempunyai masalah dalam mengikuti pendidikan disebabkan

<sup>11</sup> Dokumen SD Al Irsyad 01, diambil dari bagian Tata usaha tanggal 16 Mei 2017



oleh kemampuan yang kurang dalam memahami konsep. Terdapat 4 peserta didik dengan katagori *Slow learner* dan 1 peserta didik dengan katagori Tunagrahita.

Peserta didik yang menjadi fokus dalam pendidikan inklusi adalah mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Untuk mengetahui adanya anak berkebutuhan khusus pihak sekolah sangat berhati-hati dalam menentukan anak berkebutuhan khusus tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak sumarso,S.Pd :

*Karena dalam penerimaan peserta didik baru anak belum terdeteksi secara mendalam dikarenakan baru pada sebatas observasi awal. Kemudian dalam perjalan waktu proses belajar mengajar baru anak dapat dikategorikan berkebutuhan khusus atau tidak, kecuali anak yang memiliki kurang sempurna tertentu dapat diketahui dari awal .<sup>12</sup>*

Peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SD Al Irsyad 01 terdiri dari:<sup>13</sup>

Tabel 4.1

Tabel peserta didik di inklusi di SD Al Irsyad 01

No	KETERANGAN	
1	NAMA	Ayyub Nur Khairy
	TTL	Cilacap, 02-02-2010
	IB	IB
	MASUK BLC	Juli 2016
	HAMBATAN	Slow Learner
	KARAKTERISTIK	- Pemahaman identitas diri kurang. - Perilaku kooperatif. - Belum mengenal huruf dan angka, sehingga belum bisa membaca dan menulis.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sumarso,S.Pd, kepala SD Al Irsyad pada tanggal 16 Mei 2017

<sup>13</sup> Dokumen SD Al Irsyad 01, diambil dari Tata Usaha pada tanggal 16 Mei 2017

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang pensil terlalu tegak namun sudah mampu menggunakan 3 jari.</li> <li>- Menarik garis lurus vertikal dan horizontal baik, garis diagonal kurang baik namun mampu.</li> <li>- Membilang baru sampai angka 14, namun baru mampu menunjukkan angka sampai dengan 4.</li> <li>- Menulis angka 1-4 Ok, selebihnya kesulitan.</li> <li>- Senang bermain puzzle</li> <li>- Anak didik sudah mengenal warna dengan cukup baik. Anak dapat menyebutkan warna dan memisahkan benda yang memiliki warna yang sama.</li> <li>- Pemahaman bentuk bangun geometris lingkaran baik, namun persegi, persegi panjang, segitiga masih diberi clue.</li> <li>- Anak didik bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas.</li> <li>- Komunikasi dua arah baik.</li> </ul>
2	NAMA	Avrillian Subianto
	TTL	Cilacap, 23-04-2007
	KELAS	III C
	MASUK BLC	Juli 2015
	HAMBATAN	Slow Learner
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran akademik.</li> <li>- Senang ngobrol.</li> <li>- Membaca dan menulis lancar dan tepat.</li> <li>- Kesulitan dalam berhitung</li> <li>- Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berhubungan dengan akademik dasar.</li> <li>- Suka jahil atau iseng kepada teman.</li> </ul>
3	NAMA	Khaerunnisa Fitriyani Afifah
	TTL	Cilacap, 13-12-2006
	KELAS	IV A

	MASUK BLC	Juli 2015
	HAMBATAN	Tunagrahita Ringan (C) IQ = 68
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit untuk konsentrasi</li> <li>- Membaca lamban</li> <li>- Menulis kesulitan, mengeja, dan bentukan huruf kaku dengan ukuran huruf yang besar, kurang proporsional</li> <li>- Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berhubungan dengan akademik dasar.</li> <li>- Suka jahil atau iseng kepada teman.</li> </ul>
4	NAMA	Adam Farid
	TTL	Bekasi, 25-02-2004
	KELAS	VI B
	MASUK BLC	Juli 2015
	HAMBATAN	Slow Learner, IQ = 76
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivasi belajar rendah</li> <li>- Belum menguasai huruf lepas a-z</li> <li>- Dapat menyalin tulisan dengan baik.</li> <li>- Berbicara dengan liris</li> </ul>
5	NAMA	Rifky Putra Ramadhan
	TTL	Cilacap, 29-10-2004
	KELAS	VI B
	MASUK BLC	Juli 2015
	HAMBATAN	Slow Learner
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekanak-kanakan.</li> <li>- Suka iseng dan kurang mampu mengendalikan emosi.</li> <li>- Menulis tidak rapi dan membaca belum begitu lancar.</li> <li>- Kesulitan pelajaran matematika.</li> <li>- Logika berbahasa dan matematika kurang.</li> <li>- Suka ngobrol.</li> </ul>

**IAIN PURWOKERTO**

## b. Kurikulum

Secara umum kurikulum yang diterapkan di SD Al Irsyad 01 Cilacap adalah: <sup>14</sup>

1. Kurikulum 2013
2. Kurikulum Al Irsyad untuk bidang studi agama
3. Kurikulum Al Irsyad untuk ekstrakurikuler

Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003<sup>15</sup> adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Penyusunan kurikulum harus memperhatikan beberapa hal yaitu : <sup>16</sup>

1. Peningkatan iman dan taqwa.
2. Peningkatan akhlak mulia.
3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
5. Tuntutan perkembangan daerah dan nasional.
6. Tuntutan dunia kerja.
7. Perkembangan dunia kerja.
8. Agama.
9. Dinamika perkembangan dunia global.
10. Persatuan nasional dan nilai kebangsaan.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mustaqim, S.Pd, Waka Kurikulum SD Al Irsyad 01 pada tanggal 16 Mei 2017

<sup>15</sup> Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19

<sup>16</sup> U.H. Saidah, *Pengantar Pendidikan*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016 ) hlm 217

Kurikulum ini secara umum berlaku untuk seluruh peserta didik. Namun untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus dilakukan dengan kurikulum yang dimodifikasi. Penerapan kurikulum fleksibel. Artinya mengakomodasi anak dengan berbagai latar belakang dan kemampuan. Kurikulum yang disusun bersifat inklusif dan responsive jender, proses belajar mengajar yang efektif, lingkungan sekolah yang mendukung, sumber daya yang berasas pemerataan dan standarisasi dalam hal-hal tertentu.<sup>17</sup>

Fleksibilitas kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus tertentu misalnya bagi peserta didik yang memiliki hambatan kecerdasan perlu diimplementasikan dalam bentuk Program Pembelajaran Individual (PPI). PPI merupakan program pembelajaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan individu dengan bobot materi berbeda dari kelompok dalam kelas dan dilaksanakan dalam seting kelas klasikal.

Penyesuaian kurikulum dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi tidak terlebih dahulu menekan pada materi pelajaran, tetapi lebih pada bagaimana memberikan perhatian penuh pada peserta didik dengan kebutuhan khusus. Modifikasi ini dilakukan dengan menyederhanakan standar kompetensi yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik.

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 39 ayat (1) bahwa yang termasuk tenaga kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, pemilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan laboran, dan teknisi sumber belajar. Tugas tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi,

---

<sup>17</sup> Dedy Kustawan, Budi Hermawan, *Model Implementasi*.....hlm 107

pengelolaan, pengembangan, pengawasa, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.<sup>18</sup>

Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Jumlah tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan yang ada di SD Al Irsyad 01 adalah 50 orang . Seorang pendidik yang mempunyai tugas tambahan sebagai kepala sekolah dibantu dua orang wakil kepala sekolah. Ada 18 manajer kelas dibantu 3 orang pendidik untuk kelas satu, ada 9 guru mata pelajaran, 7 guru IQRO. Selain pendidik ada juga yang beran sebagai Tenaga Kependidikan bidang administrasi yaitu 2 orang TU dan 2 orang bendahara, dan 2 orang pegawai perpustakaan dan 4 orang tenaga K3.

Jumlah pendidik disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar. Untuk kelas satu terdiri dari seorang manajer kelas dibantu oleh seorang *Co Teacher* dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan karena untuk kelas satu masih sangat memerlukan bimbingan dan arahan dari pendidik, oleh karenanya diperlukan *Co Teacher* untuk membantu tugas pendidik sebagai manajer kelas utama.

Dalam pendidikan inklusi, tenaga pendidik meliputi guru kelas dan guru mata pelajaran. Selain guru diperlukan pula pendamping bagi siswa berkebutuhan khusus. Untuk bimbingan di dalam kelas dilakukan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran sedangkan bimbingan khusus dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Adapun layanan bimbingan bagi siswa yang berkebutuhan khusus ditangani secara profesional oleh tenaga

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39



ahli yang berkompeten dibidangnya. Layanan itu disebut dengan *Butterfly Learning Centre (BLC)*. Dalam memberikan layanan kepada siswa berkebutuhan khusus ini, BLC menggunakan pendekatan secara humanis. Karena para tenaga khusus yang dimiliki oleh BLC juga para sarjana dalam bidang psikologi sehingga mampu memahami karakteristik siswa berkebutuhan khusus.

d. Sistem Penilaian

Proses pendidikan yang dilakukan di SD Al Irsyad 01 dilakukan dengan baik hal itu juga berlaku bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik. Hasil penilaian ini digunakan untuk bahan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik, efektifitas proses pembelajaran, dan umpan balik.

Bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebelum memulai pembelajaran dilakukan assesmen. Assesmen dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan standar awal bagi anak berkebutuhan khusus sehingga selanjutnya disusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Penilaian yang dilakukan bagi peserta didik inklusi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Etti Listriyani, S.Pd adalah sama dengan penilaian pada peserta didik normal lainnya yaitu pada penguasaan materi dan sikap.

19

Sistem penilaian pendidikan inklusi disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan pada SD Al Irsyad 01. Karena kurikulum yang digunakan adalah kurikulum regular penuh yang dimodifikasikan bagi siswa berkebutuhan khusus, maka sistem penilainya pun sama dengan sistem penilaian di sekolah regular. Begitu juga laporan Hasil Belajar Siswa dan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan ibu Etti Litriyani, S.Pd, pada tanggal 31 Mei 2017

sistem kenaikan kelas. Keduanya dilakukan dengan mengacu pada kurikulum yang digunakan pada sekolah tersebut.<sup>20</sup>

e. Sarana dan Prasarana

Proses pendidikan yang berlangsung di SD Al Irsyad 01 berlangsung dengan baik, hal itu tidak lepas dari dukungan dari beberapa faktor penentu antara lain adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. SD Al Irsyad 01 Cilacap berada di areal tanah seluas 1.846  $m^2$  dengan luas bangunan 900  $m^2$ . Untuk menunjang proses pelaksanaan belajar mengajar, SD Al Irsyad 01 memiliki fasilitas sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Lingkungan yang kondusif
2. Gedung yang representatif
3. Ruang Kepala Sekolah
4. Laboratorium komputer
5. Ruang Guru
6. Ruang TU
7. Laboratorium bahasa
8. Perpustakaan ber AC
9. Ruang multimedia
10. Ruang Kesenian
11. Masjid
12. Lapangan Olah raga
13. Security 24 Jam
14. Kantin Sekolah
15. Ruang belajar yang nyaman

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan bpk Mustaqim, S.Pd.I, Waka Kurikulum SD Al Irsyad 01 pada tanggal 31 Mei 2017

<sup>21</sup> Dokumen SD Al Irsyad 01, diambil dari bagian Tata Usaha pada tanggal 16 Mei 2017

## 2. Penyelenggaraan pendidikan Inklusi di SD Al Irsyad 02 Cilacap

### a. Peserta didik

Jumlah peserta didik SD Al Irsyad 02 Cilacap pada Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah sebanyak 616 anak, terdiri dari 319 laki-laki dan 297 perempuan, sedangkan peserta didik berkebutuhan khusus sebanyak 12 anak. Dari 12 anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini beragam terdiri dari 2 peserta didik katagori *Slow learner*, 2 peserta didik katagori *ADHD*, 2 peserta didik katagori *ASD*, 5 peserta didik katagori tuna grahita, dan 1 peserta didik Tuna rungu dan *low vision*. Anak-anak inilah yang merupakan siswa berkebutuhan khusus yang ada di SD Al Irsyad 02 Cilacap. Penanganan siswa berkebutuhan khusus ini dilakukan oleh pihak sekolah dengan mengikut sertakan siswa dalam kelas reguler dan pembimbingan melalui *Butterfly Learning Centre (BLC)*. Peserta didik SD Al Irsyad 02 Cilacap yang termasuk katagori berkebutuhan khusus adalah :<sup>22</sup>

Tabel 4.2.

Tabel peserta didik inklusi di SD Al Irsyad 02

No	KETERANGAN	
1	NAMA	Lintang Azriel
	TTL	Cilacap, 21-10-2009
	KELAS	IA
	MASUK BLC	Juli 2105
	HAMBATAN	ADHD
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bosan dengan pemberian materi yang sama.</li> <li>- Suka bermain puzzle, balok, mencocok.</li> <li>- Belum bisa malakukan aktivitas bersama teman-teman.</li> <li>- Warna, benda, hewan sudah mampu.</li> </ul>

<sup>22</sup> Dokumen SD Al Irsyad 02, diambil dari bagian Tata Usaha pada tanggal 27 April 2017

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menulis tergantung pada mood, namun sudah mampu.</li> <li>- Tekanan dalam menulis belum kuat.</li> </ul>
2	NAMA	Luqman
	TTL	Cilacap,
	KELAS	I C
	MASUK BLC	Juli 2016
	HAMBATAN	ASD
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahasa verbal belum terbentuk dengan baik.</li> <li>- Mampu memahami instruksi.</li> <li>- Mampu menyalin kata dari papan tulis ke buku dalam jarak sekitar 1 meter. Menulis kalimat sederhana (3 kata pola KV-KV) masih ada huruf yang hilang.</li> <li>- belum mengenal warna.</li> <li>- Dapat mewarnai gambar dengan bidang batas.</li> <li>- Belum paham huruf dan angka, baru dalam dalam tahap menyalin tulisan.</li> <li>- Muncul pengulangan perilaku dan ucapan.</li> <li>- Mampu menyamakan bentuk dan warna, mampu menjiplak</li> <li>- Pemahaman bentuk bangun geometris baik.</li> <li>- Memegang pensil dengan 4 jari.</li> <li>- Tidak kesulitan dalam kegiatan meronce dengan ukuran dan bentuk manik-manik yang berbeda.</li> </ul>
3	NAMA	Fauzi Manaf
	TTL	Cilacap, 30-11-2008
	KELAS	IV A
	MASUK BLC	Juli 2105
	HAMBATAN	Tunagrahita
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu menyalin tulisan dengan baik</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menulis dikte sedikit kesulitan</li> <li>- Membaca baru tahap membaca kata sederhana, kata berimbuhan cukup kesulitan</li> <li>- Mudah ikut-ikutan teman.</li> <li>Kurang mampu duduk lama dan tenang</li> </ul>
4	NAMA	Azzam Syahidu
	TTL	Cilacap, 30-11-2008
	KELAS	II D
	MASUK BLC	Juli 2015
	HAMBATAN	ADHD
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senang bersenang saat belajar.</li> <li>- Mampu menulis dite mandiri dalam tahap kelompok kata.</li> <li>- Mampu membaca dalam tahap kelompok kata</li> <li>- Belum mampu mandiri dalam segala hal.</li> <li>- Belajar supaya tenang harus didampingi dan diarahkan.</li> <li>- Sulit fokus dan keterarahanwajahan minim.</li> </ul>
5	NAMA	Fajar Habib Ats Tsani
	TTL	Cilacap, 20-06-2006
	KELAS	II C
	MASUK BLC	Juli 2105
	HAMBATAN	Tunagrahita
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesulitan menulis berkaitan dengan motorik halus pada jari jemari.</li> <li>- Kesulitan membaca.</li> <li>- Pemahaman yang disampaikan dalam bentuk percakapan Ok.</li> <li>- Senang ngobrol diluar konteks materi yang diajarkan.</li> </ul>
6	NAMA	Refan Athasyah Anwar
	TTL	Cilacap, 18-06-2008

	KELAS	III C
	MASUK BLC	Juli 2015
	HAMBATAN	Slow Learner
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulit fokus dalam belajar.</li> <li>- Senang ngobrol diluar konteks materi yang diajarkan.</li> <li>- Sulit duduk tenang.</li> <li>- Membaca kurang lancar.</li> <li>- Menulis kurang lancar.</li> </ul>
7	NAMA	Raden Bimo Nugroho
	TTL	Cilacap, 12-09-2002
	KELAS	II C
	MASUK BLC	Juli 2011
	HAMBATAN	Tunarungu + Low Vision (B) IQ = 110
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan mendengar sangat minim (120 dB dan 80 dB)</li> <li>- Dapat berkonsentrasi</li> <li>- Dapat mengerti instruksi</li> <li>- Mata sebelah kiri tidak fungsi</li> <li>- Motorik tidak mengalami terhambat</li> <li>- Menyelesaikan tugas dengan bimbingan</li> <li>- Kemampuan menyalin baik</li> <li>- Cukup mampu membaca namun dengan pembimbingan</li> </ul>
8	NAMA	Naura Thifally Evania
	TTL	Bontang, 01-11-2004
	KELAS	V A
	MASUK BLC	Juli 2012
	HAMBATAN	Tunagrahita Ringan (C) IQ = 62
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menulis dan membaca dengan bimbingan</li> <li>- Menyalin tulisan baik, menulis dikte masih dibimbing.</li> <li>- Berhitung taraf semi kongkret.</li> <li>- Senang berbicara diluar konteks materi.</li> </ul>



9	NAMA	Galen Rama
	TTL	Cilacap, 14-10-2005
	KELAS	V C
	MASUK BLC	Juli 2012
	HAMBATAN	Tunagrahita Ringan (C) IQ = 64
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membaca dengan cukup baik</li> <li>- Kesulitan menulis dikte dalam bentuk kelompok kata.</li> <li>- Gangguan konsentrasi</li> <li>- Senang sekali berbicara</li> </ul>
10	NAMA	Risqi Nur Alfarizi
	TTL	Cilacap, 28-06-2004
	KELAS	VI A
	MASUK BLC	Juli 2011
	HAMBATAN	Tunagrahita (C1) IQ = 46
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesulitan dalam memahami materi akademik</li> <li>- Pasif</li> <li>- Membaca, menulis, dan berhitung dalam bimbingan</li> <li>- Sulit memahami warna</li> <li>- Dapat duduk tenang</li> <li>- Senang berbicara diluar konteks pembelajaran</li> <li>- Gangguan konsentrasi</li> </ul>
11	NAMA	Agniel Kusuma Prayudistira
	TTL	Cilacap, 02-05-2005
	KELAS	VI C
	MASUK BLC	Juli 2016
	HAMBATAN	ASD (F) IQ = 77
	KARAKTERISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami instruksi</li> <li>- Sulit fokus mata</li> <li>- Perilaku hiperaktif</li> <li>- <i>Self injury</i> jika cemas, dalam bentuk</li> </ul>

		menggingit pergelangan tangan kiri - Cemas kebisingan - Sulit konsentrasi - Sulit berinteraksi dan berkomunikasi - Suka makan mie instan dan soft drink
12	NAMA	Husniyyah Setyowati
	TTL	Cilacap, 02-05-2005
	KELAS	VI C
	MASUK BLC	Juli 2006
	HAMBATAN	Slow Learner
	KARAKTERISTIK	- Kurang memahami instruksi. - Kurang mampu menjawab soal pengetahuan secara tepat (tidak nyambung). - Kemampuan berhitung rendah. - Kooperatif terhadap kegiatan

#### b. Kurikulum

Secara umum kurikulum yang diterapkan di SD Al Irsyad 02 Cilacap adalah :<sup>23</sup>

1. Kurikulum 2013
2. Kurikulum Al Irsyad untuk bidang studi agama
3. Kurikulum Al Irsyad untuk ekstrakurikuler

Kurikulum yang diterapkan oleh SD Al Irsyad 02 Cilacap sama dengan SD Al Irsyad 01 Cilacap. Hal itu terjadi karena kedua sekolah tersebut masih dalam satu yayasan sehingga kurikulum yang diterapkan juga sama. Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

<sup>23</sup> Dokumen SD Al Irsyad 02, diambil pada bagian kurikulum pada tanggal 31 Mei 2017

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Kurikulum ini secara umum berlaku untuk seluruh peserta didik. Namun untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus dilakukan dengan kurikulum yang fleksibel. Prinsip pengembangan kurikulum fleksibel setting pendidikan inklusi harus dijadikan acuan oleh para pendidik untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah :<sup>24</sup>

1. Kurikulum umum yang diberlakukan untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada umumnya dimodifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik.
2. Penyesuaian kurikulum dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus terjadi pada komponen tujuan, materi, proses, dan penilaian.
3. Penyusunan kurikulum tidak harus sama ada masing-masing komponen.
4. Proses penyesuaian juga tidak harus sama untuk semua materi.
5. Proses modifikasi juga tidak harus sama untuk semua mata pelajaran.
6. Proses modifikasi juga tidak sama pada masing-masing jenis kelainan peserta didik inklusi.

Penyesuaian kurikulum dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi tidak terlebih dahulu menekan pada materi pelajaran, tetapi lebih pada bagaimana memberikan perhatian penuh pada peserta didik dengan kebutuhan khusus. Modifikasi ini dilakukan dengan

---

<sup>24</sup> Dokumen SD Al Irsyad 02, diambil dari bagian kurikulum pada tanggal 5 Juni 2017

menyederhanakan standar kompetensi yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik. Sebagaimana diungkapkan oleh Waka Kurikulum bapak Ariawan Istiadi,S.Si :

*Pendidikan inklusi yang ada di SD Al Irsyad 02 menggunakan kurikulum yang berlaku secara menyeluruh akan tetapi untuk inklusi, maka kurikulum yang dimodifikasi dengan fleksibilitas sesuai dengan karakteristik peserta didik.*<sup>25</sup>

c. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan di SD Al Irsyad 02 Cilacap adalah sebanyak 46 orang. Seorang pendidik menjabat sebagai kepala sekolah dibantu oleh 2 orang wakil kepala sekolah, 6 orang menjabat sebagai koordinator bidang, 18 manajer kelas dibantu 3 orang asisten kelas terutama adalah kelas 1, 6 orang guru mata pelajaran, 1 petugas laborat. Untuk mengadministrasikan setiap kegiatan SD Al Irsyad 02 memiliki 2 orang TU dan 2 orang bendahara yang melayani bagian keuangan. Adapun pelayanan perpustakaan dilayani oleh 2 orang. Sementara untuk menjaga dan melayani seluruh kegiatan dilaksanakan oleh 4 orang *Cleaning Service*.<sup>26</sup>

Banyaknya jumlah pendidik disesuaikan dengan jumlah kelas dalam rombongan belajar. Untuk kelas satu terdiri dari seorang manajer kelas dibantu oleh seorang *Co Teacher* dalam kegiatan mengelola pendidikan di kelas terutama dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan karena untuk kelas satu masih sangat memerlukan bimbingan dan arahan dari pendidik hal ini biasa terjadi karena kelas satu merupakan kelas awal sehingga perlu perhatian dan penanganan yang lebih intensif, oleh karenanya diperlukan *Co Teacher* untuk membantu tugas pendidik sebagai manajer kelas utama.

<sup>25</sup> Wawancara dengan bapak Ariawan Istiadi,S.Si, pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>26</sup> Dokumen SD Al Irsyad 02, diambil dari bagian Tata Usaha, pada tanggal 24 Mei 2017

Bagian penting dalam pendidikan inklusi adalah adanya tenaga pendidik yang profesional, tenaga pendidik meliputi guru kelas dan guru mata pelajaran. Selain guru diperlukan pula pendamping khusus bagi siswa berkebutuhan khusus. Untuk bimbingan di dalam kelas dilakukan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran sedangkan bimbingan khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Adapun layanan bimbingan bagi siswa yang berkebutuhan khusus ditangani secara profesional oleh tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya. Layanan itu disebut dengan *Butterfly Learning Centre (BLC)* sebagaimana dijelaskan oleh bapak Khasani S.Pd selaku kepala SD Al Irsyad 02 Cilacap.<sup>27</sup>

Dalam memberikan layanan kepada siswa berkebutuhan khusus ini, *BLC* menggunakan pendekatan secara humanis. Karena para tenaga khusus yang dimiliki oleh *BLC* juga para sarjana dalam bidang psikologi sehingga mampu memahami karakteristik siswa berkebutuhan khusus.<sup>28</sup>

#### d. Sistem Penilaian

Proses pendidikan yang dilakukan di SD Al Irsyad 02 dilakukan dengan baik hal itu juga berlaku bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Sistem penilaian pendidikan inklusi disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan pada SD Al Irsyad 02. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik. Hasil penilaian ini digunakan untuk bahan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik, efektifitas proses pembelajaran, dan umpan balik. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebelum memulai pembelajaran dilakukan

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khasani,S.Pd, pada tanggal 24 Mei 2017

<sup>28</sup> Hasil observasi tentang BLC pada tanggal 24 Mei 2017

asesmen. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan standar awal bagi anak berkebutuhan khusus sehingga selanjutnya disusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Adapun teknik yang digunakan dapat berupa tes tertulis, observasi, tes kinerja, penugasan, tes lisan, portopolio, jurnal, inventori, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Karena kurikulum yang digunakan adalah kurikulum regular penuh yang dimodifikasikan bagi siswa berkebutuhan khusus, maka sistem penilainya pun sama dengan sistem penilaian di sekolah regular. Begitu juga laporan Hasil Belajar Siswa dan sistem kenaikan kelas. Keduanya dilakukan dengan mengacu pada kurikulum yang digunakan pada sekolah tersebut.<sup>29</sup>

e. Sarana dan Prasarana

Proses pendidikan yang berlangsung di SD Al Irsyad 02 berlangsung dengan baik, hal itu tidak lepas dari dukungan dari beberapa faktor penentu antara lain adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. SD Al Iryad 02. Adapun sarana yang dimiliki oleh SD Al Irsyad 02 adalah : SD Al Irsyad 02 Cilacap berada di areal tanah seluas 3.620  $m^2$  dengan luas bangunan 1.951  $m^2$ . Untuk menunjang proses pelaksanaan belajar mengajar, SD Al Irsyad 02 memiliki fasilitas sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Lingkungan yang kondusif
2. Gedung yang representatif
3. Ruang Kepala Sekolah
4. Ruang Guru

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Ariawan Istiadi, S.Si pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>30</sup> Dokumen SD Al Irsyad 02, diambil dari bagian Tata Usaha, pada tanggal 5 Juni 2017



5. Ruang TU
6. Poliklinik umum dan gigi
7. Laboratorium komputer (40 Unit)
8. Laboratorium bahasa
9. Perpustakaan ber AC
10. Ruang multimedia
11. Ruang Kesenian
12. Masjid
13. Lapangan Olah raga
14. Security 24 Jam
15. Kantin Sekolah
16. Ruang belajar yang nyaman
17. Ruang program *Butterfly Learning Centre*.

#### **D. Kebijakan Pendidikan Inklusi Melalui Program *Butterfly Learning Centre*.**

*BLC* kepanjangan dari *Butterfly Learning Centre* yang berdiri secara otonom di bawah Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. Unit yang berdiri pada tanggal 01 Agustus 2009 dengan SK Yayasan no 143/10310/adm/Y/30 merupakan bagian dari unit yang mensupport unit pendidikan reguler dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik tertentu yang berbeda dengan umumnya anak. Karakteristik yang khas ini dapat berupa hambatan perkembangan yang dimiliki anak maupun potensi maksimal yang dimiliki anak.<sup>31</sup>

*Butterfly Learning Centre* didirikan atas gagasan dari Benny Al-Farichi, namun belum sempat menindaklanjuti konsep yang beliau cetuskan, Benny harus pindah tugas ke tempat lain. Pada awal berdirinya, *BLC* dipimpin oleh Sri Rejeki Hartikawati, S.Psi, dibantu oleh 4 staf guru, yaitu Ratih Murdiningrum, S.Psi ,

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Yudhi Pramudityo, S.Psi, selaku Manajer Inklusi di SD Al Iryad 02 pada tanggal 24 Mei 2017

Hayat Indriasih, A.Md.OT , Merry Kurniana, S.Psi , Resha Kurniati, S.Pd., 2 guru tamu yaitu Nursanti Dwi Yogawati, S.Pd dan Lusiana, S.Pd sebagai guru pengampu Bahasa Inggris, dan Akhmad Jamil sebagai guru pengampu SBK (Seni Budaya dan Keterampilan). Untuk membantu kebutuhan kebersihan sarana dan prasarana *BLC* maka diperbantukan 2 tenaga *cleaning service* dari SD Al-Irsyad 02, yaitu Jasmanto dan Sumanto. Jasmanto dan Sumanto sebagai tenaga CS digantikan oleh Dwi Harto sebagai tenaga *cleaning service* plus administrator pada tanggal 15 Oktober 2009. Untuk pemberdayaan SDM yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap mendatangkan tenaga konsultan dari Jakarta. Yudia Riyanto memberi pelatihan manajemen ABK kepada guru-guru di BLC sebanyak 2 kali dalam satu bulan. Pada awal berdirinya *BLC* menangani 13 anak dengan berbagai macam diagnosis klinis, seperti autism, *ADHD*, tuna rungu, *Slow Learner*, dll.

Diawal tahun 2010, kepemimpinan *BLC* diserahkan kepada Yudhi Pramudityo, S.Psi tepatnya pada tanggal 11 Januari 2010. Kemudian tenaga guru pun mulai dipergantikan satu-persatu, antara lain oleh Sukawitro, S.E ; Reny Savitri, S.psi ; Nur Aji Dian P, S.Kep ; Suci Ariningtyas, S.Psi ; Rutriana Kusumawardani, S.Psi ; dan Nofi Ika Haryani, S.Psi. sedangkan untuk tenaga *cleaning servis* plus administrator masih dipegang oleh Dwi Harto.

Pada tahun pelajaran 2015/2016, *BLC* Al-Irsyad Al-Islamiyyah mengalami perubahan formasi. Pada generasi kenga ini *BLC* Al-Irsyad diampuh oleh 6 guru pembimbing khusus, dengan 3 guru baru Para tenaga terdidik muda yang terdiri dari Isti Komah, S.Pd, Lucky Azizatul Luckman, S,Pd, dan Maesaroh, S.Pd menguatkan formasi *BLC* baru ini.<sup>32</sup>

Keberadaan *BLC* mulai eksist di mata unit-unit pendidikan reguler di Al-Irsyad. sampai dengan saat ini, *BLC* menangani 30 anak program kelas pagi dan 10 anak program kelas sore. Dengan menangani 40 anak berkebutuhan khusus,

---

<sup>32</sup> Dokumen BLC diambil dari pada tanggal 24 Mei 2017

*BLC* Al-Irsyad Al-Islamiyyah dilengkapi dengan 8 ruang intervensi dan alat pendukung pembelajaran yang cukup memadai. Kegiatan pelatihan dan workshop senantiasa diikuti sebagai sarana untuk merefresh dan mengembangkan diri dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus.

Kekompakan antara tim *BLC* dan orang tua siswa makin erat sebagaimana yang diungkapkan oleh ust Yudhi Pramudityo,S.Psi. Kerja sama antara guru kelas, guru mapel, staf *BLC*, orang tua siswa, dokter spesialis tumbuh kembang anak, psikolog, dan elemen-elemen lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses intervensi.<sup>33</sup>

*Butterfly Learning Centre* sebagai bagian dari unit yang ada di bawah yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap selalu mendukung program yang dijalankan oleh unit pendidikan regular. Akan tetapi karena yang ditangani adalah anak-anak berkebutuhan khusus maka mensupportnya juga sesuai dengan kemampuan dari peserta didik yang ditangani. Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan pendidikan inklusi maka *Butterfly Learning Centre* mempunyai visi dan misi.

Visi “Mengoptimalkan potensi anak sehingga dapat mandiri dan menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya”.

Adapun Misi dari *Butterfly Learning Centre* adalah:<sup>34</sup>

1. Mengoptimalkan proses belajar anak
2. Mengoptimalkan perkembangan sosial anak
3. Mengoptimalkan keterampilan hidup anak.

1. Kebijakan model GROW dalam pendidikan inklusi.

Model GROW (atau proses) adalah metode sederhana untuk penetapan tujuan dan pemecahan masalah.

Tahapan Proses Dari GROW.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Yudhi Pramudityo,S.Psi, pada tanggal 24 Mei 2017

<sup>34</sup> Hasil Observasi program BLC pada tanggal 10 Mei 2017

- a. **Goals (Tujuan)** Ini adalah sasaran, dimana tujuan yg ingin dicapai. Tujuan harus didefinisikan sedemikian rupa sehingga sangat jelas seperti apa yang ingin dicapai. Melihat tujuan pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap yang ada diturunkan dari Visi dan Misi dari program *Butterfly Learning Centre*. Dengan pengotimalan proses belajar peserta didik inklusi dengan layanan yang diberikan oleh pengelola dengan jumlah tenaga pendamping yang cukup dan waktu pelaksanaan yang terjadwal dengan baik sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dapat berinteraksi dengan baik dikalangan sendiri maupun nantinya di masyarakat secara luas dan diharapkan setelah dewasa dapat berbaur yang terbaik dimasyarakat dengan membekali ketrampilan-ketrampilan yang dimiliki.<sup>35</sup>
- b. **Reality (Realitas)** suatu penilaian kondisi saat ini dimana sekarang sedang berada. Realita yang ada pada pendidikan yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus tidak seindah yang dirasakan oleh peserta didik normal hal ini terjadi karena karena banyak faktor, antara lain tidak tercukupinya sarana dan prasarana khusus bagi peserta didik inklusi. Akan tetapi berbeda dengan peserta didik yang berada di SD Al Irsyad 01 dan 02 yang dapat akses pendidikan dengan baik karena pihak sekolah memfasilitasi kebutuhan bagi mereka.<sup>36</sup> Kemajuan dan program yang sudah dicapai dalam mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Apa saja isu-isunya, tantangan yang ada, seberapa jauh lagi dari tujuan yang diinginkan sebelumnya.
- c. **Obstacles (Rintangan)** adalah mencari hambatan apa saja yang telah menghentikan tujuan yang diinginkan sebelumnya. Dimana jika tidak ada Obstacles (hambatan) tersebut seharusnya tujuan yang diinginkan sebelumnya sudah bisa tercapai. **Options (Pilihan)** Jika Obstacles

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Yudhi Pramutityo, S.Psi pada tanggal 10 Mei 2017

<sup>36</sup> Hasil observasi program BLC pada tanggal 10 Mei 2017

(hambatan) telah diidentifikasi, perlu dibuat cara-cara (Options) untuk menemukan jalan yang bisa membuat kemajuan.

Rintangan yang dialami peserta didik inklusi sebagaimana disampaikan oleh Yudhi Pramudityo, S.Psi sebagai menejer BLC adalah :

1. Masih banyak masalah penyerta (sekunder) pada anak berkebutuhan khusus dibanding dengan masalah inti yang dihadapi anak itu sendiri.
2. Pemahaman guru yang kurang di kelas reguler mengenai anak-anak berkebutuhan khusus.
3. Pemahaman anak-anak umum lainnya mengenai kondisi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga sarat pembulian pada ABK, terutama pada jenjang SMP dan SMA.
4. Orang tua yang ingin melepaskan anaknya dari intervensi BLC, padahal anak belum mampu untuk berjuang mandiri di kelas umum.
5. Kesulitan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan teman-teman dikelasnya pada ABK (membuat anak dan orang tua memiliki konsep diri yang kurang baik).
6. Respon komunitas sekolah yang belum sepenuhnya berempati pada anak-anak berkebutuhan khusus.
7. Banyaknya ABK dari sekolah lain maupun SLB yang ingin pindah ke Al Irsyad Cilacap.

**IAIN PURWOKERTO**

Sementara untuk membuat kemajuan dari program BLC maka pengelola mengoptimalkan kemampuan yang ada dengan berbagi jenis kegiatan. Kegiatan peningkatan kemampuan peserta didik dengan optimalisasi pertemuan yang dilakukan dengan interval 5 kali intervensi dalam satu pekan. Disamping peserta didik yang harus meningkat mutunya tak kalah penting adalah pengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap. Usaha yang dilakukan antara lain dengan mengikuti pelatihan pengelolaan pendidikan inklusi, seminar, diklat baik



iantern maupun diklat ekstern yang dilaksanakan oleh kementerian pendidikan nasional.

- d. **Way Forward (Cara maju)** Dengan mempunyai Options atau pilihan-pilihan cara tersebut maka sesuai dengan Reality yang ada, Options perlu dikonversi untuk menjadi langkah-langkah nyata yang akan digunakan untuk mencapai Goals. Pilihan pilihan yang diberikan oleh program BLC yang berada di SD Al Irsyad 02 sebagai pusatnya pendidikan inklusi di Al Irsyad dengan mengelola pendidikan inklusi secara baik hal itu dibuktikan dengan layanan yang diberikan berupa waktu intervensi yang terjadwal dengan baik, sarana dan prasarna yang mendukung kegiatan mengoptimalkan kemampuan peserta didik inklusi dengan pembimbingan yang intensif, serta peningkatan kualitas pendidik di BLC.

## 2. Tahapan Formulasi Kebijakan dalam Program Butterfly Learning Centre.

### a. Menyusun Agenda Kegiatan

Agenda kebijakan didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk dapat melakukan tindakan tertentu. Sebagaimana disampaikan oleh Barbara Nelson dalam Budi Winarno bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal, dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.

Pendidikan yang dilaksanakan di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap termasuk pendidikan inklusi dilaksanakan dengan menyusun agenda kegiatan dimulai dengan perencanaan pendidikan secara matang di awal tahun pelajaran. Penyusunan agenda kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unit yang ada di bawah yayasan Al Irsyad Islamiyah Cilacap. Sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil akhir sebuah



keputusan yaitu dengan menyusun perencanaan yang matang.<sup>37</sup>

Penyusunan agenda kegiatan diawali dengan rapat pimpinan beserta penanggung jawab tiap-tiap unit yang ada di SD Al Irsyad, baik itu SD Al Irsyad 01 maupun 02 Cilacap. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Khasani, S.Pd bahwa untuk menentukan sebuah kebijakan yang akan diambil pihak sekolah mengadakan rapat terlebih dahulu dengan beberapa pihak termasuk pihak yayasan dan komite.<sup>38</sup>

Yang menjadi fokus dalam agenda kegiatan ini adalah yang terkait dengan program layanan bagi peserta didik dengan kategori berkebutuhan khusus. Layanan tersebut terkait dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Penyusunan agenda pertama adalah mengenai rencana program kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun berjalan mengenai layanan yang diberikan kepada peserta didik inklusi. Agenda kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan mingguan, bulanan, tengah semester, semester maupun tahunan.

Kegiatan penyusunan agenda kegiatan dilakukan oleh tim pengelola pendidikan inklusi SD Al Irsyad 01 maupun SD Al Irsyad 02 yang berpusat di SD Al Irsyad 02 sebagai tempat pelayanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Adapun layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan seperti layanan pendidikan pada peserta didik reguler dalam kelas reguler akan tetapi pada saat tertentu peserta didik berkebutuhan khusus dilayani oleh unit khusus yang disebut *BLC*. Layanan itu berupa dalam bidang akademik dan non akademik.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sumarso, S.Pd, kepala SD Al Irsyad 01 pada tanggal 27 April 2017

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Khasani, S.Pd, kepala SD Al Irsyad 02 pada tanggal 24 Mei 2017

Disamping itu juga layanan dalam bidang tumbuhkembang bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

b. Perumusan Kebijakan

Kegiatan-kegiatan sekitar formulasi kebijakan merupakan interaksi peranan antar peserta perumusan kebijakan pendidikan, baik formal maupun non formal. Perumusan kebijakan sangat bergantung pada seberapa besar para peserta dapat memainkan peranan masing-masing dalam memformulasikan kebijakan.

Rumusan kebijakan yang baik harus memenuhi kriteria berikut. *Pertama*, rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. *Kedua*, rumusan kebijakan pendidikan dapat dipergunakan ketika menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang.

Tahapan dalam perumusan kebijakan meliputi :

*Pertama*, perumusan masalah ( *Defining Problem* ). Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.

Dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah diketahui kebutuhan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut kemudian membuat program dan analisis pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tersebut.

*Kedua*, merupakan agenda kebijakan. Tidak semua masalah masuk keagenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang akhirnya masuk keagenda kebijakan. Salah satu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti apakah masalah

tersebut mempunyai dampak yang besar dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

*Ketiga*, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan pilihan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

*Keempat*, penetapan kebijakan. Salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan. Maka tahap akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai ketetapan hukum yang mengikat.

Pembuatan kebijakan merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya pendidikan yang baik dan bermutu.

Perumusan kebijakan hingga menjadi keputusan kebijakan merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan informasi yang berkait dengan masalah pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Pengumpulan informasi ini menjadi sangat penting bagi pembuat kebijakan agar kebijakan yang dirumuskan tepat sesuai dengan tujuan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan inklusi ini ada keterkaitan antara pihak yayasan sebagai penanggungjawab secara institusi kelembagaan dengan kepala sekolah sebagai pelaksana dan penanggungjawab seluruh kegiatan dan proses pendidikan yang berlangsung di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap. Tidak hanya yayasan dan

kepala sekolah saja yang merumuskan kebijakan tetapi juga melibatkan bagian urusan pendidikan yang meliputi bagian kurikulum, dan kesiswaan serta penanggung jawab program BLC.<sup>39</sup>

Keterlibatan bagian kurikulum sangat dibutuhkan. Bagian kurikulum inilah yang akan memberi masukan bagi pengambil kebijakan terkait dengan pendidikan inklusi. Karena kondisi peserta didik berkebutuhan khusus ini berbeda dengan peserta didik pada umumnya maka kurikulum yang akan dipergunakan pun menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Kurikulum yang dipergunakan menggunakan kurikulum regular dan dimodifikasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta menggunakan kurikulum yang diindividualkan.<sup>40</sup>

Manajer *Butterfly Learning Centre* beserta jajaran pengurusnya yang akan menangani peserta didik berkebutuhan khusus sangat penting dilibatkan dalam proses penyusunan perumusan kebijakan, hal ini dikarenakan merekalah yang akan menangani peserta didik berkebutuhan khusus ini. Unit *BLC* ini yang bertanggung jawab untuk membuat jadwal layanan bimbingan, konsultasi, serta pendampingan.

#### c . Adopsi Kebijakan

Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SD Al Irsyad 01 dan 02 dilaksanakan merupakan konsep awal yang disampaikan oleh Benny Al Farichi sebagai pengagas awal untuk mengoptimalkan peserta didik dengan katagori berkebutuhan khusus dengan memberi layanan khusus dengan nama *Butterfly Learning Centre*. Adopsi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi diilhami oleh banyaknya peserta didik dengan katagori berkebutuhan khusus sehingga menghasilkan sebuah

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khasani,S.Pd, pada tanggal 27 April 2017

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak Mustaqim,S.Pd.I, pada tanggal 16 Mei 2017

kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan program *Butterfly Learning Centre*.

Program *Butterfly Learning Centre* merujuk pada sekolah sumber yaitu Sekolah Luar Biasa yang dijadikan rujukan dalam mengelola pendidikan inklusi dengan memperhatikan karakteristik peserta didik yang kemampuannya beragam.<sup>41</sup>

Penyelenggaraan pendidikan inklusif melibatkan perubahan dan modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan satu visi bersama yang meliputi semua anak yang berbeda pada rentangan usia yang sama dan satu keyakinan bahwa pendidikan inklusif adalah tanggung jawab pendidikan sistem regular yang mendidik semua peserta didik. Konsep pendidikan inklusif sebagai penciptaan masyarakat pembelajar, dimana pembelajaran dirancang secara khusus dan merespon kebutuhan peserta didik, oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan bergantung pada pekerjaan pendidik dan orang tua secara bersama-sama.

Kolaborasi antara pendidik dan orang tua menjadi sangat penting dalam memahami dan melaksanakan pendidikan inklusi. Demikian juga yang terjadi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap yang sangat mendukung program layanan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus ini, terutama orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Kolaborasi berhubungan dengan cara dimana para ahli berhubungan dengan yang lain dan orang tua, anggota keluarga seperti mereka bekerjasama dalam mendidik siswa dengan kelainan khusus.<sup>42</sup>

Dengan demikian, pendidik dalam mengelola pendidikan inklusif harus memahami kebijakan dan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu memberdayakan masyarakat yang memiliki anak-

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sumarso, S.Pd, pada tanggal 27 April 2017

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nuning Yuningsih, S.Pd.SD, pada tanggal 24 Mei 2017



anak berkebutuhan khusus sehingga keluarga mengetahui pola asuh yang tepat untuk mengoptimalkan prestasi anak-anak mereka. disamping pola pengasuhan yang tepat dilaksanakan di sekolahan maka perlu kiranya orang tua juga mendukung pola asuh yang tepat ketika peserta didik berkebutuhan khusus ini sudah pulang ke rumah sehingga pendampingan dalam belajar di rumah menjadi lebih mnegena dan berarti bagi peserta didik tersebut. Karena keberhasilan pendidikan secara umum maupun pendidikan inklusi tidak dapat berhasil tanpa dukungan dari orang tua peserta didik.

### 3. Tahapan Implementasi Kebijakan dalam Program Butterfly Learning Centre.

Setelah menyusun agenda dan merumuskan kebijakan yang tepat, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan itu sendiri adalah cara yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan akan menjadi sia-sia apabila tidak dilaksanakan, oleh karenanya kebijakan program penyelenggaran pendidikan inklusi melalui *Butterfly Learning Centre* harus diimplementasikan yaitu dilaksanakan oleh unit-unit pengelola. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap melalui program *Butterfly Learning Centre* sebagai pusatnya berada di SD Al Irsyad 02.<sup>43</sup>

Model implementasi yang dilakukan oleh sekolah mengikuti model yang diperkenalkan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Untuk mengimplentasikan sebuah kebijakan terpengaruh oleh aktifitas dalam bentuk komunikasi antar organisasi, penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan kegiatan, yang dipengaruhi oleh kondisi

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kasani,S.Pd, pada tanggal 24 Mei 2017



ekonomi, sosial, dan kondisi politik yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

Ada tiga langkah yang dipergunakan dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu :

*Pertama*, membuat desain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan prestasi, biaya dan waktu. Program yang dijalankan melalui *BLC* terkait dengan layanan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus meliputi layanan individu, layanan kelompok dan layanan psikologi anak.<sup>44</sup>

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dari masing-masing pendamping peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan perkembangan peserta didik tersebut agar dapat memperoleh prestasi sesuai dengan bakatnya. Sementara biaya menjadi kewenangan lembaga dalam menentukannya sesuai dengan kebutuhan layanan yang diberikan.

*Kedua*, melaksanakan program kebijakan dengan cara memberdayakan struktur-struktur personalia, dana, dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat. Dalam menjalankan tugas dan kewajibanya pengelola *BLC* sudah mempunyai jadwal pembimbingan yang dilaksanakan setiap hari dengan jumlah peserta didik yang dibimbing sesuai dengan alokasi waktu yang ada sehingga dapat secara optimal mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Karena para pengelola *BLC* ini merupakan orang-orang pilihan dengan latar belakang psikologi yang memadai sehingga dalam hal penanganan peserta didik menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan ramah terhadap anak.

*Ketiga*, membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan. Dalam menjalankan tugasnya para

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yudhi Pramudityo, S.Psi, pada tanggal 24 Mei 2017

pengelola program BLC yang ada mempunyai jadwal supervisi atau penilaian dari atasannya agar dalam pelaksanaan pendampingan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dapat kontrol dan dievaluasi agar pelaksanaannya sesuai dengan prosedur.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi dilihat dari segi biaya lebih besar dari pada penyelenggaraan pendidikan reguler. Sebagai gambaran bahwa besarnya dana pengembangan sekolah di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap adalah Rp 7.500.000,00, sedangkan Amal Penyelenggaraan Pendidikan (APP) untuk peserta didik reguler sebesar Rp 400.000,00 /bulan sementara untuk peserta didik inklusi yang dikelola melalui program *Butterfly Learning Centre* sebesar Rp 700.000,00/bulan.<sup>45</sup>

Kebijakan ini diambil berkenaan dengan layanan yang diberikan kepada peserta didik dengan katagori peserta didik berkebutuhan khusus. Layanan yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dan menyesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh pengelola *Butterfly Learning Centre*.

Layanan yang diberikan berupa layanan harian, yaitu dalam satu pekan ada 5 kali layanan intervensi yang diberikan setiap peserta didik untuk konsultasi. Layanan intervensi dilakukan 2 kali secara individu, dengan layanan satu peserta didik dibimbing oleh satu pembimbing. Layanan kelompok dilakukan satu pekan sekali. Layanan TIK satu pekan sekali dan prakarya satu kali dalam satu pekan. Itulah mengapa biaya yang diperuntukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus lebih besar dari pada peserat didik reguler. Di samping kegiatan layanan harian yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus yang telah disebutkan di atas, juga ada layanan yang diberikan pada setiap semester yaitu kegiatan *Outdoor Study*, berupa

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Yudhi Pramudityo, S.Psi, Manajer BLC pada tanggal 15 Juni 2017

berenang, outbond, dan wisata edukasi. Layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gigi. Dan pada akhir tahun diadakan Famili Gathering sebagai ajang bagi pihak sekolah bertemu dengan pihak wali peserta didik untuk menyampaikan berbagai hal mengenai pendidikan dan pola pendidikan yang disampaikan dengan suasana yang akrab tidak terlalu kaku dan formal.<sup>46</sup>

#### 4. Tahapan Evaluasi Kebijakan

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi dari sebuah kebijakan. Suatu kebijakan tidak boleh dibiarkan tanpa adanya evaluasi. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan berlangsung maka perlu adanya pemeriksaan atau evaluasi. Evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan tetapi lebih pada usahan untuk mengetahui adanya kekurangan dan kelemahan yang mungkin ada dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, agar kebijakan yang sudah diterapkan dapat diperbaiki sehingga akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap mengacu pada teorinya Bingham dan Felbinger yang membagi evaluasi kebijakan menjadi empat. Pertama evaluasi proses yaitu bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga terhadap sebuah kebijakan, dalam hal ini adalah evaluasi tentang program inklusi. Kedua evaluasi impak yaitu evaluasi yang menilai tentang hasil akhir dari sebuah kebijakan yang dalam kajian ini adalah program inklusi. Ketiga evaluasi kebijakan yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang telah direncanakan. Yang keempat adalah meta-evaluasi merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil temuan evaluasi kebijakan.

---

<sup>46</sup> Dokumen BLC diambil dari Tata Usaha pada tanggal 27 Mei 2017

Tujuan evaluasi pelaksanaan program *BLC* :

*Pertama*, untuk menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan dalam pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

*Kedua*, untuk mengukur tingkat efisiensi kebijakan. Dengan evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh pengelola BLC terkait dengan dana, memang terdapat perbedaan yang ada. Hal itu dilakukan karena pelaksanaan pembimbingan peserta didik inklusi dilakukan lebih intensif dan membutuhkan pemikiran dan kegiatan pendukung lainnya.

*Ketiga*, untuk mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran dari suatu kebijakan.

*Keempat*, untuk mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan. Dengan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi dapat diketahui apakah terdapat adanya pengaruh yang nyata bagi peserta didik inklusi maupun pada lembaga penyelenggaranya.

*Kelima*, Untuk mengetahui apakah ada penyimpangan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Dengan adanya evaluasi terhadap pengelolaan inklusi diharapkan berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tersebut.

*Keenam*, Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan yang akan datang sehingga lebih baik. Dengan adanya evaluasi dapat diketahui masalah-masalah yang mungkin timbul, kemudian dicari solusinya melalui saran-saran terkait dengan program *BLC*.

Sebagai program untuk mensupport pendidikan regular, program *Butterfly Learning Centre* juga perlu adanya evaluasi kegiatan. Laporan kegiatan perpekan dilakukan tiap hari kamis ketika ada agenda refleksi tiap pekan. Sementara evaluasi program kegiatan dilaksanakan tiap 3 bulan untuk laporan perkembangan prilaku peserta didik berkebutuhan khusus, adapun laporan semester dilaksanakan tiap semester sekali, dan tiap tahun dilaksanakan evaluasi tahunan sebagai rangkaian evaluasi menyeluruh dari tiap-tiap kegiatan.<sup>47</sup>

#### 5. Pendekatan Kebijakan dalam Pengelolaan Pendidikan Inklusi.

Pendekatan kebijakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap menggunakan pendekatan *Struktural Approach* merupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down*.<sup>48</sup>

Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara terstruktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan pengawasan menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi.

#### 6. Fungsi Kebijakan

Inti dari kebijakan adalah berupa keputusan-keputusan yang subtansinya dalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomani oleh pimpinan, staf, personel organisasi serta hubunganya dengan lingkungan eksternal. Suatu kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Sementara suatu proses

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Yudhi Pramudityo, S.Psi, pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khasani, S.Pd, pada tanggal 24 Mei 2017



pembuatan kebijakan harus memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input, proses, output dan feedback dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Fungsi kebijakan dalam pendidikan sebagai berikut:

*Pertama*, sebagai pedoman untuk bertindak. Hal ini mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan suatu acuan dalam implementasi program pendidikan serta sebagai tuntunan ke mana arah sistem pendidikan akan tertuju dan berjalan. Demikian juga dalam pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap menjadi pedoman dalam pelaksanaan program melalui *BLC*.<sup>49</sup>

*Kedua*, sebagai pembatas perilaku. Apabila dikaitkan dengan pendidikan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari norma serta aturan dalam setiap tindakan yang diaktualisasikan berkaitan dengan aktivitas pendidikan. Ini diperlukan untuk membatasi sikap yang tidak sesuai atau sejalan bahkan bertentangan dengan tujuan pendidikan secara umum maupun pendidikan inklusi.

*Ketiga*, sebagai bantuan bagi pengambil keputusan. Kebijakan pendidikan di sini adalah sebagai ujung tombak dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar setelah melalui serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan dan sesuai dengan tuntutan stakeholders yang berkepentingan di dunia pendidikan terutama pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Berkaitan dengan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap, maka fungsi kebijakan dapat dipahami sebagai pedoman untuk bertindak. Karena dalam mengambil keputusan akan melakukan sesuatu harus didasari pada pedoman yang ada. Kebijakan juga dapat sebagai pembatas perilaku. Artinya segala sesuatu harus didasari pada kebijakan yang berlaku, tidak dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan sendiri saja tetapi pada

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sumarso, S.Pd, pada tanggal 5 Juni 2017



norma atau aturan yang berlaku sesuai dengan keputusan. Kebijakan juga dipandang sebagai bentuan bagi pengambil keputusan. Sebagai leader dalam sebuah organisasi tentu kebijakan yang sudah ditetapkan merupakan acuan dan bantuan bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan.<sup>50</sup>

Kebijakan dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain kebijakan merupakan garis-garis besar untuk bertindak bagi pengambil keputusan untuk membuat keputusan.



---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khasani,S.Pd, pada tanggal 24 Mei 2017

**BAB V**  
**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI**  
**DI SD AL IRSYAD 01 DAN 02 CILACAP**

**A. Tahapan Formulasi Kebijakan dalam Program Butterfly Learning Centre.**

**1. Menyusun Agenda Kegiatan**

Poses pendidikan yang dilaksanakan baik di SD Al Irsyad 01 maupun SD Al Irsyad 02 Cilacap termasuk pendidikan inklusi dilaksanakan dengan menyusun agenda kegiatan dimulai dengan perencanaan pendidikan secara matang di awal tahun pelajaran. Penyusunan agenda kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai unit yang ada di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Proses agenda kebijakan pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Barbara Nelson dalam Budi Winarno bahwa proses agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.

Penyusunan agenda kegiatan diawali dengan rapat pimpinan beserta penanggung jawab tiap-tiap unit yang ada di SD Al Irsyad, baik itu SD Al Irsyad 01 maupun SD Al Irsyad 02 Cilacap. Yang menjadi fokus dalam agenda kegiatan ini adalah yang terkait dengan program layanan bagi peserta didik dengan katagori berkebutuhan khusus. Layanan tersebut terkait dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Penyusunan agenda pertama adalah mengenai rencana program kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun berjalan mengenai layanan yang diberikan kepada peserta didik inklusi. Agenda kegiatan yang dilakukan dapat berupa kegiatan mingguan, bulanan, tengah semester, semester maupun tahunan.

Kegiatan penyusunan agenda kegiatan dilakukan oleh tim pengelola pendidikan inklusi SD Al Irsyad 01 maupun SD Al Irsyad 02 yang berpusat di SD Al Irsyad 02 sebagai tempat pelayanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Adapun layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan seperti layanan pendidikan pada peserta didik reguler dalam kelas reguler akan tetapi pada saat tertentu peserta didik berkebutuhan khusus dilayani oleh unit khusus yang disebut *BLC*. Layanan itu berupa dalam bidang akademik dan non akademik. Disamping itu juga layanan dalam bidang tumbuhkembang bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan melihat kenyataan yang ada bahwa proses penyusunan agenda kegiatan telah dilakukan dengan rapi sesuai dengan harapan.

## 2. Perumusan Kebijakan.

Kegiatan perumusan kebijakan sangat bergantung pada seberapa besar para peserta dapat memainkan peranan masing-masing dalam memformulasikan kebijakan.

Rumusan kebijakan yang baik harus memenuhi kriteria berikut. *Pertama*, rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. *Kedua*, rumusan kebijakan pendidikan dapat dipergunakan ketika menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang.

Tahapan dalam perumusan kebijakan meliputi :

*Pertama*, perumusan masalah ( *Defining Problem* ). Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.

Dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah diketahui kebutuhan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut

kemudian membuat program dan analisis pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tersebut.

*Kedua*, merupakan agenda kebijakan. Tidak semua masalah masuk keagenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang akhirnya masuk keagenda kebijakan. Salah satu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

*Ketiga*, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan pilihan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

*Keempat*, penetapan kebijakan. Salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan. Maka tahap akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai ketetapan hukum yang mengikat.

Pembuatan kebijakan merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya pendidikan yang baik dan bermutu.

Perumusan kebijakan hingga menjadi keputusan kebijakan merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan informasi yang berkait dengan masalah pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Pengumpulan informasi ini menjadi sangat penting bagi pembuat kebijakan agar kebijakan yang dirumuskan tepat sesuai dengan tujuan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap.

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan inklusi ini ada keterkaitan antara pihak yayasan sebagai penanggungjawab secara institusi kelembagaan dengan kepala sekolah sebagai pelaksana dan penanggungjawab seluruh kegiatan dan proses pendidikan yang berlangsung di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap. Tidak hanya yayasan dan kepala sekolah saja yang merumuskan kebijakan tetapi juga melibatkan bagian urusan pendidikan yang meliputi bagian kurikulum, dan kesiswaan serta penanggung jawab program BLC.

Keterlibatan bagian kurikulum sangat dibutuhkan. Bagian kurikulum inilah yang akan memberi masukan bagi pengambil kebijakan terkait dengan pendidikan inklusi. Karena kondisi peserta didik berkebutuhan khusus ini berbeda dengan peserta didik pada umumnya maka kurikulum yang akan dipergunakan pun menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Kurikulum yang dipergunakan menggunakan kurikulum reguler dan dimodifikasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta menggunakan kurikulum yang diindividualkan.

Manajer *Butterfly Learning Centre* beserta jajaran pengurusnya yang akan menangani peserta didik berkebutuhan khusus sangat penting dilibatkan dalam proses penyusunan perumusan kebijakan, hal ini dikarenakan merekalah yang akan menangani peserta didik berkebutuhan khusus ini. Unit *BLC* ini yang bertanggung jawab untuk membuat jadwal layanan bimbingan, konsultasi, serta pendampingan.

### 3. Adopsi Kebijakan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap dilaksanakan dengan konsep awal yang disampaikan oleh Benny Al Farichi sebagai penggagas awal untuk mengoptimalkan peserta didik dengan katagori berkebutuhan khusus dengan memberi layanan khusus dengan nama *Butterfly Learning Centre*. Adopsi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi diilhami oleh banyaknya peserta didik dengan katagori



berkebutuhan khusus sehingga menghasilkan sebuah kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan program *Butterfly Learning Centre*.

Program *Butterfly Learning Centre* merujuk pada sekolah sumber yaitu Sekolah Luar Biasa yang dijadikan rujukan dalam mengelola pendidikan inklusi dengan memperhatikan karakteristik peserta didik yang kemampuannya beragam. Penyelenggaraan pendidikan inklusif melibatkan perubahan dan modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan satu visi bersama yang meliputi semua anak yang berbeda pada rentangan usia yang sama dan satu keyakinan bahwa pendidikan inklusif adalah tanggung jawab pendidikan sistem regular yang mendidik semua peserta didik. Konsep pendidikan inklusif sebagai penciptaan masyarakat pembelajar, dimana pembelajaran dirancang secara khusus dan merespon kebutuhan peserta didik, oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan bergantung pada pekerjaan pendidik dan orang tua secara bersama-sama.

Kolaborasi antara pendidik dan orang tua menjadi sangat penting dalam memahami dan melaksanakan pendidikan inklusi. Demikian juga yang terjadi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap yang sangat mendukung program layanan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus ini, terutama orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Kolaborasi berhubungan dengan cara dimana para ahli berhubungan dengan yang lain dan orang tua, anggota keluarga seperti mereka, bekerjasama dalam mendidik siswa dengan kelainan khusus.

Dengan demikian, pendidik dalam mengelola pendidikan inklusif harus memahami kebijakan dan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu memberdayakan masyarakat yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus sehingga keluarga mengetahui pola asuh yang tepat untuk mengoptimalkan prestasi anak-anak mereka. disamping pola pengasuhan yang tepat dilaksanakan di sekolah maka perlu kiranya orang tua juga mendukung pola asuh yang tepat ketika peserta didik berkebutuhan khusus ini



sudah pulang ke rumah sehingga pendampingan dalam belajar di rumah menjadi lebih mnegenan dan berarti bagi peserta didik tersebut. Karena keberhasilan pendidikan secara umum maupun pendidikan inklusi tidak dapat berhasil tanpa dukungan dari orang tua peserta didik.

Ketiga langkah yang diambil oleh pengelola pendidikan inklusi melalui program BLC tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh James E. Anderson.

### **B. Tahapan Implementasi Kebijakan dalam Program *Butterfly Learning Centre*.**

Setelah menyusun agenda dan merumuskan kebijakan yang tepat, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan itu sendiri adalah cara yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan akan menjadi sia-sia apabila tidak dilaksanakan, oleh karenanya kebijakan program penyelenggaraan pendidikan inklusi melalui *Butterfly Learning Centre* harus diimplementasikan yaitu dilaksanakan oleh unit-unit pengelola. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap melalui program *Butterfly Learning Centre* sebagai pusatnya berada di SD Al Irsyad 02.

Model implementasi yang dilakukan oleh sekolah mengikuti model yang diperkenalkan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Untuk mengimplentasikan sebuah kebijakan terpengaruh oleh aktifitas dalam bentuk komunikasi antar organisasi, penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan kegiatan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

Ada tiga langkah yang dipergunakan dalam proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu :

*Pertama*, membuat desain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan prestasi, biaya dan waktu. Program yang dijalankan melalui *BLC* terkait dengan layanan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus meliputi layanan individu, layanan kelompok dan layanan psikologi anak. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dari masing-masing pendamping peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan perkembangan peserta didik tersebut agar dapat memperoleh prestasi sesuai dengan bakatnya. Sementara biaya menjadi kewenangan lembaga dalam menentukannya sesuai dengan kebutuhan layanan yang diberikan.

*Kedua*, melaksanakan program kebijakan dengan cara memberdayakan struktur-struktur personalia, dana, dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pengelola *BLC* sudah mempunyai jadwal pembimbingan yang dilaksanakan setiap hari dengan jumlah peserta didik yang dibimbing sesuai dengan alokasi waktu yang ada sehingga dapat secara optimal mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Karena para pengelola *BLC* ini merupakan orang-orang pilihan dengan latar belakang psikologi yang memadai sehingga dalam hal penanganan peserta didik menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan ramah terhadap anak.

*Ketiga*, membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan. Dalam menjalankan tugasnya para pengelola program *BLC* yang ada mempunyai jadwal supervisi atau penilaian dari atasannya agar dalam pelaksanaan pendampingan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dapat control dan dievaluasi agar pelaksanaannya sesuai dengan prosedur.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi dilihat dari segi biaya lebih besar dari pada penyelenggaraan pendidikan reguler. Sebagai gambaran

bahwa besarnya dana pengembangan sekolah di SD Al Irsyad 01 dan SD Al Irsyad 02 Cilacap adalah Rp 7.500.000,00, sedangkan Amal Penyelenggaraan Pendidikan (APP) untuk peserta didik regular sebesar Rp 400.000,00 sementara untuk peserta didik inklusi yang dikelola oleh *butterfly Learning Centre* sebesar Rp 700.000,00

Kebijakan ini diambil berkenaan dengan layanan yang diberikan kepada peserta didik dengan kategori peserta didik berkebutuhan khusus. Layanan yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dan menyesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh pengelola *Butterfly Learning Centre*.

Layanan yang diberikan berupa layanan harian, yaitu dalam satu pekan ada 5 kali layanan intervensi yang diberikan setiap peserta didik untuk konsultasi. Layanan intervensi dilakukan 2 kali secara individu, dengan layanan satu peserta didik dibimbing oleh satu pembimbing. Layanan kelompok dilakukan satu pekan sekali. Layanan TIK satu pekan sekali dan prakarya satu kali dalam satu pekan. Itulah mengapa biaya yang diperuntukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus lebih besar dari pada peserta didik regular. Di samping kegiatan layanan harian yang diberikan pada peserta didik berkebutuhan khusus yang telah disebutkan di atas, juga ada layanan yang diberikan pada setiap semester yaitu kegiatan Outdoor Study, berupa berenang, outbond, dan wisata edukasi. Layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gigi. Dan pada akhir tahun diadakan Famili Gathering sebagai ajang bagi pihak sekolah bertemu dengan pihak wali peserta didik untuk menyampaikan berbagai hal mengenai pendidikan dan pola pendidikan yang disampaikan dengan suasana yang akrab tidak terlalu kaku dan formal.

### C. Tahapan Evaluasi Kebijakan.

Setelah dilakukan implementasi tentang kebijakan maka tahapan selanjutnya adalah evaluasi dari sebuah kebijakan. Suatu kebijakan tidak boleh

dibiarkan tanpa adanya evaluasi. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan berlangsung maka perlu adanya pemeriksaan atau evaluasi. Evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan tetapi lebih pada usaha untuk mengetahui adanya kekurangan dan kelemahan yang mungkin ada dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, agar kebijakan yang sudah diterapkan dapat diperbaiki sehingga akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

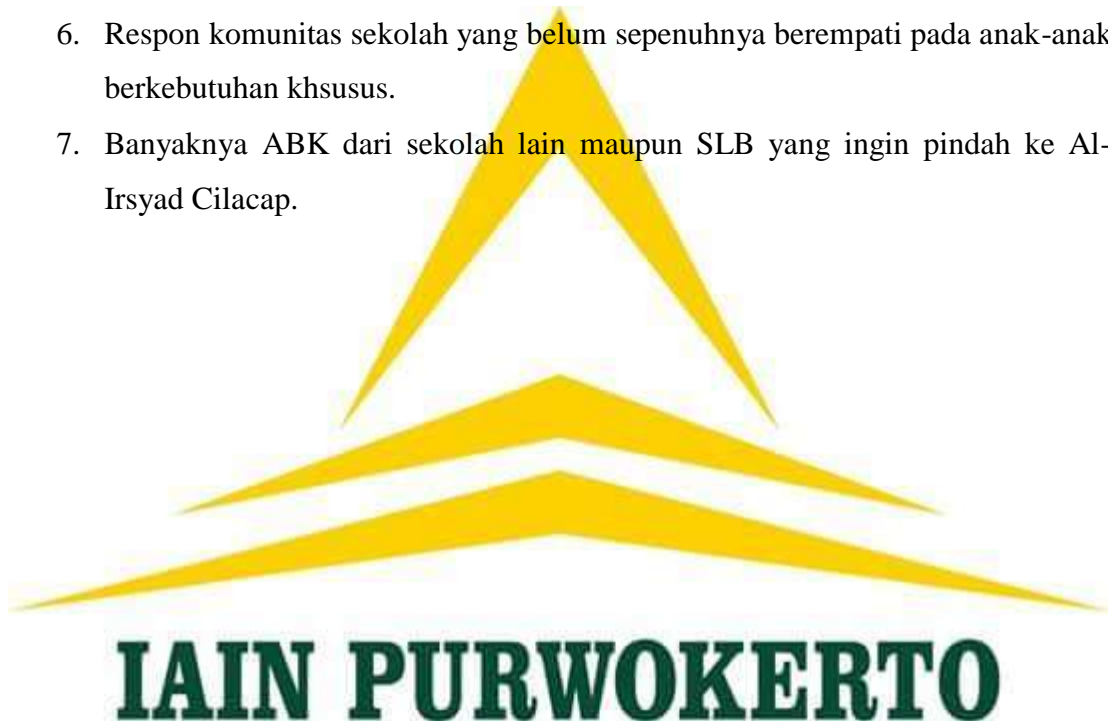
Pelaksanaan evaluasi kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap mengacu pada teorinya Bingham dan Felbinger yang membagi evaluasi kebijakan menjadi empat. Pertama evaluasi proses yaitu bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga terhadap sebuah kebijakan, dalam hal ini adalah evaluasi tentang program inklusi. Kedua evaluasi dampak yaitu evaluasi yang menilai tentang hasil akhir dari sebuah kebijakan yang dalam kajian ini adalah program inklusi. Ketiga evaluasi kebijakan yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang telah direncanakan. Yang keempat adalah meta-evaluasi merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil temuan evaluasi kebijakan.

Evaluasi yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap dilakukan dengan menyeluruh mulai dari sistem penerimaan peserta didik baru, kurikulum yang digunakan, proses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus mulai dari pelayanan intervensi sampai upaya pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus, dan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Evaluasi yang dilakukan bagi peserta didik inklusi sebagaimana disampaikan oleh Yudhi Pramudityo, S.Psi sebagai menejer BLC adalah :

1. Masih banyak masalah penyerta (sekunder) pada anak berkebutuhan khusus dibanding dengan masalah inti yang dihadapi anak itu sendiri.
2. Pemahaman guru yang kurang di kelas reguler mengenai anak-anak berkebutuhan khusus.

3. Pemahaman anak-anak umum lainnya mengenai kondisi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga sarat pembulian pada ABK, terutama pada jenjang SMP dan SMA.
4. Orang tua yang ingin melepaskan anaknya dari intervensi BLC, padahal anak belum mampu untuk berjuang mandiri di kelas umum.
5. Kesulitan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan teman-teman dikelasnya pada ABK (membuat anak dan orang tua memiliki konsep diri yang kurang baik).
6. Respon komunitas sekolah yang belum sepenuhnya berempati pada anak-anak berkebutuhan khusus.
7. Banyaknya ABK dari sekolah lain maupun SLB yang ingin pindah ke Al-Irsyad Cilacap.





## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian, paparan data, temuan penelitian serta analisa data dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu yang berjudul “ Kebijakan Lembaga Pendidikan Dalam Mengelola Pendidikan Inklusi Di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap”, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Dalam membuat formulasi kebijakan yang akan diambil oleh sebuah lembaga pendidikan yang mengelola pendidikan inklusi maka langkah pertama adalah dengan menyusun agenda kebijakan. Tidak semua masalah masuk menjadi agenda kebijakan, hanya masalah yang perlu penanganan serius yang menjadi agenda kebijakan. Yang menjadi fokus dalam agenda kegiatan ini adalah yang terkait dengan Program layanan bagi peserta didik dengan katagori berkebutuhan khusus. Kedua perumusan kebijakan sangat bergantung pada seberapa besar para peserta dapat memainkan peranan masing-masing dalam memformulasikan kebijakan. Adapun langkah yang dilakukan dengan merumuskan masalah, menentukan agenda, dan adopsi kebijakan.
2. Implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap. Model implementasi yang dilakukan oleh sekolah mengikuti model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Untuk mengimplentasikan sebuah kebijakan terpengaruh oleh aktifitas dalam bentuk komunikasi antar organisasi, penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan kegiatan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.
3. Evaluasi terhadap sebuah kebijakan. Suatu kebijakan tidak boleh dibiarkan tanpa adanya evaluasi. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan berlangsung



maka perlu adanya pemeriksaan atau evaluasi. Evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan tetapi lebih pada usaha untuk mengetahui adanya kekurangan dan kelemahan yang mungkin ada dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, agar kebijakan yang sudah diterapkan dapat diperbaiki sehingga akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan evaluasi kebijakan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan inklusi di SD Al Irsyad 01 dan 02 Cilacap mengacu pada teorinya Bingham dan Felbinger yang membagi evaluasi kebijakan menjadi empat yaitu evaluasi proses, evaluasi dampak, evaluasi kebijakan yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang telah direncanakan, dan meta-evaluasi.

Secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan melalui program *Butterfly learning Centre* sesuai dengan teorinya James E. Anderson yaitu : penetapan agenda, perumusan, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

## **B. Rekomendasi dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat di sampaikan beberapa rekomendasi hasil penelitian. Adapun saran-saran yang dapat penulis lakukan dalam rangka meningkatkan pendidikan adalah :

1. Kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat melalui dinas pendidikan untuk terus memperbaiki dan mensupport program inklusi sehingga semua peserta didik dapat menikmati layanan pendidikan dengan baik agar dapat meraih asa yang dicita-citakan, tak terkecuali bagi peserta didik dengan katagori berkebutuhan khusus yang beaneka ragam jenis hambatan dan keterbatasan yang dimiliki.
2. Kepada yayasan Al Irsyad Cilacap untuk terus berupaya mewujudkan pendidikan yang unggul, modern, dan berakhlakul karimah sebagaimana visi yang ada di sekolah. Memberi dorongan baik moral maupun material terhadap pelaksanaan pendidikan terutama bagi program pendidikan inklusi sehingga

peserta didik berkebutuhan khusus dapat menikmati pendidikan sebagaimana peserta didik yang lain.

3. Kepada kepala sekolah, manajer inklusi, manajer kelas, pendidik dan tenaga kependidikan agar selalu menjaga eksistensinya dalam dakwah dibidang pendidikan dengan cara meningkatkan kualitas diri dan lembaga pendidikan. Melayani dengan sabar dan ikhlas sebagai bentuk pengabdian pada Allah SWT melalui jalur pendidikan terutama pendidikan inklusi.
4. Kepada para pembaca tesis ini, penulis mengharapkan sumbang saran dan kritik yang membangun demi sempnanya tesis ini dan untuk perbaikan penelitian dimasa yang akan datang. Sesungguhnya tidak ada kesempurnaan di dunia ini kecuali kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah SWT yang maha sempurna. Akhirnya semoga tulisan yang singkat ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahnya , Departemen Agama RI (Semarang: Asy-Syifa)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* ( Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Suryabrata,Sumadi. *Metodologi Penelitian* ( Jakarta : Raja Grapindo Persada, 1993 )
- Aziz,Safarudin. *Pendidikan seks anak berkebutuhan khusus* ( Yogyakarta: Gava Media, 2015 )
- Budiyanto. *Pengantar Pendidikan Inklusif berbasis budaya Lokal* (Jakarta: Depdiknas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Direktorat pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, 2005 )
- Efika Nurrahmasari Lubis “Iplementasi kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi jenjang SD se Kota Yogyakarta <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/sakp/article/download/5196/4871> Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 2 Volume V tahun 2016 . Diakses 14 maret 2017
- Fatah, Nanang. *Analisis kebijakan Pendidikan* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Friend,Marilyn dan William D. Brusick, *Menuju Pendidikan Inklusi Panduan Praktis Untuk Mengajar* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015)
- G.Mac Ruairc E.Ottesen and Precey, *Leadership for Inclusive Education* ( Rotterdam, Sense Publisher, 2013)
- Hermino,Agustino. *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Hery Kurnia Sulistyadi” Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan layanan Pendidikan Inklusi di kabupaten Sidoarjo” <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp08e4cbae56full.pdf>. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303-341X,Volume 2, nomor Januari 2014. Diakses 12 april 2017
- <http://kbbi.web.id/lembaga> di akses 20-3- 2017
- <http://www.kajianteor.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html> diakses 5 maret 2017

[Http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA\\_E.PDF](http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF) The Salamanca Statement and Framework For Action On Special needs Educations (Printed In UNESCO, 1994 )hlm 12 ED-94/WS/18

Ilahi,M Takdir. *Pendidikan Inklusif:konsep dan Aplikasinya* ( Yoyjakarta: Ar Ruzz Media, 2013)

Imron,Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

\_\_\_\_\_, Ali. *Manajemen Peserta didik Berbasis Sekolah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012)

Irianto,Yoyon Baktiar. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan* ( Jakarta: Rajawali Press, 2012 )

James E. Anderson, *Public policy Making* ( New York: Holt,Rinahart and Winston, 1984 )

Kustawan,Dedi dan Yani Meimulyani. *Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya* ( Jakarta, PT Luxima, 2016 )

\_\_\_\_\_, Dedi. *Manajemen Pendidikan Inklusif* ( Jakarta,PT Luxima Metro Media,2016 )

\_\_\_\_\_, Dedi. *Pendidikan Inklusif & Upaya implementasinya* (Jakarta: Luxima, 2012)

\_\_\_\_\_, Dedi. *Manajemen Pendidikan Inklusi* (Jakarta: Luxima, 2016)

Martan,Lay Kekah. *Manajemen Pendidikan Inklusif* ( Jakarta:Dirjen Dikti, 2007 )

Masngud dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia* ( Yogyakarta: Idea Press, 2010 )

Rahardjo,Mudjia. *Pemikiran kebijakan Pendidikan* ( Malang, UIN Maliki Pres, 2010 )

Moleong,Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012 )

Muhimin dan Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1993)

- Mujib, Adul dan Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Di negara-negara berkembang* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2015)
- Nursehan Sugiharto, kebijakan Pendidikan dan Implementasinya Di Kabupaten Purwakarta <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20314001-T%2031759Kebijakan%20pendidikan...pdf>, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, 2012 .Diakses 12 April 2017
- Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. *kamus ilmiah populer* (Surabaya: Arkola, 1994)
- Pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi ,pengadaan dan pembinaan tenaga pendidik* (Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah: Departemen Pendidikan Nasional , 2009)
- Pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan pembelajaran* ( Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, direktorat jenderal manajemen pendidika dasar dan menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2009 )
- Pedoman Manajemen sekolah Inklusif Pendidikan Dasar* ( Direktorat Pembinaan sekolah Luar Biasa, Dirjen Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah, Depertemen Pendidikan Nasional 2008)
- Pedoman manajemendan pembelajaran sekolah inklusi tunarungu* ( Direktorat pembinaan sekolah luar biasa, Direktorat jenderal manajemen dasar dan menengah kementerian Pendidikan Nasional, 2010 )
- Putra, Nusa dan Hendarman. *Metodologi Penelitian Kebijakan* (Bandung: PT Rosda Karya, 2012)
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), Cet ke.9.
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Cilacap tanggal 02 Juli 2008
- Rohman, Arif dan Teguh Wiyono. *Education Policy* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Rusdiana, H.A. *Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)



Sahidi,Ariandi. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi,*Tesis*,  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/6234/1/14770040.pdf>. Program studi  
Manajemen Pendidikan Islam, pascasarjana Institut Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang ,2016. Diakses 10 April 2017

Saidah,U.H. *Pengantar Pendidikan*,( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016 )

Somantri,T.Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa* ( Bandung : PT. Refika Aditama,  
2006 )

Subarsono,A.G. *Analisis Kebijakan Publik* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016)

Sugiyono,*Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sukmadinata,Nana Syaodih. *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Rosda  
Karya, 2013)

Suryabarata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993)

Suyanto,*Pedoman Khusus Penyelenggaraan pendidikan Inklusi* (Direktorat  
pembinaan sekolah luar biasa Didektorta Jenderal Manajemen Pendidikan  
Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2009)

Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan* ( Jakarta: Rinaka Cipta, 2008 )

Tarmasyah, *Inklusif, Pendidikan Untuk Semua* ( Jakarta: Depdiknas,Direktorat  
Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan, 2007 )

Terry Irenawaty dan Amran, Implementasi kebijakan pendidikan Inklusi di SMA  
Muhammadiyah 4 Yogyakarta, <http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Dr.%20Aman,%20M..../B-7.PENELITIAN.pdf> Diakses 12 April 2017

Tilaar,H.A.R dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar, 2012)

\_\_\_\_\_, H.A.R. *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,  
2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
(Bandung: Citra Umbara)

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik,teori, proses, dan studi kasus* (Yogyakarta : CAPS,  
2012)



Yusmaniar Nur Aini “ *Manajemen pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Islam Terpadu An Nida Purwokerto dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati Klampok Banjarnegara*, tesis IAIN Purwokerto 2016

Yusraini “Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusi” [http://e-journal. Iain jambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/viewFile/170/153](http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/viewFile/170/153)Media Akademika Volume 28, nomor 1, tahun 2013. Diakses 25 maret 2017

